Dr. Dra. Hermayawati, S.Pd., M.Pd.

Penerbit: MBridgePress
Yogyakarta, 2015

BIDIK KEMAMPUAN
MENULIS ARTIKEL ILMIAH POPULER

BIDIK KEMAMPUAN MENULIS ARTIKEL ILMIAH POPULER
Penerbit MBridgePress
Yogyakarta, 2015

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

PRAKATA..... iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

BAB II. KONSEP DAN JENIS-JENIS KARYA ILMIAH POPULER 2

A. Hakikat Karya Ilmiah Populer 2

B. Jenis-Jenis Karya Ilmiah Populer 3

BAB III. KRITERIA PENULISAN KARYA ILMIAH POPULER (KIP) 4

BAB IV. PROSEDUR PENULISAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH POPULER 6

A. Prosedur Penulisan Karya Ilmiah Populer (KIP) 6

B. Publikasi Artikel Ilmiah Populer 7

BAB V. BERBAGAI CONTOH AKTUAL PRODUK KARYA ILMIAH POPULER 8

A. Berita/Laporan (*News*) 8

B. Ulasan (*Review*) 12

C. Opini (Op-eds) 15

D. Analisis (Analysis) 18

BAB VI. PEMBAHASAN 43

BAB VII. PENUTUP 45

GLOSSARY 47

DAFTAR PUSTAKA 48

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkah rahmat-Nya buku Kumpulan Artikel Koran ini berhasil disusun dan diterbitkan. Buku ini diterbitkan dengan tujuan memberikan gambaran melalui berbagai contoh artikel khusus untuk penulisan karya ilmiah populer di koran bagi mahasiswa diberbagai jenjang pendidikan, guru dan dosen yang berminat belajar menulis. Ketersediaan contoh artikel koran dirasa sangat penting dengan mengingat kecilnya persentase kemampuan menulis baik di kalangan para akademisi termasuk guru dan mahasiswa.

Keterampilan menulis perlu dibiasakan karena memerlukan waktu dan pengalaman penulis yang bersangkutan. Menulis karya ilmiah populer dalam koran dan majalah berbeda dengan karya ilmiah untuk tujuan akademis seperti artikel jurnal, laporan penelitian dan buku referensi yang memerlukan penggunaan bahasa baku. Artikel koran ditulis dengan bahasa yang sederhana, gaya selingkung yang lincah agar mudah dipahami oleh pembaca. Kriteria penulisannya pun berbeda. Buku ini secara umum memuat tentang konsep, pemilihan judul atau pokok bahasan, pemilihan bahasa, langkah-langkah penulisan karya ilmiah populer untuk koran atau surat khabar serta contoh-contohnya. Muatan artikel pada umumnya menyangkut permasalahan pendidikan formal, non-formal serta fenomema terkait dengan ketenaga-kerjaan yang sedang hangat pada saat penerbitannya masing-masing.

Buku ini bukan hanya bermanfaat sebagai sarana pembelajaran menulis artikel di koran namun juga sebagai referensi yang relevan dengan masing-masing judul yang ada di dalamnya. Sasarannya terutama adalah para penulis pemula, termasuk di dalamnya adalah siswa, mahasiswa, guru dan dosen. Namun demikian, harus diakui bahwa karya buku ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima masukan yang membangun untuk lebih sempurnya buku ini. Demikian sekapur sirih ini penulis sampaikan, atas pemanfaatan buku ini penulis mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat!

Yogyakarta, September 2018

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucap Alhamdulillah, dan puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rakhmat dan hidayah-Nya yang tidak terhingga atas tersedianya Buku Rujukan Karya Tulis Ilmiah Populer ini. Buku ini tidak hanya bersi teori atau konsep menyangkut karya ilmiah populer semata, namun juga disertai dengan berbagai contoh Artikel nyata yang telah dipublikasikan di media massa, baik dalam bentuk cetak maupun daring. Dengan demikian Penulis berharap, Buku ini dapat dijadikan sebagai gambaran baik secara normatif konseptual maupun sebagai gambaran praksisnya.

Sasaran pengguna Buku ini adalah para mahasiswa pada berbagai jenjang pendidikan, guru, praktisi dan dosen pemula khususnya yang terkait dengan bidang Pendidikan. Ketersediaan Buku ini tentu tidak terlepas dari uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada berbagai pihak berikut:

1. Segenap Pimpinan Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada para dosen, khususnya Penulis, untuk menerbitkan Buku ini;
2. Pimpinan Penerbit MBPress dan staf yang telah bekerja keras untuk mewujudkan ketersediaan Buku ini;
3. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah memberikan dorongan moril untuk penerbitan Buku ini.

Akhir kata, semoga Buku ini mendatangkan manfaat bagi para pembaca sebagai bahan referensi penulisan karya ilmiah, baik yang bersifat akademis maupun populer. Semoga.

Yogyakarta, 16 Juli 2018

Penulis

IKHTISAR

Buku ini dirancang untuk memberikan fasilitas kepada para pembaca khususnya mahasiswa jurusan pendidikan bahasa berkaitan dengan adanya mata kuliah keterampilan hidup (*life skill*) "Journalism" pada Program Studi Pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Namun tidak menutup kemungkinan, Buku ini juga dapat dirujuk oleh siapa saja yang ingin mengembangkan kemampuan menulis di media massa.

Tujuan penulisan Buku ini adalah menyediakan referensi bagi para pembaca untuk dapat menulis karya ilmiah populer di media massa yang mungkin dapat digunakan sebagai tambahan pekerjaan sampingan selain menyediakan referensi bagi orang lain yang memerlukan. Buku ini memuat konsep sekaligus praktik penulisan karya ilmiah populer beserta berbagai contoh karya penulis di salah satu media cetak dan daring (*on line*). Berbagai contoh yang disajikan dalam buku ini juga dapat digunakan sebagai referensi karya ilmiah akademis, khususnya di bidang pendidikan, sosial dan budaya.

Buku ini terdiri dari 8 Bab yang menyangkut: (1) Pendahuluan, (2) Konsep dan Jenis-Jenis Karya ilmiah Populer, (3) Kriteria Penulisan KIP, (4) Prosedur Publikasi Artikel Ilmiah Populer, (5) Berbagai Contoh Aktual Produk Karya Tulis, (6) Pembahasan, (7) Simpulan, dan (8) Penutup. Materi Buku ini juga tersedia secara daring dan telah banyak digunakan oleh mahasiswa di lingkungan penulis bekerja.

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) saat ini semakin cpat melesat di berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Semua ilmu pengetahuan semakin berkembang secara komprehensif dan masif sehingga tampak semakin mengerucut tidak terpisahkan satu sama lain. Perkembangan pada suatu bidang kini dapat diakses oleh berbagai bidang ilmu yang lain. Perkembangan teknologi saat ini juga sudah banyak dimanfaatkan dalam bidang pendidikan yang juga melibatkan sektor lain seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Pendidikan saat ini bukan lagi diidentikkan dengan menara gading yang tidak ramah dan lentur terhadap perkembangan bidang lain. Hal ini telah menggeser pandangan para ahli pendidikan untuk tanggap menyesuaikan diri dengan keadaan. Muatan pendidikan bukan lagi ditetapkan secara *top down* dan difokuskan pada apa yang mestinya diajarkan melainkan dirancang secara *bottom up* sesuai dengan pengguna produk pendidikan. Lembaga penndidikan pun mulai berbenah diri untuk menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan peserta didik, regional, nasional dan pasar kerja. Peserta didik terutama di perguruan tinggi sudah semestinya bukan hanya menitik-beratkan kurikulum pada bidang keilmuan melainkan juga mengasah berbagai keterampilan hidup (*life skills*) sebagai sarana untuk bertahan hidup bagi para lulusan. Salah satu yang dapat dilakukan adalah keterampilan menulis karya ilmiah populer (KIP) di media cetak atau pun secara daring (*on line*).

Menulis artikel untuk surat kabar membutuhkan kemampuan untuk dengan cepat membedakan kepentingan publik, menemukan sumber daya lokal yang tepat waktu dan bertarget, serta menghasilkan salinan yang sederhana dan dapat dipindai. Menulis artikel surat kabar seperti ini memerlukan keterampilan dan pengalaman (Tapia, 2018). Artinya, untuk menjadi penulis media massa profesional memerlukan latihan secara terus menerus. Penulis juga harus membiasakan diri banyak membaca berbagai berita atau informasi aktual agar tulisannya selalu mengikuti perkembangan atau situasi yang sedang berlangsung dan terjadi di masyarakat sekitar baik pada tataran regional, nasional maupun global.

BAB II

KONSEP DAN JENIS-JENIS KARYA ILMIAH POPULER

A. Hakikat Karya Ilmiah Populer

Karya Ilmiah Populer (KIP) yang biasanya ditulis dalam bentuk Artikel ilmiah populer, yaitu artikel ilmiah yang ditulis menggunakan gaya bahasa jurnalistik yang dimuat di media massa, seperti surat kabar, majalah, dan tabloid. Berbeda dengan artikel ilmiah, artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Artikel ilmiah populer ditulis untuk konsumsi publik. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat pembaca pada berbagai tataran kehidupan sodial. Artikel ilmiah populer dapat berupa hasil penelitian ilmiah, namun disajikan dengan lebih ringkas dan lugas, bisa pula dibuat berdasarkan berpikir deduktif atau induktif, atau gabungan keduanya yang bisa 'dibungkus' dengan opini penulis. Tak jarang artikel ilmiah populer ini disebut juga sebagai opini ilmiah (Anonim, 2017) .

Menurut Chan (2012) dan Stovall (2015) karya ilmiah populer (*Popular ScentificWork*) merupakan suatu karya yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang populer sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Keduanya juga sepakat bahwa penulisan karya ilmiah populer di media massa berbeda dengan penulisan karya ilmiah akademis yang harus memenuhi tata tulis ilmiah. Perbedaannya, terutama terletak pada gaya bahasa, tata bahasa, diksi atau pemilihan kata yang tentunya lebih komunikatif dan mudah dipahami oleh pembaca pada semua tataran, baik tataran pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan agama.

Menulis karya ilmiah populer (KIP) relatif tidak mudah. Oleh karena itu, jenis karya ini sangat diminati oleh banyak orang, namun faktanya tidak banyak yang "beruntung" mendapatkan karya mereka terpampang di media massa yang dituju. Pernyataan bahwa menulis KIP tidak mudah juga dinyatakan oleh Susantio (2017) yang mengutip pernyataan Bertold dan dimuat dalam Kompasiana Online (https://www.kompasiana.com/). Menurut Amin (2015), perbedaan penulisan KIP dan karya ilmiah akademis (KIA) adalah, pada KIP memuat persoalan seperti kritik terhadap pemerintah, analisis terhadap suatu peristiwa yang sedang populer di tengah masyarakat, jalan keluar bagi persoalan yang sedang

dihadapi masyarakat, atau sekadar informasi baru yang ingin disampaikan kepada masyarakat.

Meskipun tidak mudah, bukan berarti bahwa menulis KIP tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Banyak pula "*freelancer*" yang sering lolos mempublikasikasikan artikel mereka yang sering membuat mere merasa 'tersanjung' karena tulisan mereka banyak dibaca orang lain dan menjadi referensi. Agar terpublikasi di media massa, penulis KIP perlu banyak latihan menulis, tidak menyerah karena tulisannya berulangkali gagal publikasi, berwawasan luas serta selalu mengikuti perkembangan zaman dengan cara banyak membaca terutama menyangkut berbagai hal yang baru.

B. Jenis-Jenis Karya Ilmiah Populer

Tapia (2018) menggolongkan penulisan untuk mass media menjadi tiga kategori, yaitu: *copywriting, journalistic writing* dan *creative writing*. *Copywriting* digunakan sebagai istilah untuk menggambarkan fakta bahwa Anda sedang menulis salinan. Salinan ini dapat berupa iklan/pemasaran, web, konten untuk perusahaan seperti penulisan bisnis, teknologi atau konten untuk penerbit. Pada dasarnya, *copywriting* adalah tulisan untuk bisnis. *Journalistic writing* mencakup tulisan untuk berbagai majalah seperti majalah perdagangan, judul konsumen atau surat kabar. Jenis karya jurnalistik mencerminkan status sosial bagi penulisnya. Oleh karena itu, jenis karya tulis ini banyak diminati oleh para akademisi akan tetapi sulit diterima untuk dipublikasikan karena ketatnya persaingan di antara penulis. *Creative writing* mencakup salinan yang lebih kreatif. Contohnya termasuk model kartu ucapan, kartu undangan pernikahan, iklan barang, pemberitahuan upacara pemakaman dan sebagainya. Jenis karya tulis ini cocok bagi penulis kreatif.

Berbeda dengan pendapat Tapia seperti tersebut di atas, Penulis mengkategorikan karya tulis berdasarkan tujuan penulisan karya ilmiah populer, yaitu sebagai berikut: (1) laporan (*report*) atau berita (*news*); (2) ulasan (*review*); (3) Opini; dan (4) analisis (*analysis*). Namun demikian, buku ini hanya menampilkan berbagai contoh karya "Opini" dan "Analisis" yang merupakan Kolom Surat Kabar tempat penulis mempublikasikan berbagai karya tersebut sebagai penulis sambilan (*freelancer*). Jenis karya tulis "Berita" dan "Ulasan" biasanya ditulis oleh staf penulis tetap tetap pada majalah atau surat kabar. Sebagai gambaran, berikut disajikan definisi masing-masing jenis karya tersebut di atas.

Pertama, laporan (*report*). Sesuai dengan namanya, jenis tulisan ini menyajikan suatu laporan tentang suatu fenomena atau keadaan faktual berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. berita (news). Jenis artikel ini memuat tentang suatu kejadian (*event*) aktual yang dipandang penting untuk diumumkan kepada masyarakat, melalui pembaca. Menurut Tapia (2018), Penulisan berita adalah pelaporan berita dasar yang dimuat di media cetak. Isi berita menjelaskan siapa, apa, kapan, di mana dan mengapa informasi tentang berita tersebut penting dipublikasikan. Panjang beritanya bervariasi, begitu juga materi pokoknya. Secara umum, berita ini diliput oleh staf penulis surat khabar pada saat peristiwa terjadi, tetapi *freelancer* dapat juga menuliskan kembali berita tersebut secara lebih detil atau mendalam.

Kedua, ulasan (*review*). Jenis artikel ini memuat tentang suatu ulasan tentang karya orang lain. Tujuannya adalah untuk memberikan kritik atau masukan yang dapat menyempurnakan karya seseorang tersebut.

Ketiga, opini (*Op-eds*) atau potongan opini. Opini umumnya ditulis oleh wartawan *freelance* kecuali wartawan bekerja untuk organisasi lain dalam kapasitas PR (*Public Relation*). *Op-eds* dimuat pada halaman "kebalikan dari editorial" - dengan demikian, jenis karya tulis “Opini” disebut "*OP"posite-"ED*" itorial (Tapia, 2018). Jenis artikel ini memuat tentang pendapat penulis menyangkut suatu hal atau peristiwa yang terjadi di lapangan baik pada skala regional, nasional maupun global. *Ops-ed* memuat sekitar 600 kata dan biasanya dimuat pada bagian dalam halaman surat kabar.

Keempat, analisis (*analysis*). Artikel “Analisis” memuat hasil pemikiran penulis yang tersaji secara kritis dan teoretis terhadap suatu kebijakan, fenomena ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, kultural dan berbagai kejadian yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, penulis memulai tulisannya dengan merujuk pada suatu fenomena tentang suatu aspek yang menarik perhatiannya dan sedang menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Atas dasar referensi tersebut, penulis memberikan penawaran alternatif solusi yang disampaikan secara normatif, sesuai dengan kaidah-kaidah teoretis maupun berbagai pengalaman yang pernah dilaluinya.

Untuk lebih jelasnya, berbagai contoh jenis karya tulis ilmiah populer sebagaimana diuraikan di atas disajikan pada Bab V.

BAB III

KRITERIA PENULISAN KARYA ILMIAH POPULER (KIP)

Agar sukses menulis Karya Ilmiah Populer (KIP), penulis harus mempertimbangkan kaidah-kaidah atau kriteria yang mestinya dipenuhi agar karyanya dapat dimuat di media massa. Hal ini mengingat media cetak memiliki keterbatasan tempat. Bertold (sebagaimana dikutip oleh Susantio, 2017) menytakan bahwa penulis harus memperhatikan sistem piramida. Artinya bagian yang dianggap penting ditulis pada bagian awal. Bagian-bagian yang kurang penting ditulis pada bagian selanjutnya. Melalui sistem piramida ini, redaktur atau editor tinggal membuang tulisan pada bagian paling belakang untuk menyesuaikan tempat pada media cetak. Hal ini berbeda dengan media daring yang tidak ada keterbatasan tempat, sehingga penulis dapat memaparkan karyanya lebih leluasa.

Karakteristik karya ilmiah populer, antara lain. Pertama, opini tentang suatu masalah atau peristiwa disertai fakta empiris dan teori pendukung. Kedua, menjadi sarana komunikasi antara ilmuwan dan masyarakat (orang awam). Ketiga, menggunakan gaya bahasa populer atau bahasa media (bahasa jurnalistik) yaitu sederhana, mudah dipahami orang awam, singkat, dan efektif. Keempat, menerjemahkan bahasa iptek yang sulit ke dalam bahasa yang mudah dimengerti secara umum. Keenam, mudah dicerna karena berkaitan erat dengan kejadian sehari-hari. Ketujuh, memperkenalkan ilmu atau temuan baru serta mengaitkan dengan kebutuhan masyarakat (Amin, 2015).

Menurut Noor (2017) tulisan ilmiah populer yang baik memiliki kriteria yang relatif tidak mudah, yang di antaranya adalah sebagai berikut: (1) Topik yang dipilih menyangkut kepentingan orang banyak, bersifat kontroversial; (2) Penulis memiliki keterampilan mengalih-bahasakan temuan ilmiah ke dalam bahasa sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca; (3) Muatannya mengacu pada sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah internasional bereputasi; (4) Sumber acuan harus yang aktual sehingga penulis harus banyak membaca berbagai penemuan ilmiah terbaru; (5) Penulis memahami metodologi penelitian yang melatar-belakangi sumber dan acuan tulisan ilmiah yang ditulisnya; (6) Penulis mampu memilih sumber acuan kompeten yang merupakan sumber tulisan pertama yang mengangkat topik tersebut; (7) Penulis mampu menggunakan terminologi yang biasa digunakan dalam tulisan ilmiah.

Kriteria penulisan KIP sebagaimana dipaparkan oleh Amin dan Noor tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Namun demikian sebenarnya ada satu hal lain yang juga sangat penting untuk penulisan KIP agar berteima dan dimuat di media massa, yaitu kejelian penulis dalam memilih dan menentukan judul agar menarik perhatian pembacanya. Pemilihan judul harus singkat, bombastis, lugas dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami pembaca. Sebagai contoh judul artikel ilmiah populer penulis yang berhasil dipublikasikan dalam surat kabar harian dapat dilihat di Bab V.

BAB IV

PROSEDUR PENULISAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH POPULER

A. Prosedur Penulisan Karya Ilmiah Populer (KIP)

Cara mudah untuk menulis artikel ilmiah populer adalah jika kita menentukan garis-garis besar (*Outline*)-nya terlebih dulu. Berikut adalah tata urutan atau prosedur yang sebaiknya kita susun untuk menulis artikel populer. **Pertama**, menentukan topik atau judul yang bombastis, aktual atau terkini dengan bahasa yang singkat, lugas dan mudah dimengerti oleh segenap lapisan pembaca. Judul hendaknya berbentuk frase (*phrase*), bukan dalam bentuk kalimat lengkap. **Kedua**, menuliskan "Pendahuluan" yang memuat suatu kejadian atau fenomena aktual yang sedang hangat diperbincangkan, pernyataan pejabat negara yang kontroversial, penemuan berbagai fakta sejarah dan sebagainya yang sekiranya menjadi daya tarik pembaca agar membaca artikel tersebut hingga tuntas. **Ketiga**, menulis isi atau pokok permasalahan yang sedang dibahas dilanjutkan dengan analisisnya. Muatan atau isi artikel dapat berupa informasi detil, hasil pemikiran penulis berdasarkan kajian ilmiah atau masukan yang merupakan solusi permasalahan yang sedang dibahas. Berbagai pernyataan pada bagian ini mencerminkan tataran keilmuan penulisnya menyangkut pemahamannya tentang penggunaan terminologi bidang terkait, metodologi dan cara menganalisis permasalahan yang muncul. **Keempat,** melakukan *editing* dengan cara membaca tulisan Anda kembali sebelum Anda memutuskan untuk mengirim artikel Anda ke media massa. Jika Anda penulis pemula, lebih baik jika Anda meminta tolong orang lain untuk membaca serta meminta pendapatnya tentang menarik atau tidaknya karya Anda

sampai Anda merasa yakin untuk mengirimkannya ke media massa yang Anda inginkan. **Kelima**, mengirimkan artikel Anda ke media massa.

B. Publikasi Artikel Ilmiah Populer

Berikut adalah langkah-langkah yang sebaiknya Anda lakukan untuk mempublikasikan artikel Anda ke media massa: (1) Menentukan salah satu media massa yang Anda tuju; (2) Menulis surat pengantar ke alamat Redaksi media massa yang Anda inginkan, secara formal dengan menyertakan identitas lengkap Anda, disertai pengalaman menulis yang pernah Anda lakukan (jika ada akan lebih baik); (3) Mengirimkan surat permohonan publikasi dengan lampiran Kartu Identitas atau Kartu Tanda Pengenal (KTP) Anda; (4) Menunggu jawaban kepastian diterima atau ditolaknya artikel Anda.

Pada umumnya, artikel dianggap kedaluarsa jika telah satu minggu belum dimuat. Jika Artikel ditolak, hendaknya Anda tidak berputus asa. Teruslah mencoba menulis dan kembali mengirimkan karya Anda ke media massa yang sama atau yang lainnya. Tentu saja, Anda harus mempelajari mengapa artikel Anda ditolak dan melakukan perbaikan dengan membaca berbagai contoh artikel yang lolos publikasi di berbagai media massa. Menyangkut pengiriman artikel, ada surat kabar yang tidak pernah mengabarkan diterima atau ditolaknya artikel karena terlalu banyaknya pengirim. Jika demikian halnya, Anda perlu menunggu selama satu minggu sejak hari pengiriman, barulah Anda bisa mengirimkannya ke media massa lain dengan pertimbangan beritanya masih hangat dan belum kedaluarsa.

Merupakan suatu kebanggaan tersendiri jika artikel Anda dimuat di media massa. Jika Anda terus menulis dan seringkali dimuat, artikel Anda nama Anda akan banyak dikenal orang, selain tulisan Anda juga banyak dirujuk oleh pembaca yang berminat. Banyak pejabat negara yang terkenal dan melesat karirnya karena menulis artikel ilmiah populer. Nah, tunggu apa lagi? Mulailah menulis artikel ilmiah populer mulai sekarang!

BAB V

BERBAGAI CONTOH AKTUAL PRODUK KARYA ILMIAH POPULER

Telah diuraikan pada Bab sebelumnya bahwa ada beberapa jenis Karya Ilmiah Populer (KIP), yaitu meliputi: Berita/Laporan (*News*), Ulasan (*Review*), Opini dan Analisis. Sebagai gambaran, berikut ini disajikan contoh untuk masing-masing jenis KIP tersebut.

A. Berita/Laporan (*News*)

Telah dijelaskan di muka bahwa penulisan karya tulis berjenis Berita/ News biasanya ditulis oleh staf tetap suatu mass media dan isinya menyangkut sesuatu hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat sehingga perlu diberitakan. Tujuannya adalah agar masyarakat pembaca terutama yang berkepentingan dapat memanfaatkan muatan berita tersebut untuk kepentingan bersama. Gambar 1 dan Gambar 2 merupakan karya berita yang ditulis oleh wartawan-wartawan senior surat kabar terkenal di Yogyakarta. Tulisan tersebut merupakan hasil wawancara secara langsung dengan penulis, sebagai narasumber.

Gambar 1 misalnya, memuat berita tentang eksistensi Buku Panduan untuk TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Pemuatan berita tersebut penting untuk diketahui pembaca yang berkepentingan, bahwa Buku untuk TKI sudah tersedia dan dirancang secara terstandar, sesuai dengan kaidah penulisan buku yang baik dan konseptual, sesuai dengan kebutuhan pengguna buku tersebut. Hal itu perlu dikabarkan, karena selama ini buku yang standar bagi TKI belum pernah ada.

Gambar 2 menyajikan artikel jenis “Berita” yang ditulis oleh wartawan media massa”Kedaulatan Rakyat” dengan judul “Sastra untuk Pahami Budaya Bangsa Lain”. Tulisan tersebut menginformasikan tentang Penulis yang mempresentasikan hasil penelitiannya ke *Southern Philippines University*, di Cebu Filipina atas biaya negara. Berita ini dimaksudkan untuk memberikan informasi hasil kinerja hibah penelitian tahun 2010 dan dipublikasikan tahun 2011 tentang suatu temuan baru menyangkut pemanfaatan karya sastra untuk sumber pembelajaran bahasa di sekolah menengah.

MINGGU PON 7 SEPTEMBER 2008 (7 PASA 1941)

PERBINCANGAN

"KEDAULATAN RAKYAT" HALAMAN 13

BEDAH BUKU

Pentingnya Kuasai Strategi Pembelajaran

STRATEGI PENDIDIKAN ANAK

Menegaskan Visi Pendidikan Indonesia

KURIKULUM YANG MENCERDASKAN

HERMAYAWATI

Ciptakan Modul Ajar Bahasa, agar TKI Kompetitif

Dr Hermayawati

Info Buku Baru

Kolom MAS Kasek

Bulan Mulia

Pojok KR

Gambar 1. Contoh Tulisan Berjenis "Berita/*News*"

SENIN KLIWON 15 AGUSTUS 2011 (15 PASA 1944)

PENDIDIKAN

"KEDAULATAN RAKYAT" HALAMAN 10

600 Siswa Disiapkan di Kapal Pesiar

pa mahasiswa Stipram. Tahun 2008 kegiatan ini dikembangkan dan dikelola Mr Black alias Rocky yaitu salah satu sahabat *the best juggler* Yogya Ferry (murid Anton Tri) yang selalu aktif di kafe-kafe yogya.

"Rocky adalah lulus D3 Stipram yang melanjutkan S1 Pariwisata di Stipram. Sambil kerja di salah satu kafe, Rocky mampu membimbing adik-adik kelasnya berakitvitas di dunia juggling. Salah satu murid bimbingannya adalah Vero yang masih duduk di semester V program D3 Perhotelan, yang selalu tampil kocak di panggung," jelas Subendroyono. (Ria)-o

Unjuk kebolehan juggling mahasiswa Stipram.

Pesantren Ramadan SD Muh Warungboto

YOGYA (KR) - Siswa SD Muhammadiyah Warungboto membuat kupat janur untuk mengisi kegiatan bulan Ramadan 1432 H. Tema yang diusung dalam kegiatan ini 'Menanamkan Nilai-nilai Keimanan dengan Kreativitas dan Kearifan Lokal'.

Kepala SD Muhammadiyah Warungboto, Rudi Hartono SE, Kamis (11/8) mengatakan, kegiatan Ramadan diawali pengajian dan kemah sengang Ramadan dilanjutkan salat Dhuha, kultum Ramadan, kegiatan belajar, pengajian Ramadan untuk wali murid, pesantren Ramadan dan pembagian zakat. "Tujuan kegiatan Ramadan ini untuk menanamkan kepada siswa nilai-nilai yang terkandung dalam puasa Ramadan, terutama dalam pembinaan karakter siswa tanpa mengurangi aktivitas dan kreativitas," katanya.

Hal yang paling menarik dalam kegiatan ini adalah pada saat pesantren Ramadan siswa mendapatkan tambahan materi keagamaan juga dengeng Islami. Disamping itu, ada materi *life skill* yang menanamkan siswa pada kearifan lokal yaitu merangkai janur untuk membuat ketupat. (Nik)-o

SMA Muh 3 Kirim Mubalig Hijrah

YOGYA (KR) - SMA Muhammadiyah 3 (Muga) Yogyakarta mengirim sebanyak 37 siswanya ke Samigaluh Kulonprogo untuk mengisi kegiatan mubalig hijrah (MH). Acara tersebut sudah dimulai beberapa hari lalu dan berakhir Sabtu (13/8). Kegiatan itu kerja sama dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Samigaluh.

"Selama dua minggu anak-anak tersebut ditempatkan di

Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) untuk mengapresiasi komitmen

sasaran kita adalah sebuah tujuan besar, menyiapkan anak-anak kita,

dukai Sinar Mas, antara lain mengola 146 sekolah dari tingkat usia dini

gai lokasi. (Mgu/Ati)-g

DOSEN UMBY WAKILI INDONESIA

Sastra untuk Pahami Budaya Bangsa Lain

YOGYA (KR) - Pembelajaran Bahasa Inggris dan bahasa asing lain yang komunikatif dapat dicapai secara efektif. Salah satunya melalui apresiasi karya sastra untuk memahami budaya bangsa lain. Pemahaman terhadap budaya negara atau bangsa lain itu dapat digunakan untuk menjembatani kesenjangan budaya (*cultural gap*) antarbangsa.

Hal itu dikemukakan Dosen Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) Dr Hermayawati dalam forum 'TESOL Asia & Asian EFL Journal International 'TESOL Conference', Sabtu (13/8) di University Southern Philippines (USP) Cebu yang kemudian disampaikan ke *KR*, sore harinya. Konferensi tersebut berlangsung Jumat-Sabtu (12-13/8). Indonesia diwakili 5 orang. Selain Hermayawati, utusan lain berasal dari Polines Semarang, Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan Politeknik Pertanak.

Hermayawati memaparkan makalah berjudul 'Analisis Pengajaran Bahasa Inggris di SMA Melalui Apresiasi Karya Sastra (*ELT Analysis Through Literary Works Appreciation*)'.

KR/Fadlin Sumbar

Dr Hermayawati

"Masalahnya, pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah terutama di tingkat lanjutan atas (SLTA) pada umumnya belum mengarah kepada pemahaman karya sastra. Karena kebanyakan guru belum menyadari tentang hal itu," ujarnya.

Padahal menurut Hermayawati, berbagai ragam karya sastra seperti cerita pendek, novel, komik, puisi, naskah drama dan sejenisnya dapat digunakan sebagai bahan atau materi pembelajaran bahasa yang sangat berguna untuk memperkenalkan budaya bangsa-bangsa lain.

Ia berharap, selain berbagai materi otentik atau materi ajar yang tidak secara sengaja didesain dalam bentuk buku atau diktat seperti lagu, iklan, brosur, surat, berita dan sebagainya, peserta didik juga perlu diperkenalkan wacana baik dalam bentuk kegiatan pemahaman ini wacana, pesan moral, maupun dalam bentuk bermain peran (*role-playing*). (Fay)-g

Gedung Pusat UGM, Bersejarah

YOGYA (KR) - Gedung Pusat UGM kini berumur 62 tahun, sejak diresmikan pada 19 Desember 1959 oleh Presiden Ir Soekarno. Bangunan tiga lantai di kompleks Bulaksumur ini menandai berdirinya perguruan tinggi pertama yang berhasil dibangun pemerintah RI pasca kemerdekaan. Kini, gedung tersebut masih berdiri megah, bahkan terlihat kokoh.

Tapi siapakah arsitek yang membangun gedung pusat UGM ini? Seorang putra bangsa GPH Hadinegoro, kelahiran Surakarta yang menetap di Paksalaman Yogya. Pria yang berhasil meraih gelar insinyur di Technische Hoge School Delf, Belanda ini diminta langsung Soekarno membangun gedung pusat UGM.

"Soekarno memperkenalkan Hadinegoro sebagai arsitek gedung pusat saat upacara peresmian gedung dan memperkenalkan Hadinegoro untuk berdiri disaksikan para tamu asing dan duta besar yang hadir," kata pemerhati kesejarahan UGM Prof Dr dr Sutarya SpA(K) dalam 'Sarasehan 122 Tahun Prof Sardjito: Perjuangan Membangun Gedung Pusat UGM' Balai Senat UGM, Sabtu (13/8).

Menurut Prof Sutarya, pertimbangan dipilihnya Hadinegoro dilakukan pada waktu Bung Karno mengambil keputusan RI perlu memiliki universitas yang disambut Sri Sultan HB IX dengan memberikan tanah milikinya di Bulaksumur, sehingga GPH Hadinegoro ditunjuk Bung Karno sebagai arsitekmya. Bung Karno dan Hadinegoro selalu diskusi dengan bahasa Belanda tentang konsep arsitektur gedung ini.

Arsitek UGM Ir Ismudiante MS mengatakan, karakter konstruksi gedung pusat sebagai bangunan modern awal yang ada di Indonesia pada waktu itu, sehingga bangunan ini patut dijaga dan dipelihara sebagai bangunan bersejarah. (Asp)-g

STTL Kembangkan Riset Budidaya Jarak Kepyar

YOGYA (KR) - Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Yayasan Lingkungan Hidup (STTL YLH) Yogyakarta menggandeng sejumlah mitra, untuk mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan berupa riset budidaya tanaman jarak kepyar di areal penelitian (*field research*) STTL Yogya di kawasan Hutan Bunder Gunungkidul, dengan dukungan Dishutbun DIY.

Penandatanganan kerja sama dilakukan Ketua STTL YLH Yogya, Prof Dr Chafid Fandeli dengan mitra kerja PT Global Agro Tangguh (GAT), PT Tourista, PT Kimia Farma dan dr Sudarman untuk pengembangan studi kesehatan, Jumat (12/8), di Kepatihan Yogya. Acara ini disaksikan Ketua Dewan Pembina YLH Paku Alam IX yang juga Wakil Gubernur DIY.

Menurut Chafid Fandeli, dengan kerja sama ini diharapkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bisa lebih luas lagi. "Kerja sama ini menyangkut bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang terkait aspek lingkungan, kebutuhan, kesehatan dan ekonomi. Karena manfaat penelitian ini diharapkan juga bisa memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat," kata Chafid.

Di Petak 15 Hutan Bunder dengan areal 45 Ha ini, akan dikembangkan tanaman tinggi dan rendah dengan sistem *agro forestry*. Tanaman tinggi antara lain jati dan sejumlah tanaman langka dari berbagai daerah. Sedangkan tanaman rendahnya berupa jarak kepyar untuk pengembangan varietas unggul, pemanfaatan bioenergi, obat-obatan, kosmetika dan sebagainya.

Direktur PT Global Agro Tangguh Almuh Khurniawan menambahkan, kerja sama ini didukung PT Kimia Farma Tbk Semarang, YLH Yogya, serta Dishutbun DIY. Di kawasan seluas 45 Ha ini dikembangkan riset dan pengembangan varietas unggul jarak kepyar. (San)-o

KKN UIN Tak Sebatas Dakwah

YOGYA (KR) - Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lebih ditekankan pada pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, KKN mahasiswa UIN tidak sebatas hanya dakwah dalam bentuk ceramah agama.

Penegasan itu dikemukakan Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof Dr Musa Asy'arie saat mengunjungi pelaksanaan KKN UIN di Dusun Wonototo Desa Tukuno Kecamatan Sentolo Kulonprogo, kemarin. Di lokasi KKN Rektor didampingi Kepala Desa Tukuno melihat-lihat dari dekat program kerja yang sedang di laksanakan peserta KKN. Program KKN UIN yang sudah dilaksanakan antara lain perbaikan jalan desa, plangisasi, perbaikan saluran air, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dengan mengadakan pelatihan *home industry*, penyantunan kaum duafa dan anak-anak yatim piatu di panti asuhan setempat.

Prof Musa berharap mahasiswa peserta KKN banyak belajar dan menyelami kehidupan sosial ekonomi dan keagamaan masyarakat desa, sehingga bisa menggali dan mengembangkan potensi masyarakat dan sumber daya alam desa setempat. Tentunya kehidupan keagamaan dan spiritualitas masyarakat desa setempat juga selayaknya bisa tergali. (Asa)-o

Gambar 2. Contoh Tulisan Berjenis "Berita/*News*"

Pendidikan Indonesia Masih Sebatas Retorika

- *Selasa, 13 Februari 2018 / 15:28 WIB*

Editor : Tomi sudjatmiko

Istimewa

YOGYA, KRJOGJA.com -Peristiwa kekerasan, seperti penganiayaan guru yang dilakukan oleh siswa, orang tua, atau sebaliknya sungguh sangat memprihantinkan. Artinya, jika mau mengritisi apa yang terjadi di dunia pendidikan, sudah saatnya sistem pendidikan ditinjau kembali.

Praktisi Pendidikan Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) Dr Hermayawati MPd menilai, peristiwa sebagaimana kekerasan dalam bidang pendidikan yang terjadi di Sampang Madura, baru-baru ini, hanyalah sebagian kecil yang ‘tercium’ media massa dari sekian banyak fenomena kekerasan yang terjadi sebenarnya.

"Harus diakui selama ini pendidikan di Indonesia baru sebatas retorika teoritis dalam mengamalkan empat pilar pendidikan, sebagaimana diamanatkan oleh UNESCO atau United Nations Educational Scientific and Cultural Organization," ungkap Hermayawati, Selasa (13/02/2018).

UNESCO yaitu cabang organisasi internasional PBB atau Perserikatan Bangsa Bangsa yang mengatur bidang pendidikan, keilmuan, budaya dan komunikasi. Empat pilar tersebut adalah 'learning to know, learning todo, learning to be, serta learning to live together'. (R-3)

Gambar 3. Contoh Tulisan Berjenis “Berita/*News*”

(http://krjogja.com/web/news/read/57776/Pendidikan_Indonesia_Masih_Sebatas_Retorika)

B. Ulasan (*Review*)

Telah disebutkan di muka bahwa karya tulis mass media berjenis "Ulasan /*Review*" merupakan karya penulis yang memuat suatu penilaian tentang baik dan buruk-nya suatu hasil karya tulis yang umumnya dalam bentuk buku. Tujuan intinya adalah untuk memberikan pertimbangan apakah suatu buku yang diulas tersebut layak atau tidak layak untuk dibaca. Klingensmith (2004) menyarankan prosedur penulisan karya jenis *review* seperti berikut.

1. Mulailah tulisan dengan paragraf pengantar dengan mempertimbangkan perihal berikut: (1) menarik perhatian pembaca; (2) mengidentifikasi hal yang akan Anda ulas (misalnya judul buku atau film); (3) mengidentifikasi penulis, bintang, atau sutradara, jika sesuai.
2. Tulis satu paragraf lengkap tentang setiap aspek yang ingin Anda periksa, pastikan setiap paragraf mempertimbangkan hal-hal berikut: (1) dibuka dengan kalimat topik yang menjelaskan tentang pokok permasalahan yang ingin diungkapkan; (2) memuat kalimat yang menyatakan bukti-bukti terkait dengan perihal yang Anda ulas/nilai; (3) menggunakan kutipan atau contoh dari buku atau film, jika mungkin, untuk membantu membuktikan pendapat Anda.
3. Akhiri dengan paragraf kesimpulan yang melakukan hal berikut: (1) secara singkat menyatakan kembali gagasan utama tinjauan; (2) membuat penilaian tentang buku atau film atau apa pun, dengan menyatakan apakah buku, film dan lain-lain yang Anda nilai baik atau buruk (beberapa pengulas memberikan penilaian, seperti menuliskan tanda empat bintang atau dua jempol); (3) merekomendasikan agar pembaca menonton film, membaca buku, atau membeli makanan di restoran yang Anda nilai atau menyarankan pada orang lain untuk tidak menonton film, membaca buku atau pergi ke restoran yang sedang Anda ulas, jika sesuatu yang Anda nilai tidak baik.

Gambar 4 dan Gambar 5 menyajikan dua contoh karya ulasan. Gambar 4 merupakan ulasan tentang salah satu Buku Sasra berjudul "*Losing Joe's Place*". Pada intinya, pengulas menilai bahwa buku tersebut layak dibaca sebagai bahan penghibur pembacanya karena kelucuannya.

Judul Asli : “Losing Joe's Place”
Author : Gordon Korman
Reviewed by : Klingensmith , 2004
Translated by : Hermayawati.

Tidak jarang orang menemukan novel yang aneh dan penuh kejutan tak terduga seperti “Losing Joe's Place”, buku karya Gordon Korman. Novel ini mengisahkan tentang Jason Cardone dan teman-temannya Ferguson "Peach" Peach dan Don "Mr. Wonderful" Champion. Dikisahkan bahwa mereka menghabiskan waktu musim panas mereka di kota besar Toronto dengan menyewakan apartemen lajang yang benar-benar keren milik saudara Jason yang bernama Joe. Joe, si pemilik apartemen menginstruksikan kepada ketiga remaja tersebut (Jason, Ferguson dan Don) agar mengingat prinsip: “Jangan Terlalu! Kisah ini menunjukkan betapa sulitnya mengikuti instruksi yang terkesan sederhana ini.

Satu hal hebat tentang buku ini adalah cara Korman mengembangkan karakternya. Setiap orang memiliki kepribadian yang pasti. The Peach adalah seorang teknisi jenius yang perlu meningkatkan semua yang dilihatnya. Sikapnya yang merasa "lebih baik dari Anda" cenderung membuat semua orang gelisah. Jason, salah satu pemeran utama, tampaknya alergi untuk bekerja, sementara teman sekamarnya menghabiskan musim panas dengan bekerja keras di berbagai pekerjaan, Jason memilih untuk menghindari berbagai pekerjaan tersebut dengan berbagai dalih.

Selain Plotrick, karakter lain yang paling aneh diceritakan dalam buku ini adalah Rootbeer Racinette. Ia adalah raksasa berjenggot yang mampu bertahan digilas perutnya dengan tekanan sekeras apapun. Rootbeer menghabiskan musim panas dengan ketiga anak lelaki tersebut, bergantian membawa anak-anak itu keluar-masuk masalah yang seringkali mereka hadapi, termasuk dalam mengikuti hobi aneh mereka masing-masing.

Hal menarik lainnya tentang buku ini adalah plotnya. Sama seperti dugaan pembaca, bahwa ketiga anak tersebut akhirnya akan menyelesaikan masalah mereka dan mengalami musim panas yang hebat, masalah lain muncul yang harus mereka pecahkan, atau mereka harus kembali ke rumah ke Owen Sound sebagai kegagalan total yang diharapkan orang tua mereka. Mereka kehabisan uang lebih dari satu kali; mereka memperebutkan cinta seorang gadis yang mereka temui di Toronto, dan mereka akhirnya menjadi raja restoran rahasia di kota itu, semua karena kenangan cokelat. Setiap kali Anda berpikir bahwa hal-hal tidak bisa menjadi lebih buruk, mereka bisa, dan seluruh buku dibangun menuju akhir yang Anda harapkan tidak bisa terjadi ...

“*Losing Joe's Place*” adalah buku hebat bagi pembaca yang suka melihat orang lain memiliki banyak masalah yang lucu-lucu. Ceritanya lucu dan menghibur sehingga mampu membuat Anda untuk terus menyimak ceritanya, dengan karakter-karakternya yang aneh dan cukup menarik untuk membuat Anda ingin tahu lebih banyak tentang apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya. Dari empat bintang, saya akan memberikan buku ini setidaknya tiga setengah bintang. ****

Gambar 4. Contoh Karya Tulis Populer Berjenis “Ulasan/*Review*”
Sumber: http://www.saidsimple.com/content/100887/

Workshop Perubahan Besar Kurikulum 2013 Oleh Dr Hermayawati

Posted by : humasUMBY, 22 Januari 2018

Pemerintah melakukan perbaikan sistem pembelajaran dengan memperbarui kurikulum. Namun kurikulum sebaik apapun tidak akan mampu mencerdaskan anak bangsa jika seorang pendidik tidak memiliki kompetensi yang tepat.

Kurikulum 2013 membawa empat perubahan besar terkait konsep kurikulum, buku yang dipakai, proses pembelajaran, dan proses penilaian. Empat perubahan besar ini dimaksudkan untuk mendorong anak didik dan guru selalu berpikir produktif, kreatif, dan inovatif.

Untuk itulah dalam rangka membantu guru dalam mengembangkan dan membuat perangkat pembelajaran yang kreatif. MTs Ma'arif 2 Muntilan menggelar Workshop Perancangan Administrasi Pendidikan untuk membantu para guru dengan menghadirkan pakar dunia pendidikan yaitu Dr. Dra. Hermayawati,S.Pd.,M.Pd, dosen fakultas Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY). Dijelaskan Guru dituntut menjadi seorang pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Karena itu menjadi seorang guru kini bukanlah pekerjaan mudah. Guru harus bisa berperan aktif dalam membantu membentuk karakter seorang anak, selain orang tua dan keluarga.

Peran guru yang penting membuat seorang guru dituntut untuk membuat suasana belajar mengajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan, sehingga peserta didik merasa nyaman dan cepat menyerap pelajaran.

Setiap guru harus bisa menemukan caranya sendiri untuk menarik minat belajar siswa secara kreatif dan inovatif. Proses belajar tidak boleh menyeramkan namun sebaliknya harus menyenangkan dan membuat nyaman."Tenaga pengajar dituntut untuk mengembangkan secara efektif & efisien dalam Kurikulum 2013 revisi 2017 ini sesuai dengan pengembangan pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi," kata Dosen yang juga Pengabdi Senior LPPM UMBY.

Dr. Dra. Hermayawati menilai kegiatan seperti ini akan bisa memacu motivasi guru di sekolah Ma'arif untuk mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai kurikulum yang ada dengan penilaian secara faktual, konseptual, prosedural dan metakognisi.

Kepala MTs Ma'arif 2 Muntilan mengatakan kegiatan ini sebagai pembekalan dan pelatihan bagi tenaga pengajar dalam menghadapi kurikulum 2013. Diharapkan guru akan terbantu dalam membuat perangkat pembelajaran, utamanya pembuatan Silabus dan RPP.

Ada 20 guru mata pelajaran dan dua 2 guru BK dari tenaga pengajar MTs Ma'arif 2 Muntilan yang mengikuti workshop ini. "Ini sekaligus juga sebagai persiapan akreditasi sekolah kami pada bulan Maret mendatang," tuturnya.

Sementara itu,Pengawas Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Magelang Dra Hj Siti Zumrotul Mutmainah M.Si menilai workshop ini sangat bagus untuk menunjang keperluan bagi para guru untuk berfikir kreatif dalam mengembangkan dan membuat perangkat pembelajaran.

Gambar 5. Ulasan menyangkut laporan atau berita kegiatan *Workshop* Pengembangan Administrasi Guru yang diselenggarakan oleh salah satu MTs Ma'arif di Salaman, Kabupaten Magelang **(**Sumber: http://mercubuana-yogya.ac.id/ berita-6340-workshop--perubahan-besar-kurikulum-2013-oleh--dr-hermayawati)

Gambar 5 menampilkan karya ulasan yang ditulis oleh insan administrasi Humas Perguruan Tinggi. Tulisan dimulai dari berita yang diambil dari salah sebuah Koran yang memuat Berita tentang perhelatan atau acara Temukerja (*Workshop*) yang diselenggarakan salah satu MTs (Madrasah Tsanawiyah) di Salaman, Magelang. Dalam hal ini, penulis atau pengulas memberikan penilaian tentang pertemuan tersebut secara positif untuk mendorong pembaca atau sekolah lain agar ikut serta menyelenggarakan temukarya sejenis.

C. Opini (*Op-eds*)

Telah dipaparkan di muka bahwa karya berjenis "Opini (*Opposite-Editorials*)" merupakan karya yang ditulis oleh penulis yang bukan staf tetap sebuah mass-media, yang dalam hal ini adalah surat kabar. Isi tulisannya menyangkut pendapat penulis tentang suatu fenomena yang terjadi di masyarakat atau kebijakan pemerintah yang sekiranya menjadi sorotan publik. Penulis biasanya memberikan berbagai masukan atau pendapat normatif agar fenomena atau permasalahan yang sedang atau telah terjadi dapat terselesaikan dengan baik.

KAMIS KLIWON 13 NOVEMBER 2008 (15 DULKANGIDAH 1941) OPINI "KEDAULATAN RAKYAT" HALAMAN 15

Menyoal RPJP DIY 2005-2025

Hermayawati

PADA hari Sabtu, 8 November 2008 pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan pertemuan dengar pendapat masyarakat (*Public Hearing*) di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Gedung DPRD DIY. Rapat dihadiri oleh perwakilan lembaga eksekutif, legislatif, dan berbagai elemen masyarakat, termasuk dari kalangan akademik dan disiarkan langsung oleh RRI Yogyakarta. Rapat mendiskusikan mengenai ketepatan visi, misi, dan teknis pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) DIY untuk jangka waktu 2005-2025.

Sesuai dengan *trade-mark* DIY sebagai Kota Pendidikan, Budaya, dan Pariwisata, visi RPJP 2005-2025, yaitu: iDIY sebagai salah satu pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia-Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera!. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah akan menempuh empat misi, yaitu mewujudkan: pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel, yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang andal; budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan; kepariwisataan yang kreatif dan inovatif; serta sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Jika dicermati, agenda visi dan misi di atas bukan hanya sesuai dengan ciri khas DIY, melainkan juga berusaha mendasari pembangunan dengan akar permasalahan yang memang diperlukan oleh masyarakat DIY. Penyelenggaraan acara tersebut sudah tepat, sehingga layak didukung oleh berbagai pihak, melalui kontribusi pemikiran yang benar-benar mendukung ketercapaian cita-cita yang mulia itu. Namun demikian, harus diakui bahwa untuk mewujudkan cita-cita itu diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah dan lembaga-lembaga terkait melalui sumber daya yang ada untuk mensinergikan kepentingan bersama agar hasil pembangunan benar-benar mencapai sasaran dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Harus diakui bahwa pencapaian suatu visi tidak sesederhana merangkaikan kata-katanya. Kegagalan suatu tujuan, target, atau pun visi dalam berbagai aspek (termasuk pendidikan dan pembangunan) disebabkan oleh ketidaksesuaian antara rumusan tujuan, target, atau visi dan kebutuhan yang sesungguhnya. Sebagai contoh, banyak hasil penelitian pendidikan dan pelatihan, baik pada level dasar, menengah, atau pun pendidikan tinggi membuktikan adanya ketidaksesuaian antara produk pendidikan atau pun pelatihan dan kebutuhan target (Baca: pasar kerja). Alhasil, produknya tidak berterima karena kurang kompetitif, baik di dalam maupun di luar negeri. Kenyataan ini membuktikan bahwa program pendidikan dan latihan belum direncanakan secara sungguh-sungguh, yaitu melalui mekanisme perencanaan yang matang dan terarah.

Demikian pula halnya, dalam bidang kebudayaan dan kepariwisataan DIY yang pada hemat penulis belum 'berdaya jual' secara optimal, terutama di mancanegara. Buktinya, wisatawan mancanegara yang datang ke DIY telah jauh berkurang dibandingkan dua atau tiga dekade yang lalu. Hal ini merupakan tantangan DIY ke depan.

Penyusunan RPJP DIY seyogianya dilakukan dengan urutan sebagai berikut. *Pertama*, observasi data untuk mengidentifikasi permasalahan krusial yang terjadi di lingkup program yang akan dicanangkan. Misalnya, mengumpulkan data mutakhir mengenai fenomena kualitas hasil pendidikan dan pelatihan di berbagai bidang dan tataran pendidikan, fenomena kebudayaan, dan modal dasar kepariwisataan yang ada di setiap kota atau kabupaten untuk dianalisis dan hasilnya dijadikan sebagai basis untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Observasi data dilakukan paling tidak pada setiap tahapan pembangunan.

> **RPJP perlu diarahkan pada persiapan menyongsong era *Asia-Pacific Economic Corporation* (APEC), yaitu kerja sama dalam bidang ekonomi antarnegara di Asia-Pasifik yang akan dimulai pada tahun 2020. Siapkah kita?**

Kedua, mengidentifikasi kebutuhan program yang merupakan hasil analisis terhadap data faktual yang diperoleh. Data faktual menyangkut kebutuhan daerah disinergikan dengan kebutuhan pengguna, yang selanjutnya menjadi basis perumusan tujuan, baik secara umum (tujuan RPJP) maupun secara spesifik untuk tujuan rencana Pembangunan jangka khusus (RPJK). Pada prinsipnya, kebutuhan Kota/Kabupaten atau pun Propinsi DIY adalah sama, yaitu memiliki 'daya jual' dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan kepariwisataan yang kompetitif terhadap bangsa-bangsa lain di Asia-Tenggara.

Ketiga, perumusan tujuan, visi, dan misi program berlandaskan pada data kebutuhan faktual yang ada. RPJP (sementara) DIY bertujuan: "untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Seluruh upaya dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan yang bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak" (RPJP DIY halaman 7). Tujuan tersebut di atas bendaknya dijabarkan secara operasional, terutama pada tahap lima tahunan (RPJK)-nya, untuk mempertegas arah pembangunan. Perumusannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing komponen pembangunan yang sinergis dengan kebutuhan propinsi.

Keempat, rencana implementasi program. Bagian ini menjelaskan langkah-langkah program secara partial yang akan diambil dalam rangka melaksanakan misi pembangunan pada masing-masing aspek atau bidang garapan, baik di dalam RPJP maupun RPJK.

Kelima, rencana supervisi pelaksanaan program. Rencana pengawasan ini perlu dikemukakan untuk memberikan gambaran bahwa pelaksanaan program ada di bawah pengawasan, guna menjamin kredibilitas dan akuntabilitasnya. Pengawasan seyogianya dilakukan oleh pakar di bidang masing-masing program dan dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah dan lembaga yang bersangkutan. Misalnya, program peningkatan kualitas pendidikan atau pelatihan diawasi secara kolaboratif oleh lembaga pendidikan dan pemerintah daerah yang menangani bidang sejenis.

Keenam, rencana evaluasi terhadap program yang telah dilakukan. Rencana evaluasi dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan program dan langkah-langkah yang harus diambil dalam menentukan kebijakan baru yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan di setiap aspek.

Pertanyaan yang harus dijawab sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas adalah: apakah RPJP DIY 2005-2025 telah disusun melalui mekanisme di atas? Jika belum, RPJP perlu disusun kembali sesuai dengan mekanisme sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu, RPJP juga perlu diarahkan pada persiapan menyongsong era *Asia-Pacific Economic Corporation* (APEC), yaitu kerja sama dalam bidang ekonomi antarnegara di Asia-Pasifik yang akan dimulai pada tahun 2020. Siapkah kita? Jawaban pertanyaan itu tentu tergantung pada kemauan dan tekad kita bersama. Semoga! ❑ (4835-2008)

**) Dr Hermayawati MPd, adalah Dosen Kopertis Wil.V dpk pada UMBY juga staf pengajar Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Pikiran Pembaca

Naskah disertai fotocopi identitas diri dan nomor telepon • isi tanggung jawab penulis

Keamanan Wisata di Kawasan Terumbu Karang Gunungkidul

KAWASAN wisata pesisir Gunungkidul yang terbentang mulai dari Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Slili dan Sundak memiliki keistimewaan tersendiri. Jika sudah masuk dalam kawasan tersebut hanya berkunjung ke 2 atau 3 lokasi saja sangatlah disayangkan. Hampir di semua lokasi wisata tersebut memiliki taman laut dengan daya tarik wisatawan cukup tinggi. Pintu masuk ke kawasan wisata sudah terkoordinasi dengan baik, retribusi dibayarkan lewat satu pintu saja.

Akan tetapi tim keamanan pantai dan rambu-rambu yang mengingatkan akan bahaya masuk dalam area terumbu karang hanya ada di beberapa lokasi saja, sehingga apabila pengunjung ada yang mengalami kecelakaan di laut akan kesulitan dalam memperoleh pertolongan. Oleh karena itu dinas dan instansi terkait dirasa perlu memberikan fasilitas tim medis yang lengkap dengan, peralatan komunikasi dan transportasi, apabila lokasi wisata jauh dari kota dan harus melewati jalan yang penuh tikungan tajam. Semoga dengan ditulisnya Pikiran Pembaca ini dapat direspons oleh Pemda setempat, sehingga kunjungan wisatawan semakin ramai dan perekonomian masyarakat pesisir mengalami peningkatan. ❑ (6904-2008)

Atmanto WD, Jl Tengiri J 107 Nogotirto V, RT 005 RW 035, Gamping, Sleman.

Pemuda Pelopor Nasional, Kado Sumpah Pemuda

SETELAH berhasil membawa karangtruna Ngupasan "CWM" menjadi juara nasional, untuk sekian kalinya rekan pemudi kita Martanti Endah Lestari SSos, meraih juara I Pemuda Pelopor Nasional 2008 bidang pendidikan. Sungguh prestasi yang luar biasa dan merupakan kado istimewa bertepatan dengan Peringatan Sumpah Pemuda ke-80.

Memang karyanya nyata perlu kita lakukan dan amalkan, untuk memenuhi kriteria pemuda sebagai agen perubahan (Agent of Change) dan Agen Kontrol Sosial (Agent of Control) Bukan sekadar membuat organisasi/diskusi-diskusi/penggunaan panji kelompok secara sempit. Kebetulan saya mengetahui sosok pemudi ini, yang gigih mengabdikan dirinya untuk kegiatan sosial berkonsentrasi pada pendidikan serta pemenuhan hak-hak ibu dan anak, maka ke depannya semoga ini memotivasi rekan-rekan pemuda-pemudi lain kota Yogya untuk mulai turut berkarya dan menjadi pemuda pelopor berikutnya. Mari bersama berjuang di bidang masing-masing dengan semangat satu tumpah darah, bangsa, dan bahasa Indonesia.

Tak lupa di hari yang istimewa ini kita mengenang kata-kata founding father "Beri aku sepuluh pemuda, maka akan kugoncangkan dunia, jika ada sembilan pemuda lagi maka Indonesia pasti berubah. ❑ (6945-2008)

Hartanto SE, Taruna Merah Putih Kota, tmpyogya.blogspot.com, Mhs Fak Hk Widya Mataram, Hp 085729480999.

Mohon Kerelaan Mengembalikan Barang Hilang

Assalamu'alaikum Wr Wb

DISAMPAIKAN informasi bahwa tas kerja istri saya berisi Laptop "HP" No Seri = CND - 7351 6D1 dan Flash Disk berisi data-data penting kantor, HP Nokia Tipe N 6233 - No Seri 35-9727009330163, SIM C, KTP, STNK telah hilang di Kantor BPS Propinsi DIY (Jl Lingkar Selatan) pada hari Jumat, 7 November 2008 siang. Dimohon kepada Saudara yang merasa mengambil atau menemukan/mengetahui keberadaan barang tersebut, agar menghubungi saya. Kami sangat membutuhkan data-data penting dimaksud berikut surat-surat lainnya. Atas kesediaan saudara membantu kami, sebelumnya diucapkan banyak terima kasih, disediakan imbalan. ❑ (7032-2008)

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Djoko M, HP 02747025181, Tundan, Warak Lor RT 02 RW 06, Sumberadi, Mlati, Sleman, DIY.

Hati-hati Penipuan Kupon Undian Berhadiah

SAYA menghimbau kepada PT Wing So Klin agar lebih berhati-hati dan waspada, karena nama baik dan citra PT Wing telah disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kemarin ada kemasan So Klin yang di dalamnya ada kupon Undian berhadiah Kijang Inova, anehnya kok bisa tanda tangan Kapolda dan Notaris disertakan di dalamnya, bahkan nomor teleponnya juga ada.

Setelah di cek ternyata nomor teleponnya berada di Jakarta, padahal PT Wing kan berada di Surabaya. Setelah di telepon orang itu minta kiriman uang 3 juta dan nomor rekening Bank, untunglah yang kena tipu itu orangnya pintar bukan orang bodoh, di cek terus ternyata orang itu hanya menipu, siapa yang mau percaya, ma-sak uang segitu kok cuma dikasihkan bersama rekening Bank, itu namanya enggak masuk akal.

Saya mengharap PT Wing harus lebih waspada dan berhati-hati, karena kalau dibiarkan modus semacam itu akan merusak nama baik citra PT Wing. Maka bagi teman-teman semua janganlah percaya kepada kupon undian berhadiah apapun di dalam setiap kemasan, itu tipuan! ❑ (6946-2008)

Mujinah AHS, Patalan, Pajangjiwo, Jetis, Bantul, DIY, 55781.

Gambar 6. Contoh Publikasi Kategori 'Opini'

SENIN KLIWON, 6 FEBRUARI 2017
(7 JUMADILAWAL 1950)

OPINI

"KEDAULATAN RAKYAT"
HALAMAN 11

TAJUK RENCANA

Nama-nama Besar Kasus Proyek E-KTP

TERKESAN ekspresif, pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo terkait kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Ia mengatakan, "Anda mungkin nanti akan sangat terkejut karena banyak orang yang namanya disebut dalam kasus ini. Tunggu saja," katanya seperti dikutip harian ini, Sabtu (4/3).

Dalam pernyataannya usai bertandang ke Kantor Staf Presiden, Jumat (3/3), Ketua KPK berharap penyebutan nama-nama itu tidak sampai berdampak pada konstelasi politik di negeri ini. Tidak sampai terjadi goncangan yang besar.

Publik pun menunggu dengan rasa penasaran. Siapa saja nama-nama yang terkait atau bahkan terlibat dalam kasus megakorupsi yang disebut-sebut merugikan keuangan negara triliunan rupiah itu. Jawabannya baru akan diketahui ketika Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan pada sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Kamis (9/3). Sidang akan menghadirkan dua tersangka, Sugiharto dan Irman, mantan pejabat tinggi Kemdagri.

Sejauh ini sudah beredar sejumlah nama yang diduga menerima aliran dana korupsi proyek e-KTP itu. Di antara mereka adalah ketua-ketua fraksi saat proyek dalam n di DPR RI. Terdapat nama mantan pejabat rintah serta pengusaha adi rekanan proyek. ama sudah menyerahkan yang diterimanya, ilasinya mencapai rarupiah.

sumsi, nama-nama dirupakan tokoh-tokoh atau yang kini masih okoh-tokoh yang memiuh dalam konstelasi dam negeri bila dikaitn pernyataan Ketua berharap tidak sampai angan politik yang bebisa jadi nama-nama mereka bukan sekadar disebut dalam berkas perkara. Tetapi juga akan dihadirkan sebagai saksi, yang pada giliran selanjutnya berkemungkinan disebut oleh majelis hakim dalam vonis terhadap kedua terdakwa kelak.

Masyarakat dengan penuh antusias akan mengikuti proses pengadilan kasus megakorupsi proyek e-KTP ini. Proyek yang diduga besaran anggarannya digelembungkan serta diskenariokan siapa dan pihak mana pemenang tendernya. Hasil penggelembungan atau *mark up* itulah yang diduga menjadi 'bancakan' banyak pihak dan nama. Mulai dari mereka yang terlibat dalam proses pembahasan di legislatif, pejabat pembuat dan penanggung jawab komitmen, hingga para pelaksana proyek.

Megaproyek e-KTP bukan hanya menghadirkan kasus megakorupsi yang melibatkan sejumlah nama dan tokoh (besar). Namun juga menimbulkan carut marut administrasi kependudukan, karena masih terdapat jutaan warga masyarakat yang belum mendapatkannya. Akibatnya mereka mengalami kendala ketika berurusan dengan administrasi birokrasi. Atau malah kehilangan hak politiknya pada peristiwa politik bernama pilkada, pileg maupun pilpres.

Mari kita kawal dengan mencermati dan mengawasi proses peradilan megaproyek e-KTP ini. Kita apresiasi ketekunan KPK dalam menyelidiki kemudian menyidik kasus yang melibatkan sejumlah nama (besar) dan ratusan saksi. Kita berharap tidak siapa pun dan kekuatan politik mana pun berusaha mengintervensinya secara langsung maupun tidak langsung, sehingga proses peradilannya menjadi tuntas.

Tegasnya, jangan sampai terhenti di tengah jalan. Tergerus oleh kepentingan politik sehingga bernasib sama seperti kasus megakorupsi Bank Century. ❑ • e

Raja Salman dan Penyelesaian Masalah TKI

Hermayawati

DI TENGAH kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud ke Indonesia, yang perlu diperhatikan terutama adalah kesepakatan kerja sama di berbagai bidang dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Saudi Arabia, termasuk permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI). Apalagi, sejak beberapa tahun belakangan masalah TKI mengalami pasang surut kebijakan menyangkut moratorium program yang telah meningkatkan devisa negara yang konon mencapai Rp 144 triliun pertahun. Mengingat tersendatnya pelaksanaan program TKI khususnya ke Arab Saudi secara legal selama ini, telah memicu keberangkatan para pencari kerja secara ilegal.

Benarkah kedatangan Raja Salman membawa angin segar bagi kerja sama perekonomian, pendidikan, termasuk pengiriman TKI yang diharapkan akan lebih baik pengaturannya? Baik menyangkut penggajian, perlindungan atau jaminan keselamatannya selama bekerja hingga kepulangannya ke tanah air. Kenyataannya, penghentian program TKI ke negara-negara Timur Tengah termasuk ke Arab Saudi tidak mengurangi keinginan para pencari kerja untuk menempuh jalur ilegal.

Visa Wisata

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja tahun lalu menegaskan kembali adanya moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke-21 negara Timur Tengah. Hal itu disampaikan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri sehubungan dengan eksekusi mati terhadap dua TKI Indonesia di Arab Saudi, Siti Zainab dan Karni Tarsim, pada bulan April 2015 tahun, hampir dua tahun yang lalu.

Namun organisasi eMigrant Carei, sebagaimana diberitakan Thomson Reuters Foundation mencatat bahwa pada bulan Maret 2015 dan Mei 2016, ternyata masih ada ratusan pencari kerja terutama perempuan yang berangkat ke Timur Tengah. Beberapa media elektronik lain juga menyebutkan bahwa mereka berangkat ke berbagai negara di Timur Tengah dengan menggunakan visa wisata. Jika benar adanya, artinya kebijakan moratorium tidak efektif untuk menyurutkan niat para pencari kerja.

Hemat penulis, daripada terjadi banyak pelanggaran yang dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan yang lebih besar dikarenakan tidak adanya perlindungan, pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja seyogyanya mendukung niat para pekerja yang kebanyakan berpendidikan rendah itu, dengan mencabut kebijakan moratorium TKI tersebut. Tentu saja hal tersebut mestinya dibarengi dengan upaya menjalin kesepakatan terkait dengan kepentingan tersebut secara *Government to Government, (G to G)*. Yaitu menyangkut penggajian terstandar, kesehatan, keselamatan juga perlindungan hukum selama bekerja. Bukankah TKI-TKW sudah menunjukkan bukti ikut membangun negara dengan keringat bahkan darah mereka? Hasil kerja mereka berupa remitansi telah menyumbang devisa ratusan triliun pertahun.

Ilustrasi : Arko

Berpendidikan Rendah

Kehadiran Raja Salman, serta gagasan DPR RI sudah seharusnya disikapi secara cerdas. Program TKI sebenarnya sudah dipikirkan pemimpin negeri ini dalam rangka memecahkan permasalahan pengangguran. Sementara itu, hanya Timur Tengah yang mau menerima tenaga kerja berpendidikan rendah, selain Singapura dan Malaysia. Moratorium TKI bukan penyelesaian masalah, justru dapat memicu permasalahan yang lebih kompleks, yaitu semakin meningkatnya angka pengangguran yang dampaknya dapat meningkatkan angka kriminalitas. Jika kebijakan moratorium disebabkan karena adanya pelecehan dan kekerasan, apakah bekerja di dalam negeri juga menjamin para pekerja di sektor domestik terhindar dari masalah yang sama? Selama di dalam negeri belum tersedia lapangan pekerjaan secara mencukupi, permasalahan TKI ilegal pasti akan terus terjadi.

Jadi, gagasan DPR RI untuk menjalin kesepakatan menyangkut program pengiriman TKI dengan Raja Salman hemat saya, perlu didukung dan diupayakan lebih serius. Sebelum nasib rakyat terutama kelompok marginal di negeri ini semakin terpuruk yang dikhawatirkan dapat memicu mereka menempuh pekerjaan yang lebih berisiko, misalnya menjadi kurir narkoba atau seperti Aisyah yang ditergodai uang 100 US Dolar namun mempertaruhkan nyawa.

Permasalahan TKI dapat diatur melalui kesepakatan tertulis antarnegara penyedia dan pengguna pekerja yang bersangkutan (G to G), dengan berpijak pada aturan kerja atau hukum perburuhan *(labour law)*. Terutama yang menjamin hak hukum dan sosial pekerja melalui kontrak kerja sebagaimana telah diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. ❑ • e

**) Dr Hermayawati MPd Penulis adalah Dosen Kopertis Wilayah V, Dp. Mercu*

Maksimum 600 Kata

PARA pengirim naskah Opini KR harap membatasi panjang naskah maksimum 4.000 karakter atau setara sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat, copy identitas dan nomor telepon. Naskah harap dikirim ke alamat email opinikr@gmail.com

Surat Suara Tidak Sah Menuju Sengketa

Agus Triyatno

BARANGKALI pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, tidak akan segan dempita hingga ke

dan rendahnya pemahaman regulasi bagi penyelenggara pemilu. Boleh jadi suara tidak sah yang cukup signifikan dibanding Pilpres

Gambar 7. Contoh Publikasi Kategori 'Opini'

Gambar 3 dan Gambar 4 menampilkan contoh karya jenis "Opini (*Opposite-Editorials*)". Gambar 3 merupakan contoh karya penulis menyangkut RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025. Dalam hal ini, penulis mengkritisi perancangan RPJP tersebut yang didasarkan pada data yang ada dari pemerintah kecamatan dan bukan didasarkan dari survei langsung dari masyarakat sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan bias kebijakan. Muatan "Opini" penulis tersebut ditulis setelah mendengarkan rancangan RPJP (dalam forum *Public Hearing*) yang disampaikan Pemerintah Provinsi melalui Bappeda DIY di DPRD Provinsi.

Gambar 4 merupakan contoh publikasi di Surat Kabar tentang kunjungan Raja Salman ke Indonesia pada bulan Februari tahun 2017 dan memunculkan berbagai tanggapan baik positif maupun negatif terutama berkaitan dengan permasalahan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Arab Saudi. Dalam hal ini penulis mengusulkan beberapa menyangkut penyelesaian masalah TKI menurut hasil pemikiran penulis yang didukung oleh berbagai referensi, fakta serta logika dalam upaya penyelesaian permasalahan TKI yang pada umumnya adalah pekerja wanita yang mencari nafkah di sektor domestik atau urusan rumah tangga khususnya di Arab Saudi.

D. Analisis (Analysis)

Artikel dengan jenis "Analisis" merupakan jenis yang paling sulit namun paling bergengsi karena biasanya artikel ini diletakkan pada halaman utama surat kabar. Jenis artikel ini ditulis oleh *freelancer*, bukan ditulis oleh jurnalis atau wartawan staf media massa. Muatannya terutama berkaitan dengan kejadian aktual, pernyataan pejabat atau orang terkenal, serta berbagai fenomena yang sedang berkembang di masyarakat dan menjadi perbincangan hangat. Jumlah kata untuk artikel jenis ini biasanya sekitar 600 sampai dengan 800 kata. Jumlah kata dapat diketahui jika kita menggunakan laptop dapat dilihat pada bagian *words count* atau secara otomatis terlihat pada bagian bawah layar laptop.

Sebagai pendahuluan, artikel ini hendaknya dimulai dengan penggambaran keadaan aktual terkini yang sedang menjadi perbincangan, secara detil. Selanjutnya permasalahan tersebut dielaborasi dengan menjelaskan apa (*What*), siapa (*Who*), mengapa (*Why*) dan bagaimana (*How*). Artinya, penulis hendaknya secara detil menjelaskan apa permasalahannya, siapa (yang bermasalah atau siapa aktor pelaku

masalah), mengapa (permasalahan tersebut terjadi) dan bagaimana (solusinya). Dalam hal ini penulis menjelaskan semua aspek tersebut di atas secara rinci, normatif (berbasis keilmuan atau referensi yang relevan) dan berdasarkan hasil pemikiran kritis penulis. Oleh karena itu, penulis artikel “Analisis” pada umumnya adalah para pakar di bidang terkait. Berikut ini disajikan berbagai contoh karya “Analisis” yang dapat digunakan sebagai ilustrasi, bahan perbandingan, sekaligus refernsi yang mungkin diperlukan.

Sabtu Legi
23 April 2011
19 Jumadilawal 1944
Tahun LXVI No. 201

Analisis

Budaya Dongkrak Nilai

Dr Hermayawati MPd

UJIAN Nasional (UN) sekolah menengah sedang berlangsung dan telah dimulai sejak Senin 18 April lalu. Ada yang sangat menarik menyangkut pelaksanaan UN setiap tahun. Ada isu upaya sekolah dan para peserta ujian dalam mempersiapkan diri agar sukses UN. Di antaranya, membeli soal-soal yang ditengarai sebagai 'bocoran' dan konon banyak beredar di sekitar lokasi ujian. Ada lagi permasalahan yang sangat memprihatinkan, yaitu perihal 'pendongkrakan nilai'. Wacana ini sempat dikhawatirkan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh (*KR On Line, 08/04/2011 12:38:34*). Mendiknas menegaskan bahwa sekolah dilarang mendongkrak nilai UN demi kelulusan siswanya. Bagi sekolah yang melanggar akan dikenai sanksi dan akan melibatkan kepolisian. Bila perbedaan keduanya sangat tinggi atau nilai ujian sekolah di atas rata-rata nilai UN, maka hasil tersebut akan dipertanyakan.

* Bersambung hal 7 kol 3

Budaya ..... Sambungan hal 1

Pendongkrakan nilai oleh sekolah bertujuan 'mulia' yaitu memaksimumkan persentase kelulusan. Diakui atau tidak, mendongkrak nilai seakan sudah menjadi tradisi atau telah membudaya sejak diberlakukannya UN. Sekilas, mendongkrak nilai kelulusan tampaknya wajar-wajar saja dilakukan dan seakan-akan sudah lama menjadi 'rahasia umum'.

Di balik itu semua, jarang terpikirkan oleh warga sekolah bahwa hal itu sama saja dengan melegalkan manipulasi. Manipulasi nilai melalui ranah ujian lain seperti memaksimalkan nilai ujian sekolah (US), ujian tengah semester (UTS), dan ujian formatif hingga mencapai angka tertinggi, sebenarnya disebabkan oleh kekhawatiran sekolah terhadap kegagalan para siswa dalam menempuh UN, yang standar kelulusannya semakin ditingkatkan setiap tahunnya. Jika tujuan UN adalah untuk meningkatkan kualitas lulusan selain untuk kepentingan pemetaan kualitas pendidikan secara nasional, mendongkrak nilai kelulusan semestinya tidak dilakukan. Jika tetap dilakukan, upaya peningkatan kualitas lulusan melalui peningkatan standar rerata nilai UN niscaya tidak akan ada gunanya.

Oleh sebab itu, langkah-langkah antisipatif Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dengan mengintensifkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Perguruan Tinggi (PT) serta memperketat pengamanan soal-soal UN dan mengadakan pengecekan terhadap semua soal dan kunci jawaban yang ternyata tidak cocok (*KR, 7/4/2011*), perlu direspons secara positif.

Manipulasi nilai sebenarnya tidak sesuai dengan semangat Kartini, yang telah berjuang untuk membangun bangsa melalui peran perempuan dengan modal yang ada. Mendongkrak nilai dengan harapan dapat meningkatkan angka kelulusan tidak akan berfaedah jika akhirnya lulusan tidak mendapatkan tempat bekerja, tidak mampu menciptakan pekerjaan, atau pun tidak memiliki posisi tawar untuk berkompetisi di dunia yang semakin kompetitif ini. Semakin banyaknya lulusan (dari hasil pendongkrakan nilai) apa sebenarnya yang diharapkan? Semakin menambah daftar panjang pengangguran yang tentunya akan menambah angka kemiskinan yang justru sedang diupayakan pengentasannya oleh pemerintah saat ini? Jika angka kemiskinan saat ini berkurang, kemungkinan hal itu bukan karena para lulusan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri (alih-alih bagi orang lain) melainkan karena semakin meningkatnya kuantitas pekerja migran setiap tahunnya, yang saat ini konon mencapai Rp 1 miliar per-hari.

Menurut data yang ada di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan (BP3TKI) DIY, dari bulan Januari hingga Desember 2010 saja tercatat 28.708 orang TKI yang bekerja di negara-negara Asia Pasifik dan berhasil mengirimkan uang sejumlah Rp 110.374.395.427,95. Belum dari provinsi lain. Ironisnya, dari jumlah puluhan ribu TKI, kebanyakan adalah perempuan. Artinya, semangat Kartini telah benar-benar mengakar di hati sanubari perempuan Indonesia untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan keluarganya sampai harus bekerja ke luar negeri.

Mendongkrak nilai memang tampaknya manusiawi, demi menjaga martabat sekolah kepuasan lulusan dan keluarganya. Namun di balik itu semua, pendongkrakan nilai dapat menkondisikan lulusan menjadi penuntut jika suatu waktu mendapatkan nilai yang tidak memuaskan dirinya.

(Penulis adalah Dosen Kopertis Wilayah V Yogyakarta, Sekretaris LPPM UMB Yogyakarta)-b

Gambar 8. Contoh Publikasi Kategori "Analisis"

Senin Legi
29 Oktober 2012
13 Besar 1945
Tahun LXVIII No. 32

http://www.krjogja.com www.kr.co.id

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945

Harian Pagi
28 Halaman
Harga Eceran Rp. 3.000

Analisis
Etos Kerja dan Sertifikasi Guru

Oleh
Dr Hermayawati MPd

PENETAPAN Undang-undang Keistimewaan menenteramkan warga. Namun ini hanya sementara. Masih banyak masalah yang harus ditindaklanjuti dan dibenahi agar DIY menjadi daerah yang benar-benar 'Istimewa'. Keistimewaan DIY harus didukung semua warga secara konsisten dan konsekuen, di antaranya dengan mempertahankan eksistensi dan predikat DIY sebagai Kota (Istimewa) dalam bidang Pendidikan, Budaya dan Pariwisata. Dan ini perlu komitmen

* Bersambung hal 7 kol 1

TELAH DIBUKA GERAI BARU
OPTIK MODERN
RUKO GEJAYAN
Jl. Gejayan Afandi No. 140 Telp. 0274 555395
BELI LENSA Rp. 200 ribu GRATIS FRAME
TUKARKAN KACAMATA LAMA ANDA (TRADE - IN) kacamata lama KAMI HARGAI Rp.75.000,-
Grand Prize 5 MOTOR TVS I Pad
Cicilan : ANZ BCA CIMB NIAGA
JL. DIPONEGORO NO.107 (PRAP PINGIT) TELP. 0274 553222 YK

Jadwal Salat
Senin, 29 Oktober 2012

Zuhur	Asar	Maghrib	Isak	Subuh
11.26	14.37	17.36	18.48	03.54

Dicurigai Ganggu Penyidikan KPK

JAKARTA (KR) - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri lewat pengacara Juniver Girsang menggugat KPK terkait dengan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Korlantas menilai ada tindakan KPK yang tidak sesuai prosedur. Dalam kaitan itu KPK digugat materiil Rp 425 miliar dan imateriil Rp 6 miliar.

Menghadapi gugatan itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan, KPK saat ini fokus pada kasus Irjen Djoko Susilo (DS) dan kasus tersangka simulator SIM lainnya. Bambang curiga isu itu (soal gugatan ke KPK) dihembuskan untuk mengganggu penyidikan kasus Simulator. "Insya Allah (kasus simulator) segera diserahkan ke KPK sesuai surat Kapolri," jelas Bambang Widjojanto Minggu (28/10).

Menurut Bambang, pihak KPK belum menerima surat tentang jadwal persidangannya. Seperti diketahui sebelumnya, Juniver yang juga pengacara Djoko Susilo menyebutkan bahwa kasus akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. "Makanya kami tidak bisa menanggapi gugatan itu kalau belum terima surat gugatan itu," tegas Bambang.

Juniver menyatakan pihak KPK harus menghadapi gugatan perdata dari Korlantas Mabes Polri perihal penyitaan sejumlah barang bukti yang terkait dengan kasus korupsi Simulator SIM roda dua dan roda empat. Menurut Juniver, gugatan tersebut telah dilayangkan sejak bulan September 2012. "Materi gugatannya adalah kami meminta KPK agar mengembalikan dokumen-dokumen yang tidak ada relevansinya dengan kasus SIM dan

* Bersambung hal 7 kol 4

Hanya 16 Parpol yang Lolos

JAKARTA (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (28/10), akhirnya mengumumkan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2014. Hasil verifikasi administrasi, yang dinyatakan lolos hanya 16 parpol. Dengan demikian, 18 parpol lainnya dipastikan gagal.

Menurut Ketua KPU Husni Kamil Malik, ke-16 parpol lolos verifikasi administrasi itu segera mengikuti tahap saringan berikutnya, yakni verifikasi faktual. Parpol yang lolos tahap verifikasi administrasi ialah Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Persatuan Nasional (PPN).

16 PARPOL LOLOS VERIFIKASI ADMINISTRATIF

1. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
4. Partai Bulan Bintang (PBB)
5. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
6. Partai Amanat Nasional (PAN)
7. Partai Golongan Karya (Golkar)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
10. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
11. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
12. Partai Demokrat
13. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
14. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
15. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
16. Partai Persatuan Nasional (PPN)

Grafis : Arko

Sementara itu, 18 partai politik tidak lolos verifikasi administrasi ialah Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Kongres, Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Karya Republik (Pakar), Partai Nasional Republik (Nasrep), Partai Buruh, Partai Damai Sejahtera (PDS),

* Bersambung hal 7 kol 4

Etos Kerja

Sambungan hal 1

semua elemen masyarakat.

Ketiga aspek predikat tersebut juga telah dicanangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) DIY tahun 2004-2025. Sasaran utama RPJPD adalah terwujudnya DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025. Untuk itu, arah pembangunan yang merupakan penjabaran visi dan misinya terutama adalah: (1) mendorong perguruan tinggi untuk menciptakan pusat-pusat keunggulan ilmiah; (2) pengembangan promosi dan jejaring pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri; (3) pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Visi dan misi RPJP DIY sebagaimana tersebut di atas, sudah semestinya didukung segenap warga termasuk para guru, yang dalam hal ini melalui Kelompok Kepala Sekolah (KKS) dan Kelompok Kerja Guru (KKG)-nya.

Hasil penelitian dan/atau pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan penulis selama ini belum menunjukkan kejelasan komitmen antarmasyarakat pendidik untuk merasa ikut handarbeni DIY dengan meningkatkan etos kerja profesional mereka. Mayoritas guru, terutama di jenjang pendidikan dasar masih belum mampu melaksanakan tugas secara benar-benar profesional. Padahal, banyak pendidik yang sudah mendapatkan sertifikasi yang mestinya harus ditimbangi dengan etos kerja profesional.

Di dalam Pasal 7 disebutkan bahwa profesi guru (dan profesi dosen) merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip : (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (6) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (7) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (8) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Pemberdayaan profesi guru (dan/atau dosen) diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Di antara butir-butir yang terkandung dalam Pasal 7 di atas terdapat beberapa butir utama yang belum dapat terealisasikan secara konsisten dan konsekuen yaitu menyangkut etos guru dalam melaksanakan idealisme (dalam pelaksanaan tugas profesionalnya). Kemudian komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat (termasuk belajar secara mandiri dan berkelompok), memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Serta menyangkut pemberdayaan profesi guru yang belum diselenggarakan secara serius, konsisten dan berkelanjutan. Informasi tersebut di atas diperoleh penulis melalui penelitian dan pengamatan serius menyangkut etos profesionalisme para guru di beberapa kecamatan di lingkungan DIY. Hasil pengamatan menunjukkan masih rendahnya etos kerja guru dalam melaksanakan tugas secara profesional, terutama dalam hal mengembangkan kurikulum yang berlaku, memilih dan/atau menyusun materi ajar yang sesuai kebutuhan, menyusun tes secara konseptual dan melaksanakan penelitian. Padahal, kegiatan semacam itu merupakan kewajiban sekaligus kriteria guru profesional.

Rendahnya etos profesional guru dapat dilihat dari kurang berminatnya para guru dalam upaya meningkatkan pengetahuan yang sesuai dengan bidang tugas kewajiban masing-masing meskipun telah difasilitasi. Apalagi jika tanpa fasilitas? Hal ini tentunya berlawanan dengan cita-cita untuk menjadikan DIY sebagai daerah terkemuka pada tahun 2025 sekaligus dalam berkompetisi dengan daerah dan/atau bangsa lain yang mungkin justru tidak memiliki predikat kota pendidikan. Hal ini merupakan 'pekerjaan rumah' yang harus segera diselesaikan.

Atas dasar permasalahan tersebut di atas, sudah selayaknya jika semua komponen yang ada di wilayah DIY khususnya sumber daya manusia terkait saling menyadari akan tugas dan kewajiban masing-masing secara penuh tanggung jawab. Karena untuk benar-benar mewujudkan Yogyakarta sebagai daerah Istimewa benar-benar memerlukan komitmen bersama antarwarga dan harus didukung baik dalam bentuk pemikiran, moril dan materiil. Juga, dalam rangka mewujudkan visi DIY 2025 semua elemen harus senantiasa éduduk bersamai dalam mengatasi permasalahan, terutama terkait dengan predikat DIY. Tanpa komitmen bersama, keistimewaan DIY hanya 'slogan' belaka.

(Penulis adalah Dosen Kopertis Wilayah V Yogyakarta, DPK pada UMB Yogyakarta)-f

SIGIT SUHARYO

REDAKAN BATUK YANG M... DENGAN MANFAAT G...

Betapa tidak nyamannya jika batuk sudah menyerang. Penyakit yang salah satunya disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan atas seperti flu dan pilek ini seringkali membuat penderitanya merasa terganggu dan sangat tidak nyaman. Di sisi lain, tak dapat dipungkiri bahwa ketika usia telah senja, imunitas tubuh menjadi ber kurang sehingga kondisi tubuh mudah menurun. Kondisi tersebut telah dirasakan oleh Sigit Suharyo, "2 tahun lamanya saya sering menderita batuk. Kalau sudah batuk, susah berhenti." Papar kakek 1 orang cucu ini mengawali percakapan.

Sebenarnya, batuk bukanlah sebuah penyakit, namun ia merupakan gejala yang dapat disebabkan oleh beberapa penyakit.

Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh yang sangat penting guna membuang benda asing di tenggorokan dan saluran pernapasan. Tetapi bila batuk terjadi secara terus menerus maka itu berarti terdapat suatu masalah atau penyakit pada tubuh kita.

Karyawan swasta ini telah berupaya mengobati sakitnya. namun belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Sampai akhirnya, Sigit tertarik mencoba Gentong Mas. "2 bulan yang lalu saya mulai minum Gentong Mas. Ternyata memang cocok untuk mengatasi keluhan saya. Setelah minum dengan teratur, kini batuk mulai berkurang dan jarang kambuh, stamina pun meningkat." Terang warga Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, DIY tersebut.

Karena telah membuktikan manfaatnya, kini ia tak sungkan-sungkan untuk membagi pengalaman baiknya tersebut dengan orang lain. "Mudah-mudahan pengalaman saya yang mendapatkan kesehatan dengan cara yang alami ini dapat bermanfaat bagi orang lain." Harap Sigit mengakhiri percakapan.

Meracik suatu ramuan memerlukan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan tinggi. Tidak semua komposisi yang sama jika dicampur akan menghasilkan manfaat yang sama. Kualitas bahan baku, perbandingan komposisi dari masing-masing komponen ser ta pengolahan yang benar akan menentukan hasil kualitas manfaatnya.

Gentong Mas adalah minuman herbal dengan Gula Aren dan Nigella Sativa (Habbatussauda) sebagai bahan utamanya terbukti memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Gula Aren dalam Gentong Mas banyak mengandung

Gambar 9. Contoh Publikasi Kategori "Analisis" dan "Berita"

Rabu Wage
19 Agustus 2009
27 Ruwah 1942 Tahun LXIV No. 314
http://www.krjogja.com

ANALISIS

Dana Teror

Dr Hermayawati MPd

SUNGGUH menakjubkan bahwa remitansi (kiriman uang) tenaga kerja Indonesia (TKI) terutama dari Penataklaksana Rumah Tangga Luar Negeri (sektor informal) tetap mengalir deras. Seakan aliran dana itu bahkan tidak terpengaruh — dan terus meningkat dari waktu ke waktu— meski ada moratorium (penangguhan) penempatan di Malaysia sejak 26 Juni 2009 lalu sebagai akibat adanya kekerasan terhadap mereka. Betapa tidak? Jawa Tengah saja setiap tahunnya menerima Rp 16 triliun per tahun dari sejumlah 14.797, dan 13.782 di antaranya adalah perempuan! Dari jumlah itu, 90%-nya adalah PRT (Tempo, 14/8/2009).

Bisa dibayangkan jumlah remitansi pada skala nasional yang memiliki puluhan propinsi dan menjadi "lumbung" tenaga kerja luar negeri (TKLN). Itu pun baru dari tenaga kerja legal. Padahal angka TKLN yang ilegal pun tidak sedikit. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa remitansi ini sangat mendukung peningkatan devisa negara. Paling tidak di saat perekonomian bangsa yang masih carut marut dan sulitnya mendapatkan nafkah di dalam negeri ini, sementara biaya hidup semakin "mencekik" dewasa ini.

Beban hidup rakyat yang semakin berat termasuk mahalnya pendidikan tinggi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan di dalam negeri sangat mendorong masyarakat terutama pada level bawah untuk bekerja di luar negeri dengan bekal yang seadanya. Mereka sudah tidak lagi mempedulikan berbagai akibat yang mungkin terjadi di tempat mereka bekerja nanti, sebagaimana dialami para pendahulu mereka. Bagi mereka, tidak ada pilihan lain. Lebih baik berupaya bertahan hidup di luar negeri daripada tidak dapat berbuat apa pun di negeri mereka sendiri. Maka, jumlah calon TKLN pun terus bertambah.

Persoalan ekonomi, memang menjadi fakta banyak soal. Bukan hanya meningkatnya terus angka TKI ke luar negeri, namun disinyalir telah 'melahirkan' dan menghadirkan teroris baru.

*Bersambung hal 23 kol 1

RABU WAGE 19 AGUSTUS 2009 (27 RUWAH 1942)

Kedaulatan Rakyat

Dana Teror

Sambungan hal 1

Adalah menyedihkan, ketika mereka yang direkrut untuk dijadikan 'pengantin' alias bom bunuh diri banyak terungkap berasal dari golongan masyarakat kelas bawah. Di sini dapat dilihat bahwa sesungguhnya, kepahitan hidup dan himpitan perekonomian keluarga dapat menumbuhkan rasa melankolis dan putus asa dalam menapaki hidup ini. Fakta ini pula yang kemudian melahirkan pertanyaan: dari mana asal dana operasional untuk melakukan aksi para pelaku?

Ternyata semangat 'patriotik' para pahlawan devisa yang 90%-nya perempuan dalam upaya mengentaskan diri dan keluarganya dari kemiskinan ini sudah seharusnya bukan hanya didukung oleh pemerintah namun juga oleh segenap lapisan masyarakat demi perbaikan ekonomi bangsa. Bahkan pemerintah tampaknya harus 'tut-wuri' ketika pasar tenaga kerja berpendidikan rendah 'terbuka lebar' di mancanegara. Untuk itu, pemerintah (terutama pemerintah daerah) mestinya menyiapkan mereka sebaik-baiknya, termasuk pembekalan bahasa target atau pun Bahasa Inggris yang digunakan di negara tempat mereka bekerja. Hal itu penting dilakukan agar mereka benar-benar mampu bekerja dan mampu bersaing dengan sesama tenaga kerja dari negara lain. Selain untuk meningkatkan martabat mereka di mata bangsa lain. Apalagi mereka di mancanegara banyak mengirimkan uang, remitansinya ke Indonesia.

Mungkinkah tingginya remitansi ini telah 'dimanfaatkan' celahnya untuk membiayai teror? Pertanyaan ini terus bermunculan. Karena itu di tengah maraknya teror pengeboman di Indonesia, mungkin aparat pemerintah perlu melakukan preventif untuk memutus aliran dana operasional teroris. Karena tanpa dana mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan siapa yang memberikan bantuan dana pada mereka, selama ini masih menjadi tanda tanya besar.

Untuk melihat dan memahami hal itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan cara memonitor uang masuk dari luar negeri melalui perbankan. Namun demikian, cukup sulit kiranya untuk mendeteksi aliran dana kelompok teroris tanpa memilahnya dari remitansi TKI. Sehingga perlu dilihat mengingat celah ini dapat saja digunakan sebagai salah satu upaya para teroris untuk mengamuflasekan (menyamarkan) pengiriman dana untuk pelaksanaan aksi mereka di negeri ini. Oleh karena itu, celah ini perlu diwaspadai. Sekalipun tidak menutup kemungkinan bahwa dana teroris bisa didapat dari pelbagai aksi kejahatan. Hal itu bisa saja dilakukan, jika mengingat keyakinan para teroris bahwa hasil kejahatan apa pun dihalalkan demi kepentingan pencapaian tujuan mereka. *(Penulis adalah Dosen Kopertis Wilayah V, Dpk pada Universitas Mercu Buana Yogyakarta)-z*

Gambar 10. Contoh Publikasi Kategori "Analisis"

Selasa Kliwon
16 Februari 2010
2 Mulud 1943 Tahun LXV No. 138
http://www.krjogja.com. www.kr.co.id

ANALISIS

Dualisme Tangani TKI

Dr Hermayawati

'PERSETERUAN' antara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) yang mengakibatkan munculnya dualisme penanganan program tenaga kerja Indonesia (TKI), harus segera diakhiri. Hasil rapat dengar pendapat (Rabu, 10/2/2010) di antaranya dihadiri Komisi IX DPR RI, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Dirjen Binapenta) dan jajarannya serta Ketua BNP2TKI Jumhur Hidayat, telah meminta Menakertrans untuk membatalkan aturan. Di antaranya Peraturan Menakertrans (Permen) Nomor 22 Tahun 2008, Kepmen Nomor 200 dan 201 Tahun 2008 yang sebelumnya telah diminta Mahkamah Agung untuk dicabut melalui Putusan MA Nomor 5 P/2008 karena dinilai melanggar UU Nomor 39 Tahun 2004.

Sebagai gantinya, Menakertrans terdahulu menerbitkan Skep Menakertrans Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri (TKLN) dan merupakan ketentuan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (PPTKLN). Penerbitan Skep Menakertrans tersebut terkesan menafikan keputusan MA yang telah memenangkan gugatan BNP2TKI sehubungan dengan tumpang-tindihnya penanganan operasional TKI. Tugas pembinaan dan penempatan TKI yang mestinya dilimpahkan pada BNP2TKI juga ditangani oleh Depnakertrans, di bawah Ditjen Binapenta.

* Bersambung hal 23 kol 1

Dualisme Tangani TKI

Sambungan hal 1

Dualisme penanganan program TKI, jika dibiarkan berlanjut, tentu saja dapat mengganggu kinerja operasional pembinaan penempatan dan perlindungan TKI. Diakui atau tidak, eksistensi dualisme penanganan TKI sebenarnya hanyalah masalah konflik kepentingan antarindividu pejabat yang bersangkutan dan bukan masalah kelembagaan ataupun perundang-undangannya. Akibatnya, kinerja kedua lembaga tersebut menjadi tidak optimal. Korban implementasi kebijakan tersebut tentu saja adalah para TKI yang mayoritas perempuan dan memiliki keinginan mulia untuk menyejahterakan keluarganya.

Permasalahan tersebut di atas tampaknya telah dipahami benar oleh Komisi 9 DPR RI. Oleh sebab itu, lembaga legislatif tersebut meminta Menakertrans Muhaimin Iskandar sebagai penentu kebijakan untuk membatalkan Skep Menakertrans Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2009. Keputusan DPR RI untuk menghapus dualisme penanganan TKI yang merupakan program unggulan pemerintah dalam rangka mengurangi pengangguran dalam negeri, selain untuk menangguk devisa yang semakin meningkat dewasa ini, perlu diacungi jempol. Alasannya, program 100 hari Menakertrans Muhaimin Iskandar belum menyentuh permasalahan TKI secara substansial.

Dalam rangka merealisasikan kebijakan penempatan dan perlindungan bagi TKI Menakertrans memang telah berupaya membebaskan mereka dari keharusan menggunakan Terminal Khusus Pemulangan TKI. Ia juga mendesak negara-negara target penempatan untuk meningkatkan perlindungan serta melakukan inspeksi mendadak di beberapa agen penempatan dan perlindungan TKI swasta (PPTKIS). Namun demikian, yang perlu segera dibenahi sebenarnya adalah ke-*legawa*-an departemennya dalam berbagi tugas dengan BNP2TKI secara tegas. Sehingga akar permasalahan konflik internal antarlembaga penanggungjawab program TKI dapat segera diatasi, demi peningkatan kualitas kinerja masing-masing lembaga.

Penataan kembali tugas kedua lembaga secara tegas perlu segera dilakukan. Bukan semata penanganan TKI sudah cukup rumit. Namun mengingat jumlah remitansi TKI yang cukup fantastis (lebih dari Rp 6 triliun pertahun). Sehingga pelaksanaan program ini seharusnya terus dikawal oleh berbagai pihak. Agar pelbagai permasalahan kekerasan terhadap TKI khususnya TKW, seperti penganiayaan, pelecehan, deportasi, pembunuhan, bunuh diri, depresi, tidak digaji dan *trafficking* bisa dicegah.

Harus disadari, program TKI yang mayoritas TKW merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah pengangguran yang semakin meningkat dari waktu ke waktu sebagai akibat tuntutan ekonomi keluarga dan rendahnya tingkat pendidikan mereka. Terlepas dari pro-kontra terhadap eksistensi program, permasalahan tenaga kerja wanita (bahkan anak-anak) juga terjadi di berbagai negara sedang berkembang lain, seperti India , Pakistan , Thailand, Vietnam dan Filipina. Realita memang Indonesia memiliki modal dasar sumber daya manusia yang melimpah. Masalah krusial yang harus segera diatasi adalah meningkatkan kualitas para TKI melalui rekrutmen yang benar-benar bertanggungjawab. Tentu dengan membekali mereka dengan ketrampilan bekerja dan berbahasa menggunakan bahasa target melalui pelatihan yang proporsional dan sesuai dengan target penempatannya.

Tanggungjawab perekrutan, pembinaan dan penempatan secara operasional biarlah menjadi tugas BNP2TKI bersama lembaga pelaksana pembinaan dan penempatan TKI swasta (PPTKIS) yang ditunjuk. Sedang Depnakertrans sebaiknya khusus menangani tugas pembuatan peraturan dan perundang-undangan serta melaksanakan lobby dengan negara pengguna TKI (*G to G*) untuk mencegah berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan. Hemat penulis, efektivitas penanganan TKI hanya akan dicapai melalui kesepakatan bersama antarlembaga pemangku kepentingan tersebut di atas dengan pembagian tugas secara tegas yang diatur dengan Skepmen baru berlandaskan kesepakatan bersama.

(Penulis adalah Dosen Kopertis Wilayah V Dpk pada UMBY juga mengajar di PPs UST, UAD dan UT)-a

Gambar 11. Contoh Publikasi Kategori "Analisis"

Minggu Wage
13 September 2009
23 Pasa 1942
Tahun LXIV No. 339
http://www.krjogja.com. www.kr.co.id

ANALISIS

'Hikmah' dari Malaysia?

Dr Hermayawati MPd

'KONFLIK' dengan Malaysia tampaknya kian jelas, setelah pelbagai kasus yang membuat darah Bangsa Indonesia menggelagak akibat ulah Malaysia yang kurang dapat ditolerir. Dan kesabaran sebagian Bangsa Indonesia ada yang hilang. Mereka kemudian mengedepankan emosi salah satu di antaranya melakukan *sweeping* warga Malaysia di ibukota.

Aksi ini ternyata mendapat perhatian Presiden SBY. Ketika membuka sidang kabinet paripurna-pun, Presiden SBY meminta agar masyarakat tidak melakukan tindak kekerasan yang melanggar hukum sebagai protes terhadap negeri *jiran*. Meski demikian presiden juga mengingatkan Pemerintah Malaysia untuk memahami sensitivitas masyarakat Indonesia. Tanpa pemahaman bersama tentu apa yang terjadi akan dapat mengganggu hubungan baik Indonesia – Malaysia.

Reaksi yang muncul pada masyarakat memang mulai beragam. Pasalnya, kita bisa dikatakan telah banyak 'kecolongan'. Mulai batik, lagu 'Rasa Sayange', Reog Ponorogo dan kemudian memuncak pada 'pengambilan' Tari Pendet. Sementara sejumlah kasus penganiayaan hingga deportasi terkait tenaga kerja Indonesia (TKI) khususnya tenaga kerja wanita (TKW) sudah cukup lama terjadi. Semua ini menjadi masalah sensitif bagi Bangsa Indonesia.

Pantas kita geram terhadap ulah negeri tetangga yang nyata-nyata telah merendahkan martabat Bangsa Indonesia. Namun daripada bersikap emosional, mungkin apa yang terjadi ini sebaiknya membuat kita introspeksi. Jika kita 'marah' dengan klaim mereka atas seni budaya, bagaimana sebenarnya selama ini *sense of belonging* (rasa memiliki) kita? Baik terhadap eksistensi karya seni dan budaya termasuk bahasa daerah yang sangat *adiluhung* itu maupun terhadap upaya peningkatan harkat martabat

" Bersambung hal 23 kol 1

'Hikmah' .....

Sambungan hal 1

bangsa melalui penempatan TKI di luar negeri.

Banyak hasil karya seni budaya yang hingga kini belum dipatenkan. Kita juga enggan melestarikan karya seni, budaya (termasuk bahasa daerah). Buktinya, saat ini banyak di antara kita terutama para kaum muda yang enggan menggunakan bahasa daerah (meski di dalam komunitas pengguna bahasa). Sementara bagaimana sikap kita terhadap seni daerah seperti: *reog, jathilan, ketoprak, wayang, ludruk, lenong*, tari-tarian daerah dan sebagainya. Belum lagi pemahaman dan kecintaan kita terhadap batik, lurik dan lainnya. Lebih dari itu, sebagian dari kita seringkali lebih membanggakan segala sesuatu yang berbau impor daripada produk dalam negeri.

Sesungguhnya kita banyak kecolongan harta yang tidak ternilai harganya. Betapa naifnya kita, ketika pada suatu saat memerlukan referensi atau pun berbagai data tentang sejarah seni dan budaya kita sendiri, kita harus mendatangi museum yang ada di luar negeri. Bukankah sudah sering kita mendengar bahwa kelak untuk belajar Bahasa Jawa kita perlu ke Belanda?

Program pengiriman TKI ke luar negeri sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan karya seni dan budaya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Misi pengenalan ini, di antaranya dimaksudkan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan karya tersebut di luar negeri sebagai upaya untuk mencegah tindakan klaim atas seni budaya kita. Realisasinya tentu saja melalui pelatihan sistematis yang dapat dilakukan mulai dari keluarga, lingkungan sosial, pemerintah setempat, sampai dengan agen pelatihan dan penempatan tenaga kerja yang bersangkutan. Artinya, semua calon pekerja luar negeri hendaknya bukan hanya dibekali dengan keterampilan bekerja, melainkan juga keterampilan berbahasa asing, berbahasa daerah dan nasional serta keterampilan berolah seni budaya secara santun. Tentu sesuai dengan minat dan latar belakang sosial budaya mereka masing-masing.

Jika ini diwujudkan, penilaian manca terhadap tenaga kerja kita tentu akan berbeda. Pasalnya, orang yang terampil bekerja, berbahasa, berkesenian dan berbudaya menarik akan mampu berperilaku menarik dan menebarkan pesona bagi orang atau bangsa lain sehingga ia akan terluput dari masalah. Jangan lupa bahwa masalah muncul karena ada *gap* (kesenjangan)! Dan untuk membangun sumber daya manusia semacam itu tentu saja diperlukan komitmen sistemik dari berbagai pihak terkait, di samping para eksekutif tentunya harus memiliki kiat sungguh-sungguh untuk lepas dari berbagai permasalahan bangsa ini. (*Penulis adalah Dosen Kopertis Wilayah V, Dpk pada Universitas Mercu Buana Yogyakarta*)-f

Gambar 11. Contoh Publikasi Kategori "Analisis"

Sabtu Pahing
31 Oktober 2009
12 Dulkaidah 1942 Tahun LXV No. 35
http://www.krjogja.com. www.kr.co.id

ANALISIS

Kekerasan TKI (Lagi)

Dr Hermayawati MPd

KEMATIAN Muntik bak mengobarkan api dalam sekam. Pemerintah Indonesia akhirnya mengutuk kekerasan pada tenaga kerja Indonesia (TKI) oleh Malaysia. Dalam kunjungan ke Malaysia November mendatang, persoalan kematian Muntik dan juga masalah kekerasan pada TKI khususnya tenaga kerja wanita (TKW) akan menjadi salah satu agenda bahasan dalam kunjungan bilateral negeri jiran tersebut *(KR, 30/10/2009)*.

Muntik, bisa jadi telah menjadi pemantik. Kasus Muntik - TKW asal Jombang - adalah catatan kesekian ratus kali kekerasan yang dialami TKI di negeri serumpun tersebut. Tetapi mungkin, setelah Nirmala Bonat, baru Muntik-lah yang mampu menyita perhatian Presiden SBY, hingga akan dibicarakan dalam pertemuan bilateral mendatang.

Kekerasan terhadap TKI sesungguhnya bukan berita baru lagi. Berpuluh TKI terutama TKW di pelbagai negara telah mengalami kekerasan. Mereka yang disebut-sebut sebagai *pahlawan devisa* itu seakan tidak pernah terlindungi. Kemana mesti mengadu bila mendapatkan kekerasan, mereka yang harus bekerja jauh, berpisah dengan keluarga ini bahkan seringkali tidak pernah tahu. Apa yang harus dilakukan dan gebrakan apa yang hendak dilakukan Menakertrans dengan kondisi ini?

Ada yang menarik, pasca pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II lalu. Pencanangan agenda program 100 hari pun segera digaungkan, juga oleh Menakertrans Muhaimin Iskandar yang berjanji menjadikan agenda pemulangan ribuan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di penampungan negara penempatan sebagai prioritas. Menakertrans akan melakukan kunjungan ke berbagai negara yang ada penampungan serta akan segera melakukan verifikasi terhadap TKI *(Tempo, 23/10/2009)*.

Tanpa mengecilkan arti mereka, agenda pemulangan TKI di penampungan tentu

* Bersambung hal 31 kol 5

Kekerasan TKI

Sambungan hal 1

saja bukan penyelesaian permasalahan pokok TKI. Tidak semata-mata memunculkan kesan pemborosan dana. Tapi sebenarnya yang perlu mendapat perhatian utama adalah pembenahan permasalahan di dalam negeri, yaitu pembenahan sumber daya manusia para pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk dalam penyiapan kualitas calon TKI agar lebih berterima (*acceptable*) dan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain. Untuk itu, usulan Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) agar Menakertrans mempertimbangkan kembali eksistensi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) *(KR, 26/10/2009)* sudah selayaknya direspons secara positif untuk menghindari adanya ketumpang-tindihan (*overlapping*) pelaksanaan tugas antara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dan BNP2TKI.

Ada beberapa alasan menyangkut pentingnya peninjauan kembali eksistensi BNP2TKI. *Pertama* selama dua tahun keberadaannya, lembaga tersebut belum secara signifikan menunjukkan keberhasilannya dalam meningkatkan kualitas TKI. Buktinya, masih relatif banyak TKI yang bermasalah di luar negeri, seperti penganiayaan, penyekapan dan deportasi sehingga pemerintah terpaksa memoratorium (menangguhkan) penempatan TKI terutama di Timur Tengah pada tahun 2006 dan Malaysia pada beberapa bulan yang lalu. *Kedua*, selain terkesan ada dualisme kewenangan, keberadaan BNP2TKI juga dinilai memicu pemborosan anggaran negara. Sebelumnya, tugas lembaga tersebut cukup ditangani oleh Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (Ditjen PPTKLN) yang sekarang diganti Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Ditjen Binapenta) dan secara struktural dilaksanakan oleh Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (Dit PTKLN). *Ketiga*, adanya konflik kepentingan antarkedua lembaga memicu perbedaan penafsiran terhadap UU No 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN dan Peraturan Presiden (Perpres) No 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI membawa permasalahan tersebut ke Mahkamah Agung (MA) yang konon dimenangkan oleh badan operasional tersebut.

Selama ini terdapat *ambiguitas* (kerancuan) kewenangan pada pelaksanaan tugas masing-masing lembaga terutama sejak diberlakukannya UU No 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI. Menurut versi Depnakertrans, deskripsi tugasnya adalah membuat kebijakan menyangkut tenaga kerja, menerbitkan dan mencabut Surat Izin Pengerahan (SIP) bagi pelaksana penempatan TKI swasta dan melaksanakan PPTKLN yang dilakukan antarpemerintah (*G to G*). Sedangkan BNP2TKI melaksanakan tugas operasional menempatkan dan melindungi TKI antarswasta (*private to private*). Sebaliknya badan operasional tersebut menafsirkan bahwa semua bentuk operasional, baik *G to G* maupun *private to private* adalah wewenangnya. Konflik kepentingan tersebut mendorong Menakertrans terdahulu menerbitkan: Peraturan Menteri (Permen) No 22 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan PPTKLN, Keputusan Menteri (Kepmen) No 200 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Penerbitan SIP dan Kepmen No 201 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Penerbitan Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) untuk kepentingan perusahaan. Penerbitan ketiga peraturan tersebut di atas memicu pertikaian antarkedua lembaga pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab terhadap Presiden itu hingga ke MA.

Atas dasar berbagai fakta sebagaimana dipaparkan di atas, mestinya Presiden segera menindaklanjuti dengan meninjau kembali keberadaan BNP2TKI dengan mengembalikan tugas PPTKLN kepada Depnakertrans atau lebih mengoptimalkan tugas lembaga tersebut agar eksistensinya jelas. *(Penulis Dosen Kopertis Wilayah V Yogyakarta Dpk pada UMBY juga mengajar di PPs UST Yogyakarta)-e*

Gambar 13. Contoh Publikasi Kategori "Analisis"

Harian Pagi
28 Halaman
Harga Eceran
Rp. 3.000

Jumat Pon
16 Desember 2011
20 Sura 1945 Tahun LXVII No. 79

Kedaulatan Rakyat

Analisis
Melindungi TKI

Dr Hermayawati MPd

PERMASALAHAN yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seperti tak pernah usai. Bahkan kebijakan baru seringkali menjadi permasalahan baru juga. Seperti program pengadaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang sesungguhnya merupakan amanat UU No 39/1004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.

KTKLN merupakan kartu identitas bagi tenaga kerja luar negeri yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (BNP2TKI). Penerbitan kartu tersebut sebenarnya untuk mencegah berbagai kejadian yang tidak diharapkan para pahlawan devisa yang sedang mencoba berjuang melawan ganasnya kehidupan. Perjuangan yang mereka lakukan adalah untuk menyejahterakan keluarga.

* Bersambung hal 7 kol 1

Melindungi . . . . . .

Sambungan hal 1

Namun sungguh ironis. Meski ada KTKLN, para TKI terutama tenaga kerja wanita (TKW) bukannya mendapatkan perlindungan, justru banyak di antara mereka terkadang mendapatkan kekerasan. Bukan hanya di luar negeri tempat mereka mengadu nasib. Kekerasan itu juga mereka hadapai di negeri sendiri karena tidak sedikit di antara mereka yang menjadi korban kekerasan berupa pemerasan terselubung. Bukan hanya saat kedatangan di bumi pertiwi yang *loh-jinawi*. Karena pemerasan itu sudah dialami di antaranya kala harus membayar KTKLN melalui calo dengan harga yang berlipat. Mereka memilih menggunakan jasa calo untuk mendapatkan KTKLN daripada harus melalui prosedur birokratis yang melelahkan. Namun sejauh mana penggunaan kartu identitas tersebut kala berada di luar negeri, perlu diteliti kembali.

Niat baik para TKI semestinya didukung oleh berbagai pihak. Bukan sebaliknya, mereka malah dijadikan 'objek' pemerasan dengan dalih apapun. Jika bukan karena terpaksa, mereka tidak akan nekat merantau hingga ke luar negeri tanpa bekal keterampilan dan bahasa yang memadai.

Harus diakui, akar berbagai permasalahan yang menimpa para TKI sebenarnya adalah karena tingkat pendidikan mereka yang mayoritas masih serta kurangnya keterampilan mereka dalam bekerja. Apalagi banyak TKI yang memiliki kebiasaan malas, 'lelet' dalam bekerja dan kurang mampu beradaptasi, seringkali memicu kemarahan para majikan. Pendidikan rendah juga dapat mengakibatkan orang mudah diperdaya sehingga sering menjadi bulan-bulanan calo, penipu, bahkan majikan.

Jika pemerintah melalui BNP2TKI memang serius dalam menangani TKI, pendidikan mereka harus diupayakan secara profesional. Sementara penanganan pendidikan TKI yang diserahkan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) masih jauh dari profesional. Apapun alasannya, pendidikan TKI harus dilakukan secara lebih profesional dengan melibatkan sumber daya manusia (SDM) yang relevan di bidangnya supaya tujuan pengiriman TKI untuk membantu mereka dalam menyejahterakan keluarga dan mengurangi angka pengangguran dapat tercapai. *(Penulis adalah dosen Kopertis Wilayah V dan Sekretaris LPPM UMB Yogya)-a*

Gambar 14. Contoh Karya "Analisis"

Rabu Kliwon
21 Juli 2010
9 Ruwah 1943
Tahun LXV No. 286

http://www.krjogja.com. www.kr.co.id

Analisis
MOS dan MOKB

Oleh
Dr Hermayawati Mpd

KRITIK, tidak menyurutkan komersialisasi pendidikan terutama pada sekolah-sekolah yang memposisikan diri berstandar internasional (SBI). Ironisnya, komersialisasi itu sekaligus juga menjadi ajang 'balas dendam' dari siswa senior kepada yuniornya pada masa orientasi studi (MOS) bagi para peserta didik baru.

MOS atau apapun namanya (ada yang menamakannya Pelatihan Dasar Pendidikan Pendahuluan Bela Negara/PDPPB) tetap saja secara psikologis memberikan tekanan, bukan hanya bagi siswa baru yang bersangkutan namun juga bagi orangtua mereka. Betapa tidak? Setelah harus memenuhi kewajiban finansial yang relatif berat, orangtua masih harus menyediakan berbagai anggaran harian sebagai persyaratan mengikuti kegiatan tersebut sepanjang waktu yang telah ditentukan.

Di lapangan, masih dijumpai beberapa sekolah yang tetap melakukan kegiatan orientasi yang sebenarnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan bela negara, apalagi bersifat mendidik. Sebaliknya, pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah baru itu justru menjadi masa orientasi konspirasi bisnis (MOKB) antara panitia dan pelaku bisnis tertentu. Sebagai contoh, ada sekolah dimana siswa baru diminta membawa berbagai kelengkapan baik yang berupa benda ataupun makanan dengan merek dagang tertentu yang

~ Bersambung hal 7 kol 1

MOS dan . . . . . .

Sambungan hal 1

biasanya jarang dikonsumsi setiap hari. Bayangkan saja, beratus-ratus siswa diharuskan mengonsumsi makanan merek tertentu selama kegiatan berlangsung. Entah siapa yang secara 'genius' berinisiatif mengambil kesempatan untuk mengeruk keuntungan pada momentum sangat tepat itu.

Apapun dalihnya, tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan. Apalagi mengingat kondisi perekonomian masyarakat, khususnya para orangtua peserta didik baru yang kemungkinan memiliki lebih dari satu anak yang sama-sama usia masuk sekolah pada tataran tertentu. Anehnya, pihak sekolah dan pemangku kepentingan terkait lainnya seakan 'menutup mata' terhadap kenyataan tersebut.

Diakui atau pun tidak, kenyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program pendidikan terutama untuk sekolah berstandar internasional (SBI) belum berjalan optimal. Dalam hal ini, peran pengontrolan yang merupakan salah satu amanat yang harus diemban oleh Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan seperti tercantum dalam lampiran 1 dan 2 Kepmendiknas No 044/U/2002 harus dioptimalkan, bukan hanya menyangkut kontrol kualitas (*quality control*)-nya saja namun juga perencanaan, penataan manajemen, pelaksanaan dan evaluasi program (*planning, organizing, actuating dan evaluating*/POACE)-nya.

Komite Sekolah merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Kedua lembaga tersebut memiliki berbagai peran, di antaranya peran monitoring. Berdasarkan fungsinya tersebut, mestinya mereka lebih konsisten dan intensif dalam melaksanakan tugas pengawasan. Jika tidak, semua langkah yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan utama pendidikan akan mengalami kegagalan. Perlu diingat, bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan peserta didik agar mereka mampu mandiri dan berdaya saing tinggi untuk berkompetisi di kehidupan mendatang yang tampaknya semakin rumit.

Menurut Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro, dan Bapak Pendidikan Brasilia Paulo Freire, tujuan pendidikan dapat dicapai jika peserta didik diberi kebebasan untuk mengekspresikan gagasan mereka di bawah bimbingan sekolah. Keluarga dan masyarakat dan guru, orangtua, dan tokoh-tokoh masyarakat berfungsi sebagai model atau panutannya. Pakar psikologi pendidikan Gage dan Berliner pun berpendapat bahwa peningkatan kualitas peserta didik dapat dicapai, di antaranya jika mampu menghindarkan peserta didik dari perasaan tertekan, ketidaknyamanan belajar dan terpasung kreativitasnya. Pembebasan peserta didik untuk berkreasi sesuai dengan bakatnya sebenarnya secara implisit juga termaktub dalam UU No 25/2000 tentang Propenas, UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Kepmendiknas No 122/U/2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan dan Olah Raga tahun 2000-2004.

Pelaksanaan MOS di berbagai tempat yang selama ini berlangsung, banyak yang menyimpang dari hakikat pendidikan. Kenyataan tersebut di atas mengindikasikan adanya komersialisasi pendidikan yang tentu saja menguntungkan pelaku bisnis, sebaliknya sangat merugikan peserta didik. Pemangku kepentingan terkait mestinya segera melakukan kegiatan pengawasan secara kooperatif dan intensif terhadap isi/muatan, input, proses dan hasil (*context, input, process, product*) pendidikan. Jika fungsi pengawasan benar-benar dilakukan oleh yang berkompeten secara konsekuen, konsisten, kooperatif, normatif dan penuh rasa tanggung jawab niscaya proses pendidikan akan berjalan di atas 'rel' yang seharusnya dilalui.

(Penulis adalah Dosen FKIP di lingkungan Kopertis Wilayah V Yogyakarta)-b

Gambar 15. Contoh Karya "Analisis"

Senin Wage
13 September 2010
4 Sawal 1943 Tahun LXV No. 335
Harian Pagi 28 Halaman
Harga Eceran Rp. 3.000
http://www.krjogja.com www.kr.co.id

Analisis
PAUD dan TKI

Oleh
Dr Hermayawati MPd

ANCAMAN hukuman mati terhadap ratusan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia sungguh membuat miris siapapun yang masih memiliki hati nurani dan rasa kemanusiaan. Sebagian besar (122) orang terkait dengan kasus narkoba dan sisanya kasus pembunuhan dan kepemilikan senjata api (*KR, 25/8/2010*). Terlepas dari kesalahan yang telah mereka lakukan, fenomena tersebut sungguh sangat 'menampar' telak bangsa yang besar dan memiliki populasi urutan keempat di dunia ini.

Reaksi memang beragam. Anehnya, bukan solusi yang bijak tapi justru saling menyalahkan. Padahal tindakan preventif terhadap upaya tersebut lebih penting dilakukan, termasuk langkah antisipatif agar permasalahan yang membuat miris dan memicu konflik antanegara tidak terjadi. Perang, sebagaimana dihembuskan oleh sebagian kelompok masyarakat, bukan penyelesaian yang bijak. Sebaliknya hanya akan menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi rakyat yang bersengketa karena semua manusia pada hakikatnya pasti cinta damai. Bangsa yang bijak tentu mampu menyikapi semua permasalahan secara jernih dan tidak emosional, apalagi saling menyalahkan. Perlu diingat bahwa permasalahan bangsa merupakan suatu sistem yang kemunculannya tentu berkaitan dengan berbagai penyebab.

Harus diakui, akar permasalahan lebih disebabkan lemahnya mentalitas dan daya penalaran sumber daya manusia yang bersangkutan sebagai akibat dari lemahnya produk pendidikan, baik secara formal (sekolah), informal (keluarga), dan/atau nonformal (masyarakat). Salah satu solusi untuk mengantisipasi terjadinya persinggungan antarindividu, antarkelompok atau pun antarbangsa adalah meningkatkan kualitas mental, spiritual, dan daya penalaran sumber daya manusia secara integratif melalui pendidikan.

- Bersambung hal 7 kol 4

PAUD dan TKI

Sambungan hal 1

Pendidikan merupakan pilar kehidupan bangsa untuk membentuk manusia seutuhnya, yaitu manusia yang mampu mandiri dan bertanggung jawab atas masa depannya sendiri dan keluarganya. Apalagi arus globalisasi kini telah merambah di semua kalangan dan memunculkan berbagai persoalan, baik antarindividu, antarkelompok, atau pun antarbangsa. Pendidikan di semua tataran, baik yang bersifat formal, informal, maupun nonformal harus secepatnya dibenahi, termasuk pelatihan bagi para calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) dan pendidikan anak-anak usia dini (PAUD) para TKI.

Adanya berbagai permasalahan TKI seharusnya kita memperhatikan pula nasib pendidikan anak-anak mereka yang sangat mungkin tidak terlalu terurus karena ditinggal ke luar negeri. Dua tahun silam, media nasional mengungkap kasus anak-anak TKI di Sabah yang belum mendapatkan layanan pendidikan secara layak. Hal ini tentu saja menyalahi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamanatkan bahwa *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan* (Pasal 31 ayat 1) dan *setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya* (Pasal 31 ayat 1 dan 2) serta *fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara* (Pasal 34, ayat 1). Kedua pasal tersebut mengimplikasikan bahwa anak-anak warga negara yang terlantar wajib mendapatkan pendidikan dasar atas biaya pemerintah, termasuk anak-anak TKI yang sedang menjalankan tugas mulia dalam upaya menyejahterakan keluarganya.

Layanan pendidikan bermutu bagi anak-anak TKI terutama yang berusia dini dapat dilakukan melalui kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) terkait dengan PAUD yang akan direalisasikan pada tahun 2011 mendatang. Pelaksanaan PAUD anak-anak TKI dapat dilakukan sinergis dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertrans) melalui jajaran masing-masing. Agar hasilnya optimal, pelaksaan PAUD harus benar-benar melibatkan tenaga profesional. Demikian pula halnya dengan pendidikan calon tenaga kerja Indonesia untuk luar negeri (CTKI).

Harus diakui bahwa selama ini program pendidikan CTKI dan PAUD belum melibatkan tenaga profesional di bidangnya. Artinya, baik PAUD maupun pelatihan CTKI belum secara signifikan melibatkan guru profesional. Saat ini, masih banyak pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) yang melatih CTKI dengan melibatkan tenaga yang tidak profesional, seperti mantan TKI mengajar bahasa asing yang digunakan di negara target bekerja seperti bahasa Inggris, Mandarin, Kantonis, dan Arab. Demikian pula dengan PAUD yang kebanyakan ditangani oleh tenaga tidak profesional sehingga terkesan hanya menghamburkan uang negara.

Kenyataan ini tentu saja tidak bijaksana, mengingat bahwa mereka tidak menguasai hakikat pendidikan dan pelatihan/pembelajaran. Bayangkan, jika berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih banyak guru yang belum profesional di bidangnya. Apalagi pengajar yang tidak memiliki latar belakang pendidikan guru? Tentu hasil pelatihan dan/atau pembelajarannya juga dipertanyakan. Jika ingin berhasil, pendidikan dan pelatihan seharusnya diserahkan kepada tenaga-tenaga profesional.

Dalam rangka optimalisasi hasil pendidikan berkualitas, semua pihak terkait harus benar-benar melakukan perencanaan, penataan, proses pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi (*planning, organizing, actuating, controling dan evaluating/POACE*) program pendidikan bagi semua anak bangsa (termasuk CTKI dan anak-anak mereka) secara konsisten dan bertanggung jawab, sebagai konsekuensi atas diluncurkannya kebijakan pencerdasan kehidupan bangsa sebagai upaya pencegahan konflik antarindividu, antarkelompok, dan antarbangsa. Untuk itu, pelaksanaan pelatihan CTKI dan PAUD termasuk bagi anak-anak TKI harus segera dilakukan secara profesional dan sinergis antarkomponen masyarakat, karena pendidikan adalah tanggung jawab semua pihak. Kedamaian dan kesejahteraan bangsa dapat diraih melalui pencerdasan kehidupan bangsa. Dan keberhasilan tujuan pendidikan nasional hanya akan diraih jika dilakukan secara sistemik dan sinergis antarkomponen bangsa. Bukan dengan tambal sulam. Apalagi saling menyalahkan.

(*Penulis adalah dosen di lingkungan Kopertis Wilayah V dan Sekretaris LP2M Universitas Mercu Buana Yogyakarta*)-a

Gambar 16. Contoh Karya "Analisis"

Harian Pagi
24 Halaman
Harga Eceran Rp. 3.000

Selasa Kliwon
26 Juli 2011
24 Ruwah 1944 Tahun LXVI No. 292

http://www.krjogja.com. *www.kr.co.id*

Analisis Pendidikan TKI

Dr Hermayawati MPd

ANGGARAN tambahan bagi dunia pendidikan sebesar Rp 14,479 triliun yang dipatok Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disarankan oleh Komisi IX DPR hendaknya juga dialokasikan untuk keperluan pendidikan dan keterampilan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI). Keputusan tersebut diambil usai pemberhentian sementara (moratorium) pengiriman TKI. Menurut anggota Komisi IX Chusnunia, TKI perlu mendapatkan pendidikan dan keterampilan kerja yang layak dan tentu saja dijamin oleh undang-undang TKI.

Tambahan anggaran pendidikan dalam APBNP-2011 tersebut terutama dialokasikan pada tiga kementerian, yakni Kementerian *Pendidikan Nasional* (Kemendiknas), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

* **Bersambung hal 7 kol 3**

Pendidikan

Sambungan hal 1

(Kemenakertrans). Alasannya, ketiga kementerian tersebut memiliki fungsi pendidikan dasar. Sebelumnya, Kemendiknas mengusulkan tambahan anggaran Rp 10 triliun dalam APBN-P 2011 untuk alokasi beasiswa bagi siswa tidak mampu dan pembenahan sekolah yang rusak. Kemenag mengusulkan tambahan Rp 3,5 triliun untuk pemetaan dan pendataan sekolah agama dan madrasah di seluruh Indonesia. Untuk Kemenakertrans, tambahan anggaran APBN-P 2011 akan dialokasikan untuk peningkatan pelatihan kerja calon TKI melalui penguatan di balai latihan kerja untuk tenaga kerja informal. Usul tambahan anggaran ini sehubungan dengan langkah pemerintah melakukan moratorium tenaga kerja yang kebanyakan di sektor informal (*Nasional-Online, 19/7/2011*).

Pematokan tambahan anggaran pendidikan dasar termasuk bagi TKI dan anak-anaknya hemat penulis bukan hanya sekedar layak dipertimbangkan melainkan sudah seharusnya sejak awal telah dilakukan. Bagaimanapun, mereka adalah penyumbang devisa negara yang sangat besar. Bayangkan, tahun 2010 saja, remitansi TKI konon mencapai Rp 63 triliun, kuartal pertama 2011, TKI mengucurkan remitansi 1,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14 triliun. Rata-rata TKI mengirim uang 500 juta dolar AS atau sekitar Rp 4,5 triliun per bulan ke Indonesia.

Selain itu, anak-anak TKI yang selama ini kurang mendapatkan perhatian karena ditinggalkan orangtua mereka bekerja ke luar negeri, juga memerlukan perhatian serius. Mereka adalah aset bangsa dan anak-anak 'pahlawan devisa' yang sudah sepatutnya diperhatikan hak-haknya. Jika tidak dilakukan, hal itu tentu saja menyalahi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan amandemennya yang mengamanatkan bahwa *setiap warga negara berhak mendapat pendidikan* (pasal 31 ayat 1) dan *setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya* (pasal 31 ayat 1 dan 2) serta *fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara* (Pasal 34 ayat 1).

Kedua pasal tersebut di atas mengimplikasikan bahwa anak-anak warga negara yang telantar wajib mendapatkan pendidikan dasar atas biaya pemerintah, termasuk anak-anak TKI yang sedang menjalankan tugas mulia dalam upaya menyejahterakan keluarga. Jumlah anak-anak TKI tentu akan terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah pengiriman TKI legal dari waktu ke waktu. Bagaimana pun, mereka adalah aset bangsa yang wajib diperlakukan secara layak, agar tidak menimbulkan permasalahan nasional di kemudian hari. Layanan pendidikan bermutu hendaknya tidak hanya ditujukan bagi anak TKI, tetapi juga bagi para calon TKI (CTKI) yang sedang menjalani pelatihan dalam rangka penyiapan keterampilan, baik dalam bekerja maupun dalam berkomunikasi dalam bahasa asing yang digunakan di negara target bekerja. Hal ini perlu diungkapkan, karena selama ini mereka belum mendapatkan layanan pelatihan yang berkualitas. Buktinya, masih banyak permasalahan yang dihadapi TKI di luar negeri.(*Penulis adalah Dosen Kopertis Wilayah V dan Sekretaris LPPM UMBY)-e*

Gambar 17. Contoh Karya "Analisis"

Jumat Pahing 18 Juni 2010
6 Rejeb 1943 Tahun LXV No. 254
Harian Pagi 28 Halaman
Harga Eceran Rp. 3.000

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945

http://www.krjogja.com. www.kr.co.id

Analisis

PPDB dan SBI

Oleh:
Dr Hermayawati MPd

'PERTARUNGAN' nasib antarsekolah dan antarsiswa melalui pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP/SLTA dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD telah usai. Para lulusan tinggal menunggu kelanjutan nasib mereka dalam penantian dan ketidakpastian untuk melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi. Lulusan SLTA, harus jeli dalam memilih perguruan tinggi yang benar-benar diminati dan menawarkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja agar mereka dapat terserap di dalamnya. Demikian pula lulusan SD/MI dan SMP/MTs.

*Bersambung hal 7 kol 1

KAUM MUDA DOMINASI PENGURUS DPP PD

Anas - Ibas Sebut 'Duet Maut'

JAKARTA (KR) - Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum mengakui susunan kepengurusan DPP untuk periode 2010-2015 cukup gemuk. Itu karena untuk merespons kondisi masyarakat. Meski begitu, komposisi kepengurusannya hampir 70 persen diisi kaum muda.

Bahkan Anas mengibaratkan duetnya dengan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai 'duet maut'. "Kalau saja acuan usia muda itu dibawah 50 tahun, susunan kepengurusan 70 persen kaum muda. Dan, kami ingin menegaskan, duet Anas dan Ibas itu kalau ibarat Piala Dunia duet maut," kata Anas saat mengumumkan kepengurusan DPP PD 2010-2015 di Kantor DPP PD Jakarta Timur, Kamis (17/6).

KR-M Mukhlis

Anas Urbaningrum dan Edhie Baskoro Yudhoyono.

Anas menyatakan, meski banyak orang yang masuk dalam kepengurusannya, namun sudah memiliki tujuan yang jelas. Sebab dalam susunan kepengurusan itu terdapat 130 orang yang menduduki posisi mulai dari ketua umum sampai sekretaris-sekretaris departemen. "Ini bukan struktur yang gemuk dan bersifat lamban, tetapi struktur yang besar dengan tupoksi (tujuan pokok dan fungsi) yang jelas," tandasnya.

*Bersambung hal 7 kol 1

TAK DIANGGARKAN DALAM

Pemerintah Tolak Dan

JAKARTA (KR) - Partai Golkar harus berbesar hati menerima sikap pemerintah yang kukuh menolak usulan dana aspirasi atau alokasi khusus per-daerah pemilihan (DAK Dapil). Pasalnya, tidak ada peluang penganggaran dana aspirasi itu dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2011.

"Tidak (ada peluang), karena itu tidak jadi topik yang akan jadi dasar penyusunan nota keuangan yang akan dibacakan Presiden pada Agustus nanti," tegas Menkeu Agus Martowardoyo di gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (17/6).

Dijelaskan, usulan dana aspirasi yang menjadi catatan Panja Penyusunan RKP 2011 itu tidak akan ditindaklanjuti. Sebab catatan itu sudah diklarifikasi dan memang dari hasil Panja tidak dibahas dan tidak diputuskan. "Jadi tidak ditindaklanjuti, karena sudah selesai. Empat Panja yang melaporkan menyebut bahwa itu kalau didiskusikan catatan (me tapi tidak tuskan," un

Saat di menkeu J Jakarta Pu kalau pun sejak awal dianggap ada lagi tin

Apalagi, awal suda berpotensi kalau dilak takan dese berkeadila

Sebelum (Banggar) pat memb kar mengu dan pemer melalui ke layahan y pemilihan.

Nelson Mandela, Batik dan Piala D

Laporan Asep Sandi

Saat itu Presiden Afsel yang juga pim-

PPDB dan SBI

Sambungan hal 1

Mereka harus 'bertarung' menggunakan 'senjata' NUN (Nilai UN) untuk mendapatkan sekolah yang sekiranya sesuai dengan NUN yang dimiliki. Untuk itu, mereka harus menunggu hingga waktu penerimaan peserta didik baru (PPDB) tiba, yaitu tanggal 7 Juli Pukul 8.00 – 13.00 secara *online* dan rencananya diumumkan tanggal 8 Juli Pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, banyak siswa yang NUN-nya tinggi saat masuk di suatu sekolah ternyata daya serapnya tidak lebih baik dari siswa yang lebih rendah NUN-nya. Oleh sebab itu, menggunakan NUN sebagai satu-satunya filter masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sebaiknya perlu dikaji ulang. Filter PPDB mestinya menggunakan sarana lain seperti nilai raport dan tes masuk. NUN dapat dijadikan dasar pertimbangan terakhir, sebagaimana persyaratan seleksi sekolah berstandar Internasional (SBI).

Untuk menjawab ketidakpastian penantian dalam mendapatkan sekolah bagi para lulusan, beberapa SBI 'secara bijak' telah mendahului pelaksanaan PPDB. Hal ini menupakan solusi bagi siswa SLTP yang bernilai kurang kompetitif, yaitu yang ber-NUN 30-33 (rata-rata sekitar 8), karena batas minimal keberterimaan (*passing grade*) SMA Negeri tahun lalu adalah 33 ke atas. Lulusan ber-NUN di bawah itu pada umumnya ber-*gambling* untuk mengikuti PPDB SBI dan jika ternyata tidak diterima baru menempatkan diri mendaftar di sekolah swasta yang sesuai dengan NUN yang dimiliki.

Berdasarkan ilustrasi di atas, dapat dikatakan bahwa sistem PPDB di Indonesia sudah semakin tertata. Namun demikian, yang masih perlu segera dibenahi adalah sistem penyelenggaraan program belajarnya. SBI misalnya, memang termaktub dalam Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memerlukan pendampingan dan pengawasan dari berbagai elemen. Seperti pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah agar pelaksanaannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan tentunya dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut. Mengingat bahwa SBI merupakan wujud implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) yang telah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan secara implisit 'diizinkan' untuk menggalang dana dari masyarakat (Pasal 46), terutama dari orangtua siswa.

Sehubungan dengan penarikan dana dari orangtua peserta didik yang sifatnya variatif (tergantung kebutuhan sekolah masing-masing) dan upaya peningkatan mutu SBI yang mestinya lebih berkualitas dan memiliki posisi tawar lebih dari sekolah konvensional, *quality control* perlu dilakukan secara konsisten agar tujuan program pendidikan di SBI benar-benar tercapai. Pengawasan hendaknya dilakukan oleh para pemangku kepentingan terhadap proses PPDB, sistem pembelajaran (termasuk pengembangan kurikulum dan materi ajar yang sesuai dengan tuntutan global) dan penilaian hasil belajar, serta keberlanjutan lulusan SBI yang bersangkutan. Pengawasan terhadap keberlanjutan lulusan dilakukan dengan cara memonitor keberlanjutan studi atau pun tingkat keberterimaan lulusan di pasar kerja.

Dalam hal ini, sudah semestinya lulusan SBI diupayakan untuk lebih berkualitas dibanding dengan lulusan sekolah konvensional. Jika tidak, apa bedanya dengan sekolah konvensional?

(Penulis adalah praktisi pendidikan di lingkungan Kopertis Wilayah V dan UT Yogyakarta)–a

Gambar 18. Contoh Karya "Analisis"

Sabtu Pon
21 Maret 2009
24 Mulud 1942 Tahun LXIV No. 168
Kedaulatan Rakyat On Line: http://www.kr.co.id

ANALISIS

Profesionalisme Guru

Dr Hermayawati MPd

DUNIA pendidikan kita akhir-akhir ini tertimpa banyak masalah. Secara berturut-turut muncul pemberitaan yang memalukan yang menimpa oknum guru yang nasibnya justru sedang diperjuangkan. Ada kasus pencabulan, pemalsuan Penilaian Angka Kredit (PAK), ijazah ilegal hingga guru melakukan kekerasan bahkan berjudi.

Ironis. Ketika pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru melalui realisasi sertifikasi, ada banyak 'kekacauan' di sini. Upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) sebagai cermin jatidiri bangsa, terkoyak di sini. Upaya pemerintah mencetak kader bangsa yang memiliki kecerdasan tinggi, sikap mental prima, daya juang dan day saing serta nasionalis menghadapi banyak tantangan. Ironisnya, tantangan itu muncul dari oknum guru yang kurang professional.

Pada kenyataannya, data *Human Development Index* (HDI), posisi Indonesia pada tahun 2002 menduduki peringkat ke-110, 2004 ke-112 dan 2005 ke-110. Posisi daya saing Bangsa Indonesia di tengah-tengah bangsa di dunia juga masih sangat lemah. Hal ini dibuktikan dengan adanya posisi Indonesia dalam *World Economic Forum* 2003 yang menduduki peringkat ke-72 dari 103 negara. Peringkat Indonesia di bawah Finlandia (2), Singapura (12), Belanda (18), Malaysia (29), Thailand (39), Luksemburg (42) dan Filipina (56) *(Ditjen Dikti, 2006: 3)*.

Artinya, dari kondisi tersebut, Indonesia harus segera melakukan strategi baru dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas bangsa melalui pendidikan yang berkualitas. Disinilah sesungguhnya peran strategis guru dalam menghasilkan manusia masa depan yang unggul, cerdas dan kompetitif. Apalagi Undang-undang (UU) Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen dalam pasal 7 secara eksplisit menegaskan: *bahwa profesi guru merupakan pekerjaan profesional yang pada prinsipnya, di antaranya memiliki: (1) bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (2) komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) kualifikasi akademik dan*

"Bersambung hal 31 kol 1

Profesionalisme Guru

Sambungan hal 1

latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) kompetensi dalam bidang tugasnya; serta (5) tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya. Implikasinya, seorang guru harus profesional dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini juga dituntut oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang merupakan wadah aktivitas guru secara umum (*KR, 26/11/2008: 6*).

Jika dihubungkan dengan fenomena di atas, jelas bahwa masih banyak guru yang belum memahami tugas. Faktanya, hasil pantauan tahun 2007 menunjukkan bahwa hanya 30 % kepala sekolah dan guru SD hingga SMTA (dari skala nasional) yang memahami Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan (SISKL) yang telah diluncurkan Depdiknas sejak tahun 2006 (*KR, 3/3/2009: 16*). Ini berarti bahwa masih banyak guru tidak proaktif dalam menyikapi perubahan atau pengetahuan. Apakah guru yang tidak proaktif terhadap perubahan atau perkembangan pengetahuan dapat disebut profesional?

Untuk profesional, guru dituntut memiliki pengetahuan menyangkut psikologi pendidikan dan kompetensi mengajar, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Menurut UU Guru/Dosen, pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Penguasaan psikologi pendidikan memungkinkan guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar (PBM), baik di dalam maupun di luar kelas secara ideal. Faktanya, banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa guru (dan dosen) belum melakukan sistem pengajaran secara normatif.

Faktor inilah yang ditengarai membuat siswa bosan belajar. Tragisnya, ketika siswa memunculkan perilaku jujur, guru naik pitam dan menghukum secara fisik. Hal ini pulalah yang kemungkinan besar menjadi penyebab utama rendahnya kualitas hasil pendidikan di Indonesia. Padahal aktivitas belajar tidak akan membosankan jika guru benar-benar menguasai metodologi pengajaran. Sehingga ia mampu memilih metode yang dipandang cocok dengan situasi dan kondisi siswa pada saat belajar.

Penguasaan metodologi pengajaran akan mampu pula memilih hadiah (*rewards*) dan hukuman (*punishments*) secara tepat dan bersifat mendidik. Bukan sebaliknya. Misalnya, siswa lupa tidak mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran tertentu, dihukum dengan menyuruh ia melakukan *push up* berkali-kali, menyanyi dan menari di depan kelas, membersihkan WC, menyapu kelas selama beberapa hari dan sebagainya. Hukuman yang tak ada hubungannya dengan upaya peningkatan kualitas belajar dan mengajar. Akibatnya? Siswa takut atau membenci gurunya sehingga ia memilih membolos. Kalau demikian, siapa yang salah?

Seharusnya, hukuman bagi siswa bersifat mendidik dan relevan dengan bidang studi yang diajarkan. Misal ketika, siswa SLTP/SMTA terus menerus tidak memperhatikan pelajaran Bahasa Indonesia di kelas, diminta keluar ke perpustakaan untuk membaca dan meringkas suatu artikel. Aktivitas tersebut dapat mengembangkan kompetensi menulis dan tidak menimbulkan depresi pada siswa. Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan tersebut di atas, solusinya, pengawasan pendidikan perlu benar-benar ditingkatkan. Selain itu, guru juga sudah saatnya mawas diri.

Pertanyakan pada diri kita: *"Sudahkah kita profesional?"* dan *"Sudah pantaskah kita menerima tunjangan profesional?"* Jawabnya tentu ada dalam diri kita!

(Penulis adalah dosen Kopertis V Dpk pada Universitas Mercu Buana Yogyakarta)-n

Gambar 19. Contoh Karya "Analisis"

Jumat Pahing
3 Juli 2009
10 Rejeb 1942 Tahun LXIV No. 269
http://www.krjogja.com

ANALISIS

TKI dan UU PTPPO

Dr Hermayawati MPd

SITI Hajar, mungkin menjadi 'sumbu ledak'. Kasus yang menimpa perempuan asal Garut sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di Malaysia itu kian membuka mata banyak pihak. Tuntutan terus diserukan. Sehingga Pemerintah RI untuk sementara menghentikan pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) ke Malaysia. Sekalipun ini bukan kasus pertama yang terjadi dan menimpa TKW Indonesia di Malaysia. Mungkin belum lepas ingatan kita akan kasus Nirmala Bonat dan juga masih banyak yang lain.

Kasus Siti Hajar memang telah mendapatkan perhatian dari berbagai pihak termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY-pun berjanji akan segera membangun sistem deteksi dini untuk mencegah sekaligus melindungi para TKW yang mengalami perlakuan kekerasan oleh majikan. Demikian pula Organisasi Buruh Internasional (ILO), mengharapkan agar pemerintah memantau keberadaan WNI di luar negeri (*KR, 12/6/2009*). Imbauan serupa juga disampaikan Persatuan Wanita Cina Malaysia (MCA) agar agen pengerah jasa PRT lebih bertanggung jawab dalam memantau nasib mereka di luar negeri (*KR, 16/6/2009*).

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan praktik demi peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya dengan memanfaatkan kesempatan kerja internasional yang tersedia (*Depnakertrans, 2003*). Program TKI sebenarnya bertujuan mulia, yaitu menyejahterakan TKI

*Bersambung hal 27 kol 3

TKI dan UU PTPPO . . . . . Sambungan hal 1

dan keluarganya. Program ini secara finansial menangguk devisa secara signifikan. Berdasarkan Nilai Pembayaran Indonesia (NPI) BI, remitansi (*remittance*) TKI tahun 2007 mencapai lebih dari Rp 6,0 triliun. Tahun 2008 mencapai Rp 2,5 triliun (*Kompas, 18/6/2009*). Di sini terdapat penurunan penerimaan devisa sebagai akibat deportasi serta adanya moratorium penempatan TKI karena berbagai permasalahan yang ada.

Menurut Menteri Luar Negeri Hassan Wirajudha, 80 % permasalahan TKI ada di dalam negeri, karena kurang optimalnya peran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Oleh sebab itu, selama permasalahan itu belum dibenahi, TKI akan selalu menghadapi permasalahan di luar negeri seperti: penganiayaan, deportasi, depresi dan bunuh diri yang terjadi di Malaysia, Singapore dan Timur Tengah. Jika pemerintah pernah melakukan moratorium (penangguhan) penempatan TKI ke Arab Saudi pada tahun 2006, moratorium penempatan khusus PRT untuk Malaysia juga dilakukan sejak 26 Juni 2009 lalu (*KR, 26/6/2009*).

Fenomena kekerasan terhadap TKI, rupanya tidak membuat jera mereka. Siti Hajar misalnya, mengatakan masih ingin kembali bekerja di luar negeri meskipun telah mengalami tindak kekerasan selama bertahun-tahun, demi menghidupi keluarga terutama kedua anaknya. Selain itu, sekitar 80 % TKI asal Brebes (dari total 20 ribu orang) adalah ilegal. Menurut Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jamaludin, keadaan ini menyebabkan sulitnya pemantauan. Apalagi, mereka rata-rata berpendidikan rendah, usia dini, dan tidak memiliki keahlian (*Tempo, 30/5/2009*))

Besarnya animo menjadi TKI menunjukkan sulitnya mendapat pekerjaan di dalam negeri, sehingga mereka memilih ke luar negeri. Sejak tahun 2008 ada sejumlah 60.000 TKI dan hingga kini baru ditempatkan 17.000 orang, 12.000 di antaranya adalah perempuan. Sementara itu, 4.300 TKI ilegal dipulangkan dari Asia Pasifik dan Timur Tengah (*Kompas, 18/6/2009*). Hal ini menunjukkan bahwa TKI sungguh merupakan permasalahan yang kompleks. Betapa tidak? Kemiskinan di Indonesia saat ini mencapai 46 %. Pengangguran intelektual mencapai 900.000 orang sarjana (*KR, 24/6/2009*). Bagaimana dengan pencari kerja berpendidikan SLTA ke bawah?.

Permasalahan TKI sering dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), terutama Pasal 1. Menurut Pasal 1, PO adalah: *"tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi"*.

Terbitnya UU PTPPO merupakan akibat 'mandulnya' Pasal 297 KUHP yang mengancam pidana kurungan 6 tahun bagi sindikat PO, dengan sasaran mayoritas perempuan dan anak-anak. Pasal tersebut dipandang tidak efektif untuk menjerat mereka. Jaringan kejahatan baik antarnegara, maupun di dalam negeri, semakin marak. Indikasinya, akhir-akhir ini banyak anak hilang, di samping ada TKI yang mestinya sudah kembali ke kampung halaman akibat deportasi atau pun telah habis kontrak kerja, ternyata tidak sampai di rumah. Ini berarti ada kasus 'pembelokan' TKI. Contohnya, pada saat pemulangan 4.300 TKI ilegal dari Asia Pasifik dan Timur Tengah tahun 2008 lalu, 250 orang dari Jawa Timur hanya sampai di rumah sejumlah 190 orang. Artinya, 60 orang 'hilang di jalan'. Dalam hal ini, UU PTPPO dapat menjadi landasan bagi masyarakat, bangsa dan negara, dalam rangka memerangi kejahatan PO serta penghormatan terhadap hak azasi manusia, jika diimplementasikan secara sinergis.

Hemat penulis, permasalahan TKI yang selama ini terjadi terutama disebabkan oleh: lemahnya persiapan penempatan TKI, terutama sistem perekrutan dan pelatihannya, tidak adanya sistem monitoring terpadu, baik bagi TKI legal maupun ilegal dan lemahnya komitmen antarlembaga pemangku kepentingan dalam mencegah dan melindungi TKI di luar negeri. Bagaimana pun, mereka adalah anak bangsa dan warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan di mana pun mereka berada. Kalau mereka sudah disebut sebagai 'pahlawan devisa' dan mengirimkan remintensi yang tidak sedikit, seharusnya pengawasan dan perlindungan harus dimulai sejak awal. Dalam hal ini tentu lembaga daerah asal TKI, karena lembaga inilah yang paling paham terhadap identitas warganya. Pengawasan yang dilakukan secara serius akan mencegah terjadinya PO melalui pembelokan niat kerja, pemalsuan identitas, baik yang dilakukan oleh sindikat maupun keluarga yang bersangkutan. Untuk itu, sistem deteksi dini untuk pencegahan dan perlindungan TKI mestinya mengarah pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Jangan biarkan 'pahlawan devisa' itu merana bahkan mati sia-sia.

(Penulis adalah Dosen Kopertis Wil V dpk pada Univ Mercu Buana Yogyakarta)-n

Gambar 20. Contoh Karya "Analisis"

Sabtu Pahing
20 November 2010
13 Besar 1943
Tahun LXVI No. 54
Harian Pagi 32 Halaman
Harga Eceran Rp. 3.000
http://www.krjogja.com. www.kr.co.id

Analisis
Sumiati dan Pendidikan TKI

Oleh
Dr Hermayawati MPd

BIADAB! Kata itulah yang tepat ditujukan pada penganiaya Sumiati, TKW asal Dompu Nusa Tenggara Barat yang bekerja di Madinah Saudi Arabia sejak Juli 2010 lalu. Sumiati kerap disiksa bahkan digunting bibir cantiknya (*KR, 18/11/2010*). Bukan itu saja. Gadis cantik itu juga sering disiksa, sekujur tubuhnya penuh luka karena diseterika bahkan kulit kepalanya sampai mengelupas dan kakinya nyaris lumpuh!

* Bersambung hal 7 kol 1

Sumiati . . . . . Sambungan hal 1

Ini bukan peristiwa pertama. Peristiwa semacam itu sudah berulangkali terjadi tetapi nyatanya tetap tidak menyurutkan niat para pencari kerja yang mayoritas wanita (TKW). Ironisnya seakan pemerintah belum mampu berbuat sesuatu secara signifikan untuk menuntaskan masalah penganiayaan yang sering menimpa TKI, terutama di Malaysia dan Saudi Arabia.

Harus diakui bahwa permasalahan tenaga kerja di luar negeri jauh lebih sering menimpa TKW berpendidikan rendah. Artinya, level pendidikan memang mempengaruhi pembawaan, perilaku atau kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang pastinya masih asing bagi para TKI.

Tanpa mengurangi rasa keprihatinan kita terhadap permasalahan kekerasan terhadap TKI, sebenarnya kita juga harus berintrospeksi diri. Jangankan hidup satu atap dengan bangsa lain yang jelas-jelas memiliki perbedaan budaya, cara pandang, kebiasaan dan sebagainya yang sulit diadaptasi. Hidup seatap dengan bangsa atau bahkan keluarga sendiri pun terkadang memerlukan kesabaran yang tinggi.

Atas dasar berbagai alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka segala permasalahan menyangkut penganiayaan TKI sudah seharusnya disikapi secara wajar dan normatif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut memang tidak semudah membalik tangan. Hemat penulis, moratorium (penangguhan) atau pun penghentian pengiriman TKI sekalipun tidak akan menyelesaikan masalah karena masalah pengangguran para intelektual dalam negeri pun belum teratasi apalagi pengangguran non-intelektual.

Jadi, selama masalah pengangguran dalam negeri belum dapat diatasi, fenomena TKI adalah keniscayaan. Oleh sebab itu, yang perlu diupayakan segera, adalah pembekalan para calon TKI oleh lembaga terkait yang bertanggungjawab terhadap pengiriman TKI ke luar negeri.

Harus diakui bahwa selama ini, pemerintah belum signifikan memberikan pelatihan kepada para calon TKI, terutama TKW yang berpendidikan rendah dan memerlukan bekal keterampilan dan pendidikan kepribadian yang lebih intensif daripada mereka yang lebih tinggi pendidikannya. Untuk itu, sebenarnya yang perlu dibenahi adalah mempersiapkan mereka sebaik-baiknya melalui pelatihan yang lebih intensif dan serius oleh PPTKIS atau pun lembaga lain di bawah naungan Kemenakertrans. Panitia ad-hoc menurut hemat penulis bisa saja dibentuk dan mungkin dapat mengatasi masalah sesaat. Bagaimana solusi ke depannya? Pelatihan atau pendidikan yang mendalam, tentunya dengan mengajak lembaga lain yang lebih berkompeten di bidang pendidikan dan keterampilan. Kiat beberapa perguruan tinggi yang membuka jurusan atau program studi TKI perlu diacungi jempol dan perlu didukung oleh pemerintah. Semoga dengan demikian tidak akan lagi muncul penganiayaan yang menggemparkan itu.

(Penulis adalah Dosen Kopertis Wilayah V dan Sekretaris LPPM UMBY)-f

Gambar 21. Contoh Karya "Analisis"

Senin Pon
10 Mei 2010
26 Jumadilawal 1943 Tahun LXV No. 217

ANALISIS

Program UN Ulangan

Dr Hermayawati MPd

PENGUMUMAN ujian nasional (UN) SMA maupun SMP telah lewat. Hasilnya? Semua tentu tahu, bisa dikatakan kurang menggembirakan. Realita inilah yang telah memunculkan keprihatinan. Upaya memotivasi siswa agar lebih percaya diri (PD) dalam menempuh UN ulangan terus dipompakan.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X bahkan mengungkap keyakinannya bahwa soal UN ulangan tidak mungkin sesulit UN sebelumnya. Konon, karena jika bobot kesulitan soalnya sama maka mereka akan gagal lagi. Logika tersebut memang bisa saja terjadi secara faktual terutama jika ujian tersebut dimaksudkan untuk mendongkrak kelulusan. Masalahnya, bagaimana jika dipandang dari sudut keadilan (*fairness*) terhadap para siswa yang telah lulus terlebih dulu, terutama dengan skor yang relatif minimal? Adilkah jika para pengulang UN ternyata memperoleh soal yang lebih (di)mudah(kan) hanya sekadar untuk mengejar target kelulusan?

*Bersambung hal 27 kol 1

Program UN Ulangan

Sambungan hal 1

Pada hemat penulis, baik bobot kesulitan maupun kisi-kisi soal untuk semua mata uji seharusnya sama dengan UN utama. Selain untuk menghindarkan inkonsistensi tujuan utama penyelenggaraan UN, yaitu meningkatkan kualitas peserta didik sesuai dengan jenjang masing-masing, hal itu juga demi menjaga sikap *unfairness* penyelenggara terhadap para lulusan UN utama. Bukankah di antara mereka banyak pula yang ingin mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki skor mata ujian yang belum memuaskan? Apalagi jika Nilai UN masih digunakan sebagai filter masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misalnya dari SD ke SLTP dan SLTP sederajat ke SLTA.

Ada hal penting lain yang perlu dievaluasi menyangkut penyelenggaraan UN, yaitu masalah taraf kesulitan dan keotentikan mata ujian bahasa, khususnya Bahasa Indonesia untuk tingkat sekolah lanjutan atas yang ternyata hasilnya jeblok dan paling mengganjal kelulusan siswa (*KR*, *28/4/2010*). Sangat disayangkan bahwa sebagian besar peserta UN yang notabene penutur asli Bahasa Indonesia harus mengalami kegagalan dalam mata ujian tersebut. Apa pun alasannya (termasuk peserta UN terkecoh oleh SMS kunci jawaban palsu), hal itu tidak seharusnya terjadi. Oleh sebab itu, langkah Mendiknas Mohammad Nuh untuk mengevaluasi pelaksanaan UN dengan menerapkan kebijakan khusus pada semua sekolah yang gagal meluluskan semua siswanya serta mengevaluasi penyebab jebloknya hasil UN patut didukung oleh semua pemangku kepentingan.

Evaluasi terutama menyangkut jebloknya hasil UN Bahasa Indonesia (yang mestinya dapat meningkatkan skor keseluruhan) perlu segera dilakukan dan jika telah ditemukan penyebabnya, hendaknya segera diadakan perbaikan. Ada beberapa kemungkinan yang dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi penyebab permasalahan tersebut di atas, di antaranya sebagai berikut. *Pertama*, peserta UN kurang percaya diri sehingga dapat terkecoh oleh keberadaan kunci jawaban yang beredar (meskipun mereka sudah diingatkan oleh berbagai pihak untuk tidak mempercayainya). *Kedua*, peserta UN kurang siap dalam menghadapi mata ujian Bahasa Indonesia. *Ketiga*, peserta menganggap enteng mata ujian tersebut karena merasa telah menguasai Bahasa Indonesia secara komunikatif. *Keempat*, bobot soal terlalu sulit (proporsi butir soal yang bertaraf kesulitan tinggi, sedang dan mudah tidak seimbang). *Kelima*, butir-butir soal tidak menampilkan penggunaan bahasa secara faktual dan komunikatif (*language use*) sebagaimana digariskan dalam konsep atau hakikat pembelajaran bahasa yang sesungguhnya.

Kelima aspek tersebut di atas perlu segera dicermati dan diantisipasi bukan hanya untuk kepentingan UN ulangan di tingkat lanjutan atas saat ini, melainkan juga untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi pada masa mendatang dan untuk mengantisipasi kegagalan pada jenjang pendidikan di bawahnya. Sekadar mengingatkan para perancang soal ujian bahasa, bahwa tujuan utama pengajaran bahasa adalah untuk meningkatkan kemampuan komunikatif pembelajarnya, baik secara lisan maupun tulis. Pada kenyataannya, seringkali dijumpai soal yang tidak mengukur penguasaan kemampuan siswa dalam berbahasa atau dalam menggunakan bahasa tersebut secara natural tetapi justru mengukur penguasaan siswa terhadap pola-pola bahasa (*language usage*) yang sesungguhnya tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Harus diakui, hasil UN Bahasa Inggris sejak tiga dekade belakangan ini relatif lebih baik dari hasil UN Bahasa Indonesia, baik pada level SLTP maupun SLTA. Ironis memang, namun hal ini perlu dikaji mendalam terutama oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Bukankah Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional bahkan adalah Bahasa Ibu (sebagian besar) siswa kita? Mengingat posisi dan hakikat pengajarannya, tidak semestinya mata pelajaran Bahasa Indonesia justru menjadi pengganjal kelulusan siswa. Tentunya masalah ini merupakan 'PR' dan tantangan bagi para pemangku kepentingan terkait.

(Penulis adalah praktisi pendidikan di lingkungan Kopertis Wilayah V dan UT Yogyakarta)-b

Gambar 22. Contoh Karya "Analisis"

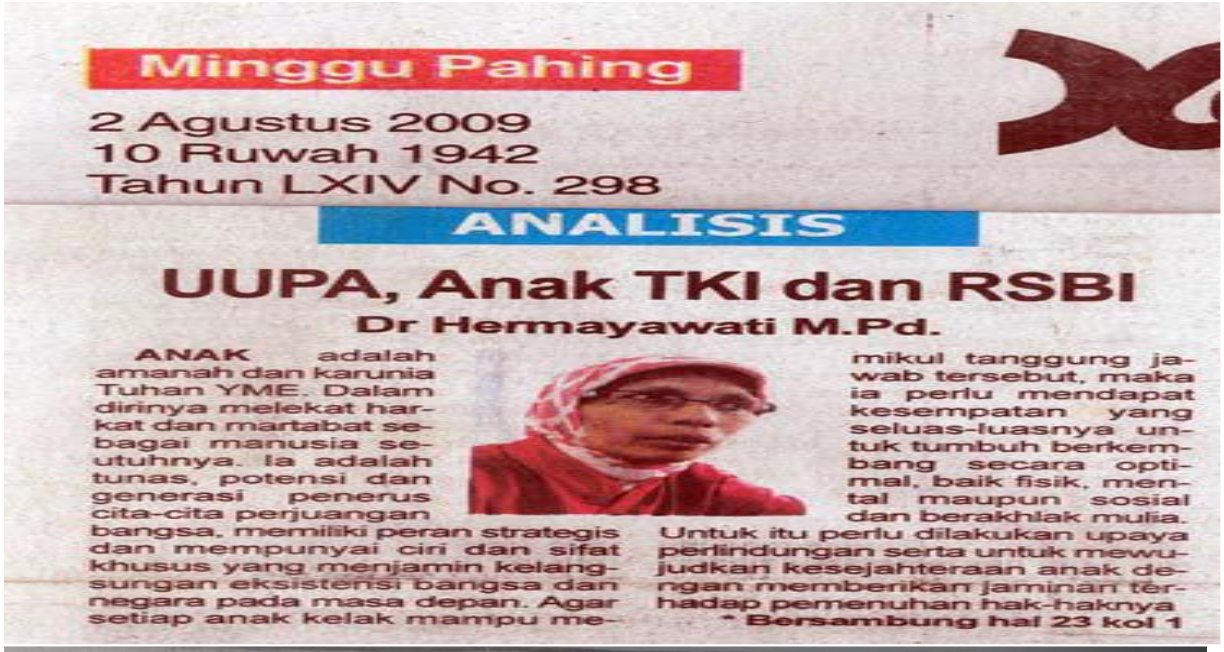

Minggu Pahing

2 Agustus 2009
10 Ruwah 1942
Tahun LXIV No. 298

ANALISIS

UUPA, Anak TKI dan RSBI

Dr Hermayawati M.Pd.

ANAK adalah amanah dan karunia Tuhan YME. Dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Ia adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya

* Bersambung hal 23 kol 1

UUPA, Anak TKI

Sambungan hal 1

serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Untaian kalimat tersebut di atas termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Ironisnya hingga saat ini dan entah sampai kapan, anak masih terus menjadi korban. Dari penganiayaan fisik, pemerasan, hingga terabaikan hak-haknya sebagai anak yang lemah. Betapa tidak? Orangtua yang mestinya sebagai tempat berlindung paling aman pun tanpa belas kasih membunuh, menganiaya, mengeksploitasi bahkan menjual. Bukan itu saja. Penganiayaan juga terjadi dengan mengatasnamakan sekolah, baik oleh oknum guru atau pun sesama teman dengan dalih kegiatan MOS sebagaimana terjadi di Surabaya belum lama ini.

Sementara puluhan ribu anak terabaikan hak-hak mereka untuk memperoleh pendidikan. Sebagai contoh, sekitar 36 ribu anak buruh migran (TKI) di Sabah Malaysia konon terpaksa tidak bersekolah karena dianggap pendatang ilegal yang tidak memiliki paspor dan akta kelahiran (Tempo, 25/7/ 2009). Sekalipun pemerintah telah mengirim guru-guru kontrak untuk mengajar mereka, jumlahnya tentu saja masih jauh dari ideal. Jumlah tersebut baru yang tercatat di Sabah. Bagaimana dengan anak-anak TKI yang telantar dan tidak teridentifikasi di tempat lain?

Artinya, harus diakui implementasi UUPA masih "nihil" dan jelas belum tersosialisasi secara signifikan meski sudah diundangkan sejak tahun 2002. Ironisnya fakta ini bahkan terjadi di berbagai lembaga yang berkaitan langsung dengan pendidikan anak. Seakan UUPA hanya sebatas produk hukum yang tidak perlu ditindaklanjuti dengan pengawasan dalam implementasinya di masyarakat baik secara individual maupun kelembagaan.

Setiap undang-undang mestinya tidak hanya berhenti pada taraf merencanakan (planning) dan menyusun atau mengatur (organizing). Namun juga ada tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaannya di lapangan (actuating) dan pengawasannya (controlling). Berbagai kasus di atas jelas menunjukkan kurang perhatian berbagai pihak terkait dalam ikut serta menyosialisasikan UUPA dan dalam rangka meringankan penderitaan anak yang notabene aset bangsa.

Pengabaian hak-hak anak terutama menyangkut hak memperoleh pendidikan yang layak harus segera ditindaklanjuti secara serius dengan mengutamakan penyediaan kesempatan pendidikan yang benar-benar adil dan merata. Jika melihat kenyataan tersebut di atas, alih-alih pendidikan merata, gratis sebagaimana diharapkan dalam program wajib belajar (wajar) 9 tahun. Anak-anak TKI yang ditinggal orangtua mereka untuk 'berjuang demi devisa dan menyejahterakan keluarga', seringkali terabaikan pendidikannya.

Apapun alasannya, hal itu tentu tidak dapat dibenarkan karena menyimpang dari ketentuan berbagai pasal dalam UUPA, terutama pasal 4 yang menyebutkan : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan pasal 9: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Jika terus dibiarkan, keadaan itu dapat menjadi 'bumerang' bagi Bangsa Indonesia di kemudian hari.

Ada yang terasa diskriminatif ketika pemerintah terus mengembangkan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang kini semakin pesat sehingga menyedot dana stimulan dalam bentuk block grant yang pada tahun 2009 ini mencapai Rp 300 juta. Di DIY saja, saat ini terdapat 26 RSBI, dengan rincian SD 4 sekolah, SLTP 7 sekolah dan SLTA 15 sekolah (Kompas, 25/7/2009). Belum di kota lain. Sebenarnya, Pasal 50 Ayat (2) UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 61 Ayat (1) PP 19/2005 tentang Standar Pendidikan Nasional hanya mengamanatkan adanya satu RSBI di setiap Kota/Kabupaten untuk setiap jenjang pendidikan. Keberadaan RSBI yang terus berkembang, tentunya menyedot dana yang tidak sedikit, padahal efektivitas hasil pendidikannya masih dipertanyakan. Ironisnya, masih banyak anak bangsa yang terabaikan haknya untuk mengenyam pendidikan, jangankan yang berstandar internasional. Berstandar lokal pun belum mereka rasakan. Hingga saat ini masih banyak keluhan orangtua siswa tentang biaya sekolah yang dirasa berat, terutama di sekolah swasta.

Persoalan pemerataan pendidikan terutama pada level SD hingga SLTA sebaiknya lebih diutamakan daripada menambah kuantitas RSBI yang masih belum jelas hasilnya. Demikian pula, permasalahan sosialisasi dan implementasi UUPA hendaknya segera dilakukan secara sinergis antarlembaga pemangku kepentingan guna memberikan kesadaran kepada berbagai pihak agar ikut serta bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan sesuai dengan hak yang melekat pada anak. Hal itu perlu dilakukan, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang mau tidak mau harus mendapat perlakuan yang sama, anak siapapun dia.

Ada benang merah antara sosialisasi dan implementasi UUPA, penyediaan pendidikan bagi anak termasuk (anak TKI) dan pembatasan kuantitas RSBI khususnya untuk saat ini. Sosialisasi UUPA tentu saja harus dilakukan secara intensif melalui berbagai media cetak dan elektronik yang ada selain melalui jalur struktur organisasi pemerintah maupun masyarakat. Jika sosialisasi telah berjalan dengan baik, diharapkan berbagai pihak yang bersangkutan akan mengimplementasikan amanat UU tersebut. Pendidikan anak TKI (dan anak-anak lain yang telantar) wajib dilakukan sebagaimana pelaksanaan pendidikan pada umumnya. Artinya, pemerintah tidak hanya mengirimkan guru bagi mereka tetapi termasuk memperhatikan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Kuantitas RSBI saat ini sebaiknya dibatasi, mengingat berbagai hal sebagai berikut: (1) belum meratanya penyediaan dana pendidikan terutama bagi anak-anak yang masuk kategori wajib belajar; (2) efektivitas hasil lulusan RSBI belum teruji sehingga terkesan pemborosan dana; (3) profesionalisme guru dalam mengajarkan bidang studinya dalam Bahasa Inggris dapat menimbulkan kesalahan persepsi dalam pembelajaran konsep (conceptual mismatch). Sementara itu, jika bahasa pengantarnya Bahasa Indonesia, apa bedanya dengan kelas reguler?; (4) RSBI dalam satu lingkup sekolah atau pun sekolah yang berdekatan dapat menimbulkan jurang perbedaan karena adanya rasa superior bagi siswa kelas RSBI dan rasa inferior bagi siswa kelas reguler. Padahal, keunggulan posisi tawar (bargaining position) lulusan RSBI masih perlu dipertanyakan. *(Penulis adalah Dosen Kopertis Wilayah V Dpk pada Univ. Mercu Buana Yogyakarta)-e*

Gambar 23. Contoh Karya "Analisis"

Jumat Pahing
18 Februari 2011
14 Mulud 1944
Tahun LXVI No. 139

http://www.krjogja.com. www.kr.co.id

Analisis
TKI, Problem dan Remitansi

Dr Hermayawati

PEMULANGAN tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terlantar telah dimulai. Tahap pertama, 240 orang TKI dan WNI *overstayers* telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin, 14/2/2011 yang lalu dengan pesawat Garuda dari Jeddah. Sedangkan gelombang kedua, Selasa 15/2/2011 lalu dipulangkan sebanyak 336 orang WNI/TKI yang terdiri dari 302 orang dewasa perempuan, 15 anak-anak, dan 19 bayi. Di antara 302 TKI perempuan yang tercatat dewasa, terdapat 13 TKI yang ketika diberangkatkan ternyata masih di bawah umur.

Biaya pemulangan mereka seperti tiket pesawat terbang dari Jeddah ditanggung negara melalui Kemenlu RI. Sedangkan dari Bandara Soekarno-Hatta ke kampung halaman masing-masing dibiayai oleh negara melalui BNP2TKI. Konon mereka diberangkatkan dari Bandara King Abdul Azis, Jeddah dengan pesawat Garuda Indonesia (GA 981). Kamis (17/2) pukul 19.50 waktu setempat dan tiba di Terminal II Bandara Soekarno-Hatta, Jumat pukul 09.50 WIB. Para WNI/TKI tersebut berasal dari Jawa Timur (sebagian besar Madura), Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Banten, serta Sulawesi Selatan. Kepulangan mereka di Terminal II Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, dijemput oleh Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat bersama sejumlah pejabat dari Kemenko Kesra, Kemenlu, Kemenakertrans, dan instansi terkait.

Meski banyak permasalahan TKI yang muncul di Arab Saudi, kalangan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) masih akan terus merekrut dan menempatkan calon TKI ke negara tersebut.

* Bersambung hal 7 kol 1

TKI, ...

Sambungan hal 1

Hal ini dilakukan karena pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum melakukan penyetopan atau penghentian terhadap pengiriman TKI dari kalangan PPTKIS Indonesia. Atas dasar pertimbangan tersebut BNP2TKI tetap akan menempatkan tenaga kerja ke negara penghasil minyak terbesar itu. Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan Kepala BNP2TKI untuk melakukan pengetatan terhadap prosedur penempatan TKI khususnya Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke luar negeri.

Permasalahan TKI terutama PLRT sesungguhnyalah sangat kompleks dan jelas sarat dengan masalah, apalagi jika persyaratan rekrutmen tidak dilakukan secara ketat. Penanganannya tentu harus dilakukan sistemik. Artinya, melibatkan berbagai komponen terkait seperti: keluarga, lembaga rukun tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan setempat, petugas rekrutmen, PPTKIS, BNP2TKI dan Depnakertrans. Permasalahan sering muncul sebagai akibat dari kelengahan (atau kesengajaan?) yang dilakukan baik oleh pelaku maupun para pemangku kebijakan terkait. Pemalsuan identitas, seperti umur dituakan, ijazah, izin orangtua dan bukti legalitas keikut-sertaan (sertifikat) pelatihan merupakan aspek penting yang sering dinafikan keberadaannya oleh berbagai pihak.

Aspek lain yang paling mendominasi terjadinya permasalahan selain berbagai hal tersebut di atas adalah *etos kerja* dan *bahasa target* yang digunakan para pekerja migran di negara tujuan bekerja. Harus diakui bahwa etos kerja mayoritas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama yang berpendidikan rendah sangat mengecewakan jika dibandingkan dengan SDM dari negara-negara pengirim pekerja migran lain, seperti India, Philipina, Vietnam dan Thailand. Hal ini terbukti dari berbagai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa TKI kurang diminati jika dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara-negara tersebut di atas. Wajar saja, jika mereka akan selalu bermasalah jika tidak ditangani secara serius. Pengiriman TKI boleh saja terus dilakukan jika mengingat remitansinya yang konon mencapai triliunan per tahun bahkan kini menurut sebuah sumber terpercaya mencapai Rp 1 miliar/hari. Namun demikian, naif kiranya jika kita hanya 'menjual' manusia tanpa ketrampilan dan etos kerja yang memadai. Kita juga tidak boleh lupa bahwa di negeri orang mereka 'mewakili' bangsanya.

Inilah yang harus diperhatikan pemerintah negeri ini. Bagaimanapun juga, bangsa ini telah menikmati uang hasil remitansi TKI yang diperoleh dari cucuran keringat bahkan kadang menyabung harga diri di luar negeri. Jika sampai ratusan orang terkatung-katung di kolong jembatan negeri orang, siapa yang harus bertanggungjawab?

Ketika kiriman uang (remitansi) dinikmati, pengirimnya adalah sekelompok besar sumber daya telantar. Tegakah kita menikmati cucuran keringat anak bangsa di negeri orang yang kadang harus mempertaruhkan kehormatan dan nyawanya? Tegakah kita membangun negeri tanpa peduli terhadap mereka?

(Penulis adalah Dosen Kopertis Wilayah V DIY dan Sekretaris LPPM Universitas Mercu Buana Yogyakarta)-e

Gambar 24. Contoh Karya "Analisis"

Analisis KR

Janji Jokowi dan Kualitas TKI

Dr Hermayawati MPd

SETELAH tanggal 20 Oktober 2014, sebagai Presiden, Jokowi harus mulai melaksanakan janji-janji saat kampanye. Salah satu yang masih terngiang adalah bahwa akan meningkatkan kualitas Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Kualitas TKI terlebih tenaga kerja wanita (TKW) adalah sebuah kenyataan yang harus dihadapi Pemerintah Indonesia ketika mengirim tenaga kerja ke mancanegara. Rendahnya kualitas TKI adalah permasalahan yang dihadapi sejak diluncurkannya program TKI saat Soedomo menjadi Menaker. Namun seiring telah bergantinya sistem dan pejabat pengelola program TKI, tetap saja sistem pelatihannya jalan di tempat, belum ada perbaikan.

Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur, Minggu (20/7/2014) lalu di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Tritama Bina Karya Malang mengatakan, remitansi atau jumlah pengiriman uang ke tanah air dari TKI meningkat luar biasa yaitu mencapai Rp 500 juta perhari. Jumlah ini meningkat hingga 40% dibandingkan hari biasa. Jumlah itu belum termasuk uang tunai yang dibawa TKI atau dititipkan ke sesama TKI saat cuti atau kembali ke Tanah Air.

*Bersambung hal 7 kol 6

Jadwal Shalat Jum'at 19 September 2014 — Berlaku untuk Kota Yogya, Kab. Bantul dan Kab. Sleman

Zuhur	Asar	Magrib	Isak	Subuh
11.35	14.50	17.38	18.46	04.15

Sumber: Kementerian Agama Kanwil Propinsi DIY

Undian Berhadiah
PEMBACA Kedaulatan Rakyat 2014
BERHADIAH SEPEDA MOTOR & ELEKTRONIK
PENGIRIM
Nama
Alamat
Telp
No.KTP/SIM
(yang masih berlaku)

PEMBELAAN DALAM KASUS HAMBALANG

Anas Merasa Jadi Korban Opini

JAKARTA (KR) - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berharap, majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan putusan yang adil. Anas beralasan, selama ini dirinya telah menjadi korban opini yang sengaja dibangun untuk menjatuhkannya.

"Dari rangkaian fakta tidak terbantahkan bahwa sejak tahun 2011, terdakwa menjadi korban opini yang tujuannya adalah membangun persepsi tentang kejahatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa pada proyek Hambalang," kata Anas saat menyampaikan nota pembelaan (pledoi) dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Kamis (18/9).

Dalam pledoi yang ditulis tangan, Anas menuding bahwa persepsi dirinya terlibat korupsi Hambalang dibangun secara sistematis, dalam waktu panjang, serta dilakukan bergelombang. Seperti dalam dakwaan, seolah-olah menerima gratifikasi mobil Toyota Harrier dari Adhi Karya atas proyek Hambalang.

KR-Antara/Yudhi Mahatma

Anas Urbaningrum membacakan nota pembelaan.

Menurut Anas, persepsi yang dipaksakan dalam hal penerimaan mobil itulah yang kemudian dijadikan dasar penetapan dirinya sebagai tersangka. "Dari situ kemudian dikembangkan ke segala arah pada saat penyidikan dan akhirnya dibawa ke persidangan," katanya.

Selanjutnya, dalam proses persidangan persepsi itu juga dipaksakan ke dalam dakwaan dan ujungnya ada di dalam surat tuntutan. "Sesuatu yang bukan gratifikasi dan bukan pemberian dari Adhi Karya dipaksakan sebagai gratifikasi dan dimulai dengan cara membangun opini secara sistematis," lanjutnya. Anas juga menyebut jaksa melakukan penilaian subjektif bahwa dia dan penasihat

*Bersambung hal 7 kol 4

PENDU

Dilapo

JAKARTA (K
ruan di tubuh P
an Pembangun
makin panas de
ke Polda Metro
dudukan di kan
Jalan Diponegor
sat. Terkait hal i
Bendum PPP
yadharma Ali (S
kan, SDA berha
larang bawahan
kantor DPP PPP
"Sekarang gini
di kantor kamu
mu masuk ke ka
hal kamu adal
apakah itu salal
mu mau melapo
ta Djan di KPK J
(18/9) menang
Sekjen PPP Rom
Polda Metro Ja
dudukan kantor
Djan meng
SDA adalah dire
rusahaan dan R
anak buah. Atas
ka SDA punya h
larang anak bu
suki kantornya.

KIRAB BUDAYA PESERTA TERJUN PAYUNG M

Delegasi Australia pun T

SOLO (KR) - Prosesi kirab budaya yang diikuti atlet dan official dari 46 negara peserta kejuaraan terjun payung internasional militer atau 'World Military Parachuting Championship 2014' berlangsung meriah di Ngarsopuro dan finish di Balai Kota Solo, Kamis (18/9). Bahkan Kol Jhon Grisinger, pimpinan rombongan atlet terjun payung Jhon Grisinger.

Kirab yang diikuti 600 peserta lokal Solo dan 400 orang delegasi atlet dan official terjun payung dari berbagai belahan dunia berangkat dari Ngarsopu
met Riyadi dan
Kota Solo Ja

KR-Imong Dewanto

dipameran Indonesia International Motor Show.

Pamerkan 4 Mobil Konsep

tif pa-
Motor
angan
rlang-
h pro-
n dan
ajang
Motor

lirman
pilkan
n inisi-
ngkan
n ling-
ngem-
dalam

Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat disaksikan President Daihatsu Motor Company, Masanori Mitsui.

Keempat mobil konsep itu adalah Daihatsu Ultra Function Compact 3 (UFC-3), Daihatsu Crossover Utility Vehicle 2 (CUV2), Daihatsu Sport Utility Vehicle (SUV) Concept, dan Daihatsu Ayla GT2. Daihatsu UFC-3 merupakan mobil berkapasitas 7 penumpang yang diperkirakan menjadi multi purpose vehicle (MPV) andalan Daihatsu di masa mendatang.

Selain keempat mobil tadi, ditampilkan juga enam unit mobil model existing modification, yakni Xenia Indigo, Terios Spirit, Luxio Sloper, Gran Max Caravan dan dua unit Sirion Dress Up. Ada juga dua unit Copen, kendaraan sporty berkapasitas 600 cc, yang baru diluncurkan di Jepang pada Juni

Demokrat ..... Sambungan hal 1

"Jadi kalau ini dilanggar, PD menginginkan agar calon tersebut langsung didiskualifikasi," ujar Syarif.

Menteri Koperasi dan UKM ini menegaskan sepuluh poin itu harus dimasukkan dalam RUU Pilkada yang tengah dalam proses finalisasi di mana pembahasan tingkat I, pada 23 September dan dibawa ke pembahasan tingkat II pada 25 September. "Kalau 10 poin ini dimasukkan, secara tegas diatur, maka posisi PD memilih pilkada secara langsung, baik Gubernur, Bupati dan Walikota," katanya.

Atas sikap PD tersebut, PDIP menyambut baik. Sebab dengan sikap PD itu, jumlah fraksi yang mendukung pilkada secara langsung akan bertambah. "Pak SBY bukan mendukung PDIP. Tapi saya yakin Demokrat menangkap aspirasi publik," ujar politisi senior PDIP, Pramono Anung. **(Edi/Sim)-d**

Eddies ..... Sambungan hal 1

Namun Ina protes terhadap langkah kejaksaan yang dinilai berlebihan. Ia mengaku tidak tahu alasan atas penahanan ini. Menurutnya, kalau ingat undang-undang, seseorang dapat ditahan karena diduga melarikan diri.

Ina juga mengungkapkan tentang kliennya bila menerima nafkah dari suaminya. "Masak iya harus nanyain nafkahnya dari mana? Ini luar biasa banget," tegasnya.

Eddies Adelia sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Eddies pun berupaya untuk tabah. Sebelum diserahkan ia tiba di Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, sekitar pukul 11.40 WIB. **(Ful)-f**

Anas ..... Sambungan hal 1

hukum terjebak dalam upaya membangun persepsi.

Anas mengaku, proses persidangan terhadap dirinya sudah memasuki proses akhir. Dia berharap nota pembelaannya ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkaranya nanti. "Kami berharap putusan adil. Fakta-fakta hukum yang terungkap secara terang gamblang, luas, untuk keadilan tidak boleh berpaling dari fakta persidangan," ujarnya. **(Imd/Ful)-f**

Suara Rakyat
Kirim SMS ke 0815 797 3333

Janji ..... Sambungan hal 1

Remitansi tertinggi terutama ada di kantung-kantung TKI di Blitar, Garut dan Gunungkidul (Okezone.com, Selasa, 16 September 2014).

Remitansi yang masuk ini diharapkan akan mendongkrak daya beli dan perekonomian masyarakat di kantung TKI. Saat ini keberadaan TKI kurang lebih enam juta orang yang tersebar di 160 negara. Hal ini berarti keberadaan TKI yang bekerja di luar negeri telah membantu program pemerintah mengurangi angka pengangguran di dalam negeri sebanyak 6 juta orang. Mereka menghidupi 30 juta orang dengan rata-rata pada masing-masing dirinya dan empat anggota keluarganya sehingga tidak jatuh miskin.

Remitansi TKI telah terbukti menyebabkan *multiplier effects* seperti perekonomian yang ada di daerah menjadi hidup, pasar-pasar rakyat menjadi berkembang sehingga roda perekonomian bergerak maju. Bukti tersebut dapat dilihat terutama jika kita melalui daerah kantung-kantung TKI tersebut di atas yang telah maju pesat perekonomiannya, yang berdampak juga pada tampilan berbagai daerah tersebut. Gunungkidul misalnya, saat ini telah ědisulapí menjadi 'surga' pariwisata yang jauh tampak lebih sejuk dan nyaman dibandingkan beberapa dekade yang lalu. Wisatawan pun berdatangan yang tentunya akan menambah pendapatan daerah yang semakin menjadikan daerah yang dulu sangat gersang dan termasuk daerah kategori miskin. Kini menjadi berbanding terbalik dengan Kota Yogyakarta yang harus diakui semakin gersang, sesak dan penuh *pollutant* (partikel penyebab polusi).

Di balik kerja keras 'Pahlawan Devisa' tersebut mestinya ada upaya instansi terkait untuk serius meningkatkan harkat martabat mereka yang mayoritas perempuan itu, melalui pendidikan karakter, kepribadian serta budaya berkomunikasi yang baik. Sehingga eksistensi mereka dihormati. Selain mereka akan mampu membawa diri dan tidak dilecehkan baik oleh majikan maupun oleh sesama tenaga kerja dari negara lain. Lihat yang dari Filipina, India, Pakistan dan Vietnam yang pada umumnya lebih dihargai dan memiliki gaji yang lebih tinggi karena kepribadian mereka yang santun, menarik dan terkesan pintar. Jika mau jujur, harus diakui bahwa kepribadian TKI terutama yang berpendidikan rendah, memang dapat membuat orang lain menjadi tidak menghargai.

(Penulis adalah Dosen Kopertis Wilayah V, DPK pada Universitas Mercu Buana Yogyakarta)-d

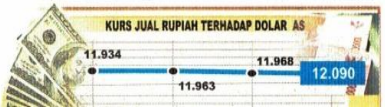

Gambar 25. Contoh Analisis dan (*News /Report*)

Analisis

Peduli Anak TKI

Dr Hermayawati MPd

MEDIA kembali santer memberitakan beberapa kasus penderitaan tenaga kerja wanita (TKW). Penganiayaan fisik bahkan sampai mengakibatkan cacat, perkosaan hingga memiliki anak, tidak dibayarkan gaji yang telah disepakati dan lainnya, kembali terungkap. Dan sejauh ini pula, belum satupun partai apalagi calon legislatif -juga calon dewan perwakilan daerah (DPD) - yang berbicara mengenai realita yang dihadapi mereka yang bekerja hingga ke luar negeri dan mayoritas perempuan tersebut.

Benarkan ini merupakan sebuah kenyataan yang harus diterima sebagai konsekuensi dari program pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI)?

Mereka adalah orang-orang yang mayoritas berpendidikan rendah, yaitu SLTP ke bawah. Dan inilah simalakama yang masih tetap harus diterima sebagai risiko pengiriman TKI terutama TKW berpendidikan rendah baik legal (di bawah pengawasan BNP2TKI) maupun ilegal (pengiriman melalui calo-calo gelap).

* Bersambung hal 7 kol 1

Jadwal Shalat Sabtu, 18 Januari 2014	Zuhur	Asar	Magrib	Isak	Subuh
	11.51	15.15	18.07	19.22	04.11

Berlaku untuk Kota Yogya, Kab. Bantul dan Kab. Sleman — Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

Bella Jalani Diet Khusus

ARTIS cantik Laudya Chintya Bella sampai saat ini masih rajin olah raga dan diet khusus. Semua itu dilakukan agar tubuhnya sehat dan tetap cantik.

Untuk asupan makanan, Bella mengonsumsi makanan atas saran dokter. "Aku lagi program detox dengan herbal dengan dokter. Makan sayur dan buah, kadang dengan oatmeal dan dicampur abon," ujar mantan kekasih Raffi Ahmad di kantor MD Entertainment di Tanah Abang Jakarta Pusat, kemarin.

Bintang film 'Di Bawah Lindungan Kabah' itu juga melakukan olahraga sebisa mungkin. Minimal melakukan lari atau jogging untuk menjaga berat tubuh idealnya.

Bella mengaku kagum dengan aktris yang masih cantik dan sehat di usia senja, salah satunya aktris senior Widya-

ANAS ANGGAP PEMERIKSAAN PRODUKTIF

Buyung Menolak, KPK Jalan Terus

JAKARTA (KR) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan perdana terhadap tersangka kasus korupsi Anas Urbaningrum. Anas diperiksa selama kurang lebih sembilan jam. Usai diperiksa, Anas mengaku kini sudah mengetahui 'proyek-proyek lain' yang menjeratnya. Sebelumnya ia sempat menolak panggilan KPK lantaran ada kata 'proyek-proyek lain'.

"Iya (sudah tahu), rincinya tentu tidak baik kalau saya sampaikan, silakan tanya ke penyidik atau kepada juru bicara," ujar Anas usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (17/1). Anas mengaku pemeriksaan kemarin berjalan sangat baik dan sangat produktif.

"Alhamdulillah proses pemeriksaan berjalan baik dan lancar saya bisa mengatakan ini sebagai proses pemeriksaan yang produktif," jelasnya. Anas disangka melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek Hambalang dan proyek lain. Di proyek Hambalang, Anas disangka telah menerima hadiah atau janji. Sedang untuk proyek lain, Anas terjerat dua proyek, yaitu di Bandung terkait proyek pembuatan vaksin dan Jawa Timur terkait pengerjaan laboratorium.

Sementara ketua tim kuasa hukum Anas Urbaningrum, Adnan Buyung Nasution justru menolak

* Bersambung hal 7 kol 1

KR-Antara

Anas Urbaningrum

RENOVA

Mantan K

YOGYA (KR) -
pala PT Kereta
Operasi (Daop) VI
Yayat Rustandi d
dari PT Daya Has
David Sianturi,
jaksaan, Kamis (1
Penahanan dila
telah pelimpahan
hap kedua kasus
novasi Stasiun Le
Kota Yogya ke Kej

Kasi Penerang
Kejati DIY Pur
dharmaji SH me
kan, Kamis kemar
Kejati DIY melimp
kas beserta baran
tersangka ke Keja
suai tempat kejad
ra. Jaksa penuntu
melakukan pena
Rutan Yogya. "Set
dilimpahkan tah
para tersangka la
tahan di Rutan Y
ma penyidikan, pa
ka tidak ditahan.

OBRAL TEMBAKAN, SATU TERLUKA

BRI Sruwohrejo Dirampok, Rp 293

PURWOREJO (KR) - Kantor BRI Unit Sruwohrejo di Desa Sruwohrejo Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo dirampok, Jumat (17/1). Enam pelaku menembakkan pistol untuk menakuti korban dan warga. Pelaku juga melukai pegawai pelayanan konsumen bernama Danang (30) warga Sruwohrejo pada bagian kepala dan berhasil membawa lari Rp 293.658.000.

Kawanan rampok berbon- sambil menodongkan senjata kepada warga. Para pelaku beraksi 5 - 10 menit, kemudian melarikan diri arah Kecamatan Grabag membawa tas punggung diduga berisi uang dan server perekam kamera CCTV milik bank.

Warga tidak mengenali para pelaku karena mereka mengenakan helm ker penutup wa ada yang kenal mun ada yang dengan kalimat

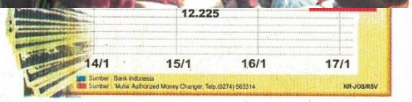

Peduli

Sambungan hal 1

Karena semua ini sesungguhnya hanya dilihat oleh negara dengan mengingat remitansinya yang cukup signifikan dalam menyumbang devisa yang tahun 2013 lalu mencapai Rp 73 triliun. Ironisnya, negeri yang dibangun dengan keringat bahkan darah dan airmata TKI ini tidak pernah memberikan perlindungan kepada mereka yang bekerja.

Pendapatan yang cukup 'menggiurkan' bagi para pencari kerja berpendidikan rendah menjadikan mereka membabibuta untuk mendapatkannya tanpa berpikir panjang. Buktinya, belum lama ini ada sejumlah 161 calon tenaga kerja wanita (TKW) 20 di antaranya adalah anak-anak di bawah umur disekap selama 3 bulan di suatu tempat di daerah Bekasi. Realita yang sesungguhnya sudah mengungkap bahwa di negara sendiri saja mudah diperdaya, bagaimana jika mereka ada di negeri orang? Dan ketika pemerdayaan hingga perkosaan itu terjadi seakan menjadi dapat dimaklumi jika banyak di antara para TKW yang pulang dengan membawa anak berwajah Timur Tengah, continental ataupun bule.

Ini adalah persoalan serius lain yang selama ini iterabaikani. Negeri ini menjadi riuh ketika ada TKI/TKW diperdaya, tidak dibayar gajinya, dianiaya, diperkosa. Namun masih sangat sedikit kepedulian terhadap anak-anak yang dilahirkan akibat perkosaan tersebut. Meski pemerintah sudah memiliki rumah penampungan khusus bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia yang disebut Rumah Peduli Anak-Anak Tenaga Kerja Indonesia (RPA TKI) yang didirikan sejak 2009 lalu di bawah pengawasan Badan Nasional Penempatan dan perlindungan TKI (BNP2-TKI), namun bagaimana mereka yang inasibi anak-anak yang dibawa pulang dan tidak mendapat tempat di penampungan tersebut?

Kelahiran anak-anak itu tentu saja merupakan fenomena yang harus mendapat perhatian sepenuhnya. Artinya, kelahiran anak-anak tersebut perlu perhatian serius. Pemerintah melalui lembaga terkait sudah seharusnya memperhatikan anak-anak baik anak-anak legal maupun anak ilegalnya. Mereka hendaknya diberi pendidikan sebagaimana anak-anak lain agar nantinya menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab dan mandiri. Inisiatif para pengusaha penitipan anak TKI perlu diacungi jempol, jika memang didasari pada niat mulia. Artinya, niat mulia itu adalah melindungi anak-anak agar tidak diperjualbelikan secara liar atau dijadikan 'komoditi' dalam *trafficking*. Entah perdagangan manusia sebagai budak atau pun diperlukan organ tubuhnya untuk keperluan transplantasi.

Namun pertanyaan yang perlu dijawab adalah: apakah RPA benar-benar berniat menyelamatkan dan melindungi anak-anak ilegal TKW ataukah ada maksud lain selain itu?

Inilah yang perlu dipastikan melalui pengawasan. Sebuah tayangan televisi swasta mengungkap, anak-anak tersebut boleh diadopsi oleh keluarga yang menginginkan anak. RPA mengizinkan anak-anak titipan tersebut diadopsi keluarga yang tentunya dengan sejumlah imbalan. Pertanyaannya, bagaimana jika ibunya pulang dari bekerja masih sebagai TKW di luar negeri hendak mengambil kembali anak yang dilahirkan?

Anak-anak memang perlu kasih sayang dalam keluarga yang utuh. Jika mereka diadopsi dalam keluarga yang memang mendambakan kehadiran seorang anak, mungkin mereka akan tersantuni bukan hanya dengan harta namun juga jiwanya dengan kasih sayang. Tetapi apakah kepedulian terhadap anak-anak imalangi tersebut kemudian menganggap mereka sebagai ikomoditi?

Karena itu, pengawasan terhadap perawatan dan pendidikan anak-anak TKW perlu dilakukan secara konsisten terutama oleh lembaga yang terkait. Di sini tentu termasuk lembaga perlindungan anak sebagai lembaga independen yang bertugas melindungi dan menjaga anak-anak Indonesia yang tidak berdaya. Bahkan terhadap perlakuan orang dewasa. *(Penulis adalah Dosen Kopertis Wilayah V/DPK pada Universitas Mercu Buana Yogyakarta)-f*

Prakiraan Cuaca SABTU, 18 JANUARI 2014

WILAYAH	CUACA		SUHU	ARAH ANGIN
DIY	Berawan, Hujan Ringan +Petir	Sore - Malam	22 C - 29 C	Timur-Barat Daya Kec. Angin 04-35 km/jam
Banyumas Cilacap	Hujan Sedang	Pagi - Malam	24 C - 32 C	Barat Kec. Angin 25 km/jam

Sumber : Seksi Meteorologi Lanud Adisutjipto Yogyakarta - Stasiun Meteorologi Cilacap — Jon / Mak / Arko

menuju wisata

Air Panas Tenaga Surya Made In Australia
CV KUNINDO MULIATAMA PERSADA
Jl. Bibis Raya No. 12 B Ringroad Selatan Yogyakarta 55183
0274 419 924, 434 2412, 7430547
0274 419924
0815 79727 28, 0852 28749133
kunindo_mp@yahoo.co.id
Solahart HOT WATER FROM THE SUN
Produk Unggulan No. 1 di DUNIA No. 1 di INDONESIA
1953
Dapatkan Discount Khusus + Hadiah Langsung Pompa Sanyo Automatic
PROMO SPESIAL AWAL TAHUN
PERIODE : 1 s/d 30 JANUARI 2014
*Syarat & ketentuan berlaku
www.solahart.co.id @Solahart_id Solahart Indonesia

HD FINANCE Kesempatan Berkarir !
PT. HD Finance, Tbk Perusahaan Nasional pembiayaan otomotif yang sedang berekspansi secara agresif, akan membuka cabang baru di Tegal, Purwokerto, Kebumen & Yogyakarta membutuhkan :
1. Branch Manager (BM)
2. Credit Analyst (CA)
3. Surveyor (SUR)
4. Administration (ADM)
Kualifikasi :
- Pria, Usia Max. 40 th (1); Pria, Usia Max. 35 th (2-3); Wanita, Usia Max. 30 th (4)
- Pendidikan Min. S1 segala jurusan (1-2); D3 Fresh Graduate (3-4)
- Pglm Min. 3 th sbg kepala cabang atau Head di perusahaan Multifinance (1)
- Diutamakan pglm Min. 1 th sbg Credit Analyst di perusahaan Multifinance (2)
- Diutamakan pglmn Min. 1 thn sbg Collector di perusahanan Multifinance (3)
- Kemampuan leadership, negosiasi, problem solving & komunikasi yg baik (1)
- Menyukai pekerjaan lapangan, pekerja keras, jujur & berkomitmen (2-3)
- Berpenampilan menarik, rajin, jujur, teliti & menyukai detail (4)
- Memiliki Motor & SIM C (2-3); Menguasai Ms Office (1-4)
- Daerah Penempatan : Tegal, Purwokerto, Kebumen & Yogyakarta
Kirimkan Lamaran, CV Lengkap & Foto Terbaru ke :
hrd@hdfinance.co.id

escolab
WALK IN INTERVIEW (PT.DIPA PHARMALAB INTERSAINS)
Kami Perusahaan Farmasi Ethical yang sedang berkembang, Saat ini membutuhkan Karyawan/i adalah sebagai berikut :
1. MEDICAL REPRESENTATIVE
- Pria/Wanita, Lajang,
- Pendidikan minimal SMA,
- Usia maximal 28 Tahun, Mempunyai kendaraan (Motor & SIM C),
- Mau bekerja keras dan menyukai tantangan, Mau di tempatkan di seluruh Indonesia.
2. AREA SUPERVISOR MARKETING
- Pria/Wanita,
- Pendidikan minimal SMA,
- Usia Maximal 35 Tahun,
- Berpengalaman minimal 1 Tahun sebagai Supervisor Medical Representative atau 3 Tahun sebagai MR di Perusahaan Farmasi Ethical,
- Mempunyai kendaraan (Motor & SIM C), Jujur dan bertanggung jawab,
3. AREA MANAGER MARKETING
- Pria/Wanita
- Pendidikan minimal SMA
- Usia Maximal 38 Tahun
- Berpengalaman minimal 1 Tahun sebagai Area Manager Product Farmasi Ethical atau 2 Tahun sebagai Area Supervisor Medical Representative di Perusahaan Farmasi Ethical
- Jujur dan bertanggung jawab
- Mau di tempatkan di seluruh Indonesia
DIWAJIBKAN MEMBAWA SURAT LAMARAN, CV, FOTO COPY KTP, PAS FOTO 4X6 (2LEMBAR) & membawa IJAZAH ASLI TERAKHIR
Tgl. 20 Januari 2014, jam 08.00-17.00 WIB
Tempat : FAVEHOTEL (Punch Meeting Room)
Jalan : Kusumanegara No. 81, Yogyakarta
No Tlp : 0274-560111

A. EDITOR (EDT
1. Geografi (GEO
2. Sejarah (SEJ)
3. Sosiologi (SOS
4. Pend. Agama
5. Ekonomi (EKO
6. Kimia (KIM)
7. Biologi (BIO)
8. Fisika (FIS)
9. Matematika
10. Editor TK (TK)
Syarat Umum : Laki-
B. INTERNAL AL
Laki-laki, Usia m
Siap Dinas Luar
C. STAF KEUAN
Laki-laki, Usia m
akuntansi, Mam
seluruh Indonesi
D. STAF ADMIN
Perempuan (ADM
Pend. S1 Semua
Email & Internet,
Ms. Office (ADM
E. DESAINER GR
Laki-laki/Perem
Desain, Mampu
Freehand (DES)
Siap kerja Lembu
F. BRANCH AD
Laki-laki/Perem
Akuntansi/Eko,
di Seluruh Indon
G. MARKETING
Laki-laki, Usia m
lapangan, Siap d
Luar Jawa), Mel
H. GUDANG PE
Laki-laki, Usia m
Cabang seluruh
surat ijin Ortu.
HRD PT INTAN

Gambar 26. Contoh Analisis dan (*News /Report*)

KR GROUP

http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945

Jumat Kliwon
7 November 2014
14 Sura 1948
Tahun LXX No 40
Harian Pagi 28 Halaman
Harga Eceran Rp 3.000
Hotline "KR" (0274) 565685

KRONOLOGI

Kamis (6/11/2014) pukul 02.00 WIB. Amien sedang tidur.

DOR

Seseorang menembak mobil milik Amien Rais.

Penembak kabur di kegelapan malam.

Grafis : Arko

Motif Belum Diketahui

Mobil Amien Rais Ditembak

KR-Surya Adi Lesmana

Mobil Toyota Harrier milik Amien Rais ditembak orang tak dikenal.

KR-Wahyu Priyanti

Petugas Identifikasi Satreskrim Polres Sleman memeriksa temuan selosong peluru.

SLEMAN (KR) - Mobil Toyota Harrier Nopol AB 264 AR warna hitam milik mantan Ketua MPR, Amien Rais, ditembak orang tak dikenal, Kamis (6/11) dinihari. Saat kejadian, mobil diparkir menghadap selatan di teras rumah Amien Rais di Pandeansari Blok II/4, Condongcatur, Depok, Sleman. Peluru mengenai bagian belakang sebelah kanan dan tembus ke dalam mobil.

Saat olah TKP, polisi menemukan satu selongsong peluru di luar pagar rumah yang berjarak sekitar 7 meter dari posisi mobil. Sementara di dalam mobil, polisi menemukan pecahan proyektil peluru. Hingga semalam, belum diketahui pelaku serta motif penembakan maupun jenis senjata api yang digunakan.

Satpam di rumah Amien Rais, Ismail mengungkapkan, sekitar pukul 02.00 ia mendengar suara motor matic dari arah selatan ke utara melintas depan rumah. Tak berapa lama motor tersebut kembali melintas ke utara. "Motor dari utara ke selatan dulu lalu ke utara lagi dan berhenti kemudian terdengar ledakan. Saya sempat keluar pos satpam namun motor sudah tak terlihat," jelasnya.

Ia mengatakan, saat itu dirinya tidak menyadari suara ledakan yang didengarnya adalah tembakan. Peristiwa baru diketahui sekitar pukul 06.00, saat sopir Amien Rais, Harmanto (28), mencuci mobil Harrier dan menemukan bekas tembakan pada kendaraan sebelah kanan belakang. Harmanto kemudian memberitahu Ismail.

Kepada wartawan, Amien Rais mengaku tak tahu detail kronologis penembakan. Ia menceritakan sekitar pukul 00.00, masih terjaga. Setelah itu ia tertidur dan mengaku tidak mengetahui kejadian apapun. Kemudian sekitar pukul 04.00, ia baru keluar rumah dan menjadi imam salat Subuh di masjid depan rumahnya.

Sekitar pukul 06.00 saat jalan-jalan di sekitar rumahnya, Harmanto mendatanginya dengan tergopoh-gopoh. Sopirnya itu mengabarkan mobil pribadinya menjadi sasaran penembakan. "Saya kemudian melapor ke polisi dan dengan cepat polisi datang," kata Amien di kediamannya.

Meski kerusakan mobil bisa diperbaiki, namun ia menilai kasus tersebut sebagai bentuk teror. Ia berharap polisi segera mengungkap dengan menangkap pelaku penembakan. Amien mengatakan tidak tahu

*Bersambung hal 7 kol 1

OPTIK MODERN
HADIAH UTAMA 2 PAKET TOUR THAILAND 6 MOTOR
Lensa + Frame 150rb
Softlens Warna 110rb 3 box
Garansi Lensa 24bln
(0274) 553222

Analisis KR

Problema Tenaga Kerja

Dr Hermayawati MPd

SIDAK Menaker Hanif Dhakiri menemukan tempat penampungan ilegal calon tenaga kerja wanita (TKW). Sekalipun tetangga kawasan menyebut tidak tahu menahu tempat tersebut sebagai tempat penampungan ilegal, tapi mustahil itu dilakukan tiba-tiba. Artinya, aktivitas di tempat tersebut sebenarnya sudah ada. Karena animo bekerja di luar negeri, masih menjadi keinginan sebagian warga, apalagi mencari kerja di dalam negeri memang tidak mudah.

"Mau tidak mau harus kita akui, permasalahan tenaga kerja di Indonesia selama ini, relatif masih 'jalan di tempat'. Artinya sama sekali belum ada perubahan yang berarti.

*Bersambung hal 7 kol 1

Jadwal Shalat (Jumat, 7 November 2014)

Zuhur	Asar	Magrib	Isak	Subuh
11.25	14.41	17.38	18.49	03.50

Berlaku untuk Kota Yogya, Kab. Bantul dan Kab. Sleman

Sumber: Kanwilkan Agama Kanwil Provinsi DIY

Gambar 27. Contoh Analisis dan (*News /Report*)

kantor cabang dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)- Oktober 2014. (M-3)-d

Problema ..... Sambungan hal 1

Setelah 'sukses' menggerebek tempat penampungan TKW ilegal, Menaker Hanif harus berjalan cepat dengan membuat terobosan agar mampu mengatasi tantangan yang semakin berat.

TKW hanya sebagian kecil permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia secara keseluruhan. Namun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bukan hanya mencakup buruh migran yang bekerja di sektor nonformal, melainkan juga para pencari kerja intelektual yang menetap dan mencari nafkah di luar negeri di sektor formal (ekspatriat). Mereka adalah tanggung jawab negara. Jika para pencari kerja intelektual tersebut belum mampu mandiri, hal itu pun bukan salah mereka semata. Negara pengirim tenaga kerja lainnya seperti India, Phillipines, Vietnam telah memiliki MoU dan MoA dengan negara-negara sejahtera di Eropa, Amerika dan Timur Tengah untuk mengirimkan tenaga terampil mereka. Mulai pekerja kantor (*officers*), perawat, dokter guru dan dosen dan bukan hanya buruh atau pekerja sektor nonformal.

Permasalahan 'darurat SDM' (meminjam istilah Muhaimin) sudah selayaknya dicarikan terobosan segera agar TKI kita tidak semakin jauh tertinggal dari negara-negara berkembang lain yang juga berkepentingan mengirim tenaga kerja ke berbagai negara sejahtera. Mengatasi permasalahan tenaga kerja untuk bekerja di dalam negeri hanyalah harapan kosong belaka jika tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja dengan gaji yang memadai, sebagaimana gaji TKI di luar negeri. Karenanya, diperlukan pemimpin yang realis dan mampu membuat terobosan dengan cara membangun kerja sama G *to* G (antarpemerintah) dengan sesama pimpinan negara-negara sejahtera sebagaimana dilakukan oleh India dan Phillipines.

Apapun adanya, keberlangsungan hidup warga negara adalah tanggung jawab negara seperti tersirat dalam UUD 1945 Pasal 28A-28D terutama Ayat (1) dan (2). Minimalnya, kementerian ketenagakerjaan melakukan terobosan melalui pencanangan kerja sama dengan negara-negara sejahtera di Amerika, Eropa, Australia dan Timur Tengah. Negara-negara sejahtera di kawasan tersebut banyak memerlukan tenaga kerja dari Asia karena konon relatif 'murah' dibandingkan dengan menggaji tenaga kerja dari dalam negerinya. Langkah Muhaimin Iskandar dulu, yang telah merintis kesepakatan (MoU) dengan pemerintah Jerman untuk mengirimkan ratusan teknisi di bidang perkapalan dan keperawatan sudah sepantasnya dilanjutkan dengan penyiapan SDM secara serius. Terutama menyangkut keterampilan dan penguasaan bahasa target yang relevan agar mampu bersaing dengan negara lain.

Untuk itu, peran PPTKIS menjadi sangat penting. Jika mampu, Kemenaker juga harus berani ber-MoU dengan negara-negara sejahtera lain, demi merealisasikan 'Indonesia Hebat'.

(Penulis adalah Dosen Kopertis Wilayah V, Dpk pada Universitas Mercu Buana Yogyakarta)-d

Novanto .....

Sambungan hal 1

Meski opsi KIH ditolak, lobi-lobi antara dua kubu ini terus dilakukan. Lebih lanjut Novanto menuturkan bahwa pertemuan dengan Pramono Anung sebagai juru lobi dari KIH masih berjalan. "Kita tetap melakukan pertemuan-pertemuan dengan Pak Pramono untuk bersama-sama pimpinan juga terus mengadakan musyawarah mufakat, doakan saja," jelas Setya.

Sementara anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Patrice Rio Capella yang masuk dalam KIH, mengatakan dalam situasi seperti ini perlu adanya sikap

Suara Rakyat

Kirim SMS ke 0815 797 3333

Tertibkan Seragam Satpam

Kepada Yth. Binamitra Polri. Mohon seragam satpam ditertibkan. Seragam safari, batik, dll, sepertinya tidak sesuai dengan profesi satpam saat melaksanakan tugas, karena sulit membedakan antara petugas atau bukan. Seragam satpam setahu saya untuk tugas harian adalah PDH (putih biru, topi pet, sepatu pendek). PDL (biru-biru, topi lapangan, sepatu panjang PDL). Mungkin peraturan Polri juga seperti itu. (Masyarakat peduli ketertiban). **+628574326XXX**

BCA BANK BRI Danamon mandiri BANK MEGA
14010 LG Mobile Indonesia @lgmobileid lg.com
hyperma
Low prices and mo
PERIODE PROMOSI 7 - 9 NOVEMBER 2014 | BERLAKU DI
S26 PROCAL GOLD
S26 PROMISE GOLD
Tin 900g All Variants
mulai Rp 203.975
SUNCO
Minyak Goreng Refill
Rp 21.4
DISKON 20% UNTUK PEMBELIAN 2
Semua MIE INSTANT GORENG PRODUK INDOFOOD
DISKON 5% KARTU HICARD
GOON PANTS
M34/ L28/ XL24/ XXL20
Rp 62.985
Anggur Red Globe Super
Rp 3.990
COCA COLA, FANTA
BELI 2 Rp 17.800
SILVER QUEEN
Semua

Gambar 27. Contoh Analisis dan *News /Report* (Sambungan)

Analisis KR

TKW, Ima dan Kampanye Hillary

Dr Hermayawati MPd

NAMA Ima Matul Maisaroh, mantan tenaga kerja wanita (TKW) asal Malang Jawa Timur mendadak tenar. Pasalnya, perempuan ini didaulat berpidato di depan puluhan senator Gedung Putih Amerika Serikat serta jutaan orang pada momentum Konvensi Partai Demokrat pendukung Hillary Clinton, Selasa (26/7) lalu. Perempuan lulusan Madrasah Tsanawiyah itu mampu memukau dengan penampilannya di depan forum bergengsi dengan menggunakan bahasa Inggris secara lancar. Kenyataan ini tentu saja membuyarkan kesan negatif tentang eksistensi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mayoritas perempuan, dan selama ini menjadi bahan lecehan majikan bangsa lain.

Pengalaman buruknya menjadi korban perdagangan manusia (*human traffickingslavery*) selama tiga tahun di Amerika membuatnya termotivasi untuk mengemukakan permasalahannya. Ima melakukan demi mewakili kaumnya yang tercatat sekitar 45.000 korban *human trafficking* di Amerika.

Ima mendapat tugas mengemban amanah menjadi staf yang menangani masalah pendanaan untuk perlindungan buruh dan migran. Perempuan kelahiran 1997 itu bebas dari perbudakan

*** Bersambung hal 7 kol 4**

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isak	Subuh
Senin, 1 Agustus 2016	11.47	15.09	17.41	18.53	04.34

MIKE MOHEDE

Meninggal Karena Serangan Jantung

JAKARTA (KR) - Duka menyelimuti dunia musik Tanah Air. Michael Prabawa Mohede (32) atau yang akrab disapa Mike Mohede, meninggal dunia, Minggu (31/7) malam akibat serangan jantung. Jenazahnya hingga berita ini diturunkan masih disemayamkan di RS Premier Bintaro.

Nama Mike mulai melejit setelah berhasil menjuarai ajang pencarian bakat Indonesian Idol Season 2 Tahun 2005. Suara merdunya yang elegan memukau jutaan pemirsa televisi. Mike kemudian meluncurkan album pertama dengan single 'Semua untuk Cinta' pada 2005. Berkat kegigihannya, setahun kemudian Mike berhasil masuk sebagai nominasi AMI untuk Best Male

JUARA SSB: Tim SSB Gama meraih juara I KU-12 Festival Sepakbola Usia Dini Antar SSB DIY-Jau berlangsung di Alun-alun Wates Kulonprogo, Minggu (31/7), SSB Gama menumbangkan R2 Solo. Ber dan 24.

TANDAI PANEN DI LERENG SUMBING

Ritual Songsong Negeri T

TEMANGGUNG (KR) - Petani tembakau di lereng Sumbing menggelar ritual Songsong Negeri Tembakau sebagai penanda dimulainya panen tembakau di wilayah tersebut. Acara diadakan di sisi timur Gunung Sumbing di Dusun Semen Desa Wonosari Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, Minggu (31/7).

diberi kekuatan dan berharap musim panen tahun ini hasil budidaya tembakau berlimpah dan meningkatkan kesejahteraan petani.

"Serangan hama tinggi dan cuaca ke membuat peta

* Bersambu

Kedaulatan Rakyat

"KEDAULATAN RAKYAT"
HALAMAN 7

EMPARI BATU

or PDIP Hancur

KR-Sukro Riyadi

tul hancur.
an dilaporkan ke polisi
at.
a DPC PDIP Bantul
li mengungkapkan,
an batu sebesar ke-
ungan orang dewasa itu
enar diluar dugaan.
sebelum dan sesudah
PP di Gedung Gapensi
selesai,Kantor DPC
antul dalam penjagaan
etugas kepolisian dan
artai. Apalagi simpati-
P bergerak menuju Jalan Parangtritis ke selatan.

Aryunadi mengungkapkan, peristiwa pelemparan batu itu terjadi sekitar pukul 13.15. Siang itu petugas jaga di Kantor DPC PDIP sudah tidak ada. Karena situasinya sudah dinilai kondusif, petugas jaga kantor mengemasi gelas yang sebelumnya digunakan menjamu polisi. "Ketika sedang berada di belakang terdengar suara *'prang'* saat penjaga keluar kaca jendela sudah hancur dan massa kabur ke barat," jelas Aryunadi.

Pascakejadian pihak kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Pihak kepolisian berjanji segera mengungkap dalang pelemparan batu agar kelak tidak terulang kembali. Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Anggaito HP SIK mengatakan, kasus tersebut sudah ditangani polisi. **(Roy)-a**

Sambungan hal 1

ia ba-
angat
enian
ikelu-
tutur
iyono
al for-
usnya

akademisi Dr Kuswarsantyo MHum menuturkan program sertifikasi sesuatu hal yang bagus. Namun begitu harus mampu mengakomodir berbagai pihak yang dimungkinkan bisa mendapatkannya.

"Seniman ada beberapa klasifikasi. Sehingga untuk melakukan sertifikasi, perlu formulasi dan indikator pencapaian yang jelas tujuan serta sasarannya," tutur pria yang mendapat paring

TKW,

Sambungan hal 1

yang telah dialaminya selama tiga tahun karena pertolongan lembaga *Coalition to Abolish Slavery and Trafficking* (CAST), yaitu koalisi menghapus perbudakan dan perdagangan di Los Angeles AS. Nasib malang Ima sebagai budak teraniaya kini berubah. Ima dinilai membawa kecerahan bukan hanya bagi diri dan keluarganya, namun juga bagi bangsa Indonesia. Ia mampu terlepas dari penganiayaan majikannya serta upaya kerasnya untuk memerangi perbudakan dengan bergabung dengan CAST.

Eksistensi seorang Ima Matul yang mampu menghipnotis jutaan manusia melalui kiprah nyatanya sebagai duta wicara untuk mewakili kaumnya yang tersebar di seluruh dunia, telah menggilas fenomena perdebatan menyangkut 'banjir' tenaga kerja asing (TKA) terutama dari Tiongkok. Konon kini ada sekitar 10.000 (sepuluh ribu) TKA buruh asal Tiongkok (bukan sepuluh juta) yang akhir-akhir ini dipekerjakan di Indonesia. Hanya tentu saja, permasalahan tenaga kerja, yang seringkali mengarah ke perbudakan dan perdagangan manusia apapun alasannya harus dihapuskan dari muka bumi karena tidak selaras dengan hak asasi manusia (HAM).

Mestinya kita tidak perlu berlebihan menanggapi masuknya TKA ke Indonesia. Beberapa pertimbangan perlu kita pikirkan. *Pertama*, era *Asia Pacific Economic Corporation* (APEC), yaitu Kerja Sama Perekonomian Negara-negara Asia Pasifik Selatan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya, memang memiliki konsekuensi kegiatan perekonomian masuk di wilayah negara anggota, termasuk Tiongkok ke Indonesia dan sebaliknya. Kerja sama tersebut meliputi perdagangan dan penyediaan tenaga kerja. *Kedua*, persaingan bisnis mengakibatkan berbagai manufaktur mencari tenaga kerja yang relatif lebih murah, efektif dan efisien. Tiongkok merupakan 'lumbung tenaga kerja' yang memenuhi persyaratan tersebut, selain India dan Indonesia sendiri. *Ketiga*, kita juga tidak boleh menutup mata terkait etos kerja. TKA termasuk asal China acap dinilai lebih tinggi dibandingkan TKI. Dalam beberapa kali wawancara di pelbagai tempat, realita ini juga diakui beberapa TKI.

Fakta yang ada hendaknya dapat dipakai sebagai cambuk bagi para TKI agar memiliki etos atau semangat kerja yang tinggi dengan cara menunjukkan kualitas kinerja terlebih dulu, dan bukan semata-mata menuntut upah tinggi tanpa dapat menghasilkan kinerja yang berkualitas. Di era kompetisi, pemodal mesti memilih cara yang paling baik dan lebih menguntungkan. Solusinya, agar TKI tidak kalah bersaing dengan TKA termasuk di negeri sendiri adalah dengan meningkatkan etos kerja serta keterampilan kerja serta keterampilan komunikatif yang kompetitif untuk tetap bertahan hidup. Ima Matul Maisaroh adalah *trendsetter* atau pembawa inspirasi yang pantas ditiru bagi tenaga kerja di mana pun. *(Penulis adalah Dosen Kopertis Wilayah V, Dpk pada UMB Yogyakarta).-a*

Ritual

Sambungan hal 1

kualitas turun dan merugi," katanya.

Sesepuh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Muhammad Sobary menjelaskan, ritual sebagai permohonan dan kepasrahan petani pada Yang Kuasa, sebab segala nasib merupakan kehendakNya dan petani tak punya kekuatan. "Ritual ini sangat berarti bagi petani di tengah desakan internasional," katanya.

Pihaknya mengemukakan berdasar hasil pengamatan selama beberapa tahun terakhir, petani berang dengan segala bentuk permasalahan yang muncul selama ini, terutama indikasi kepentingan asing mencoba memasukkan unsur politis terhadap bisnis tembakau.

Seorang petani, Tumiyan (50), berharap musim panen tembakau tahun ini mampu memenuhi ekspektasi para petani lokal, yakni berkualitas dan harganya tinggi.

Ketua DPP Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Agus Parmuji menambahkan, ritual ini merupakan momentum menyuarakan aspirasi para petani tembakau lokal yang menginginkan segera diterbitkannya RUU Pertembakauan dan pengesahan Amar Presiden (Ampres). **(Osy)-f**

Suara Rakyat
Kirim SMS ke 0815 797 3333
Beberapa Titik LPJU Kota Mati
KEPADA Yth Kepala Kimpraswil Kota Yogyakarta

KURS JUAL RUPIAH TERHADAP DOLAR AS
13.196 13.176 13.159 13.159
13.240 13.175 13.175 13.175

Gambar 28. Contoh Analisis dan (*News* /*Report*)

Karya “Analisis” Penulis dimuat di laman KRJogja.com

Impor Dosen (http://krjogja.com/web/news/read/65030/Impor_Dosen)

Impor Dosen

- *Rabu, 02 Mei 2018 / 15:44 WIB*

Editor : Ivan Aditya

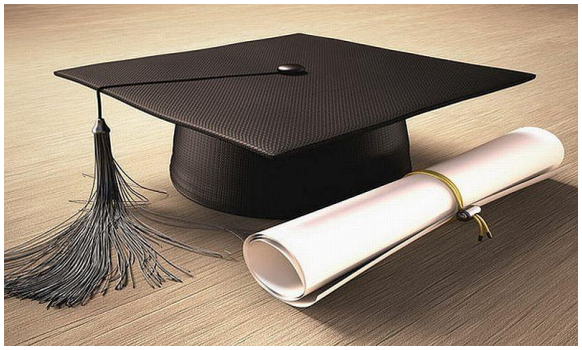

PRO-KONTRA Program Impor Dosen (PID) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) membuat heboh. Bukan hanya di DPR, terlebih di perguruan tinggi (PT). Para dosen yang sudah galau dengan pelbagai persyaratan administratif dan lainnya yang dirasa menekan, kian tertekan.

Program sertifikasi dosen (serdos) yang sebelumnya menggembirakan, kini tidak lagi nyaman. Ancaman dicabut serdosnya jika tidak melaksanakan tugas penelitian dan pengabdian masyarakat (PPM) serta publikasi hasilnya, selalu membayang. Serdos yang rata-rata diterimakan setiap dua (terkadang 3) bulan tersebut tentu saja tidak cukup untuk melaksanakan PPM kecuali jika mendapatkan hibah PPM dari perguruan tinggi, Kemenristekdikti atau institusi lain. Tentu tidak bijak jika ada ucapan: ”Jika keberatan ya jangan jadi dosen!”.

Kini wacana impor dosen ke PT di Indonesia dengan gaji fantastis — konon sekitar USD$ 3,000 hingga USD$ 5,000 atau Rp 39 juta hingga Rp 65 juta per-bulan — sangat menyakitkan dosen lokal, apapun alasannya. Gaji sebesar itu wajar dan tidak berlebihan jika hitungannya dolar. Masalahnya, nilai rupiah yang sangat rendah dibanding dolar menjadikan angka tersebut sangat fantastis bagi dosen lokal. Artinya, gaji dosen lokal yang terlalu rendah dan tidak proporsional dengan tugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, publikasi karya ilmiah dan beban administratif lainnya.

Jika ada dosen kita berkesempatan mengajar di luar negeri, pasti melalui berliku tes kemampuan demi menggapai kesempatan tersebut. Bagaimana dengan dosen dari luar negeri? Cukupkah dengan kepercayaan reputasi yang bersangkutan, seperti World Class Professors (WCP) berkategori A ataupun B? Yang pasti, impor dosen juga secara implisit meragukan kualitas dosen lokal.

Semua program pemerintah pastilah dimaksudkan demi ëpercepataní pembangunan, sebagai salah satu misi Kabinet Kerja dalam upaya perbaikan di bidang pendidikan tinggi. Jika dipelajari, PID yang salah satunya berupa program WCP tidak termasuk dalam Program Nawacita pemerintahan Kabinet Kerja. Bukan sesuatu yang urgen untuk disegerakan. Akan menjadi lebih baik bila yang dilakukan adalah peningkatan kualitas dosen yang ada.

Apalagi jika dicermati, program WCP tidak secara eksplisit termaktub di dalam Nawacita. Jika ada butir keempat: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikaní adakah relevansi antara butir tersebut dan PID? Apakah peningkatan kualitas pendidikan harus dengan cara mengimpor dosen?

WCP bisa saja dilaksanakan jika rasiodosen yang ada tidak seimbang. Karena minimnya jumlah dosen dan aset lulusan PT tidak tersedia. Ataukah alasan minimnya guru besar (GB) di Indonesia sehingga perlu mendatangkan dari luar negeri? Dalam hal ini, sudahkah eksistensi GB dalam negeri dioptimalkan kebermanfaatannya?

Banyak pertanyaan dengan rencana mendatangkan tenaga kerja asing terutama dosen asing ke negeri ini. Mengundang dosen asing atau pun sumber daya profesional telah banyak dilakukan berbagai negara maju, seperti: Amerika, Jepang, Jerman, Prancis, Korea, Australia dan Taiwan. Mereka bukan hanya mengundang akademisi melainkan juga berbagai tokoh bidang tertentu untuk dianugerahi gelar akademis dan diminta mengajar di perguruan tinggi terkait.

Bukan hal berlebihan jika program tersebut dilakukan negara maju dengan populasi yang relatif sedikit (kecuali Amerika) dan ekonomi yang mapan. Berbeda dengan kondisi Indonesia yang secara demografis over populasi dan ekonomis kurang mendukung pemanfaatan tenaga kerja asing, kecuali dalam keadaan darurat.

Negeri ini justru perlu ‘mengekspor’ sumber daya manusia (SDM) yang berlebih. Misalnya melakukan G to G penyaluran dosen ke luar negeri terutama bagi lulusan pascasarjana yang belum mendapatkan pekerjaan sementara pemerintah belum mampu menampung.

Apapun alasannya, kebijakan mengimpor SDM belum saatnya dilakukan. Ada kompleksitas permasalahan baik secara kependudukan dengan 262 juta jiwa (BPS, Agustus 2017) dan

kondisi ekonomi yang saat ini semakin sulit bagi masyarakat menengah dan bawah. Kebijakan mengimpor tenaga asing hendaknya ditinjau kembali dengan mengingat fenomena pengangguran lulusan perguruan tinggi mencapai 11,19% atau setara 787 ribu dari total penganggur sebanyak 7 juta.

(Dr Hermayawati. Dosen Kopertis Wilayah V, Dpk pada UMB Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 2 Mei 2018)

Gambar 29. Contoh Karya Populer Analisis

BAB VI

PEMBAHASAN

Berbagai konsep tentang hakikat penulisan karya ilmiah populer berikut contoh-contohnya sebagaimana dipaparkan pada Bab sebelumnya di atas sengaja disajikan terutama dari pengalaman serta hasil karya tulis penulis sendiri, yang kebetulan menjadi penulis sambilan (*freelancer*) tetap pada sebuah koran harian populer di Yogyakarta. Penulis telah berpengalaman menjadi *freelance writer* sejak beberapa dekade yang lalu. Kebetulan koran tersebut memberi ruang khusus, terutama pada Kolom "Opini" dan "Analisis" namun yang seringkali penulis lakukan adalah mengisi kolom "Analisis" yang dipandang oleh banyak penulis sebagai kolom bergengsi karena baik tulisan maupun foto penulisnya terpampang pada Halaman Utama. Selain itu, yang lebih menarik adalah tantangannya dalam berkompetisi dengan penulis lain yang hampir semua pengisinya adalah pakar di bidangnya.

Penulis mengawali menulis pada kolom "Opini" yang posisinya ada pada lembar koran kedua. Tidak mudah menjadi penulis pemula, karena tidak semua karya tulisan penulis diterbitkan. Namun penulis tetap konsisten dengan terus menulis dan menulis tanpa kenal lelah, sambil terus banyak membaca karya-karya orang lain terutama dalam menggunakan gaya bahasa populer. Gaya bahasa populer bersifat lincah, singkat, lugas dan yang terpenting adalah komunikatif. Gaya bahasa komunikatif dapat tercipta jika pada saat menulis Anda membayangkan sedang berbicara, menyampaikan pendapat, atau pun berdiskusi dengan orang lain (yang dalam hal ini adalah pembaca).

Setelah bertahun-tahun menjadi penulis “Opini” penulis mulai mencoba mengirimkan tulisan ke Kolom “Analisis” yang seringkali diisi oleh para pakar. Ternyata, setelah sekian lama menulis pada Kolom “Opini”, tulisan pertama penulis langsung dipublikasikan. Hal ini mungkin karena pada saat itu, penulis juga sudah digolongkan menjadi “Pakar” terutama di bidang pendidikan. Sejak saat itu, hampir semua tulisan penulis dimuat pada Kolom yang konon “bergengsi” tersebut.

Sekedar ‘*sharing ideas*’, ada kiat tertentu yang dapat kita upayakan agar tulisan kita menarik, aktual dan kekinian, bahasan langka yang disampaikan secara bombastis dan tajam (*piercing*) sehingga media massa memutuskan untuk memuat tulisan kita di halaman surat kabarnya, baik yang *printed* maupun dalam bentuk *online.* Selain mempertimbangkan berbagai faktor tersebut di atas, yang terutama sebaiknya kita menghindari kompetisi yang banyak peminatnya. Sebagai contoh, pakar pendidikan di Yogyakarta banyak jumlahnya, apalagi secara nasional. Kebanyakan mereka membahas tentang berbagai permasalahan menyangkut pendidian formal.

Strategi penulis agar tulisan penulis diterima adalah dengan cara menghindari kompetisi dengan sesama penulis di bidang yang sama dengan mengambil jalur yang lain, yaitu pendidikan informal dan/atau nonformal. Meskipun tidak semua pakar mampu menulis karya ilmiah populer (meskipun hebat dalam menulis karya ilmiah akademis), sebaiknya strategi semacam itu perlu dilakukan. Itulah sebabnya, karya penulis banyak menyoroti permasalahan “Pendidikan TKI (Tenaga Kerja Indonesia)” dan perihal lainnya yang terkait dengan TKI. Strategi tersebut ternyata membuahkan hasil. Saat ini, setiap penulis mengirimkan karya tulis jenis “Opini” dan “Analisis” pasti diterbitkan oleh surat khabar yang penulis tuju, yaitu Koran Harian “Kedaulatan Rakyat”.

Kedua kolom tersebut di atas sangat kompetitif sifatnya. Semakin populer media massanya, semakin ketat persaingan antarpenulis dalam “berebut” mengisi kolom. Namun demikian hal itu tampaknya tidak banyak menggoyahkan keinginan penulis untuk terus berupaya menembus media massa tersebut. Ada beberapa keuntungan jika tulisan Anda sering terpampang di suatu surat kabar, terutama yang berbentuk *printed,* yaitu sebagai berikut: Pertama, Anda akan banyak dikenal pembaca dari berbagai kalangan. Kedua, jika Anda seorang pendidik, setiap karya Anda akan mendapat *credit point* untuk kepentingan kenaikan pangkat. Ketiga, Anda akan mendapatkan kepuasan batin karena tulisan Anda dapat menginspirasi dan menjadi referensi bagi orang lain yang memerlukan. Keempat,

Anda mendapatkan sejumlah honor untuk setiap kali tulisan Anda diterbitkan. Nah, tunggu apalagi? Mulailah menulis! Bagi mahasiswa dan umum, ada kolom tersendiri pada setiap media massa.

BAB VII

SIMPULAN

Berdasarkan berbagai konsep yang disertai contoh-contoh karya tulis ilmiah populer sebagaiman dijelaskan di muka, dapat dirumuskan bahwa ada perbedaan yang mendasar antara penulisan karya ilmiah populer dan karya ilmiah akademis yang pada umumnya dalam bentuk Laporan penelitian/tesis/disertasi, jurnal, artikel dalam prosiding seminar dan paper yang meskipun memiliki format berbeda satu sama lain tergantung model atau gaya format yang diminta, misalnya menggunakan model APA (*American Psychology Association*) yang sering digunakan dalam karya tulis ilmiah akademis dalam bidang Humaniora.

Perbedaan yang harus dipertimbangkan jika Anda ingin sukses mempublikasikan karya Anda terutama adalah sebagai berikut: (1) Tentukan judul dan jenis karya tulis Anda, apakah berupa Opini, Ulasan, Berita atau Analisis; (2) Jika Anda seorang *freelancer* baru, sebaiknya mulailah menulis untuk kolom-kolom kecil seperti Kolom “Pikiran Pembaca” yang biasanya tersedia di surat kabar terlebih dulu baru meningkat ke jenis Opini; (3) Tulislah alur tulisan Anda mulai dari Pendahuluan (pemaparan masalah), Isi (uraian pendapat Anda serta solusi yang ditawarkan) dan simpulan atau rekomendasi; (4) Gunakan gaya bahasa yang komunikatif, singkat, lugas dan populer; (5) Perhatikan jumlah kata – biasanya sekitar 600 hingga 650 kata; (6) Periksa kembali tulisan Anda, minta orang lain untuk menilai kelayakannya; (7) Lampirkan Surat Pengantar untuk Redaksi surat kabar yang Anda tuju disertai fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk); (8) Masukkan satu bendel artikel, surat dan KTP tersebut ke dalam amplop beralamat redaksi dan kirimkan ke alamat tersebut; (9) Tunggu jawaban dari redaksi surat kabar yang bersangkutan hingga satu minggu lamanya. Jika sudah lebih dari satu minggu tidak ada kabar dari redaksi tentang dimuat atau tidaknya artikel Anda, Anda bisa mengirimkan ke redaksi surat kabar lain yang reputasinya di bawah surat kabar yang pertama.

BAB VIII

PENUTUP

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rakhmat dan Hidayah-Nya hingga Penulis dapat menghadirkan Buku ini.

GLOSSARY

1. *Freelancer* atau wartawan freelance adalah wartawan yang bukan penulis tetap di suatu surat kahabar. Biasanya menulis merupakan pekerjaan sambilan dan/atau sebagai kegiatan penyaluran bakat atau hobi penulis
2. Karya Ilmiah Populer
3. Karya ilmiah populer merupakan suatu karya yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang populer sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca.

   Menurut Liang Gee (dalam Dalman, 2012: 155) karangan ilmiah populer adalah semacam karangan ilmiah yang mencakup ciri-ciri karangan ilmiah, yaitu menyajikan fakta-fakta secara cermat, jujur, netral, dan sistematis, sedangkan pemaparannya jelas, ringkas, dan tepat. Menulis untuk Media Massa menawarkan tulisan yang jelas, organisasi yang sederhana, latihan yang melimpah, dan contoh-contoh tepat yang memberi siswa informasi tentang penulisan media dan peluang untuk mengembangkan keterampilan mereka sebagai penulis profesional.
4. Media massa

   berarti teknologi yang dimaksudkan untuk menjangkau khalayak massal. Ini adalah sarana komunikasi utama yang digunakan untuk menjangkau sebagian besar masyarakat umum. Platform yang paling umum untuk media massa adalah surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet. Masyarakat umum biasanya bergantung pada media massa untuk memberikan informasi mengenai isu-isu politik, masalah sosial, hiburan, dan berita dalam budaya pop.

5. Op-eds adalah potongan opini. Mereka umumnya ditulis oleh wartawan freelance kecuali wartawan bekerja untuk organisasi lain dalam kapasitas PR. Op-eds menjalankan halaman "kebalikan dari editorial" - dengan demikian, mereka disebut "OP" posite- "ED" itorial. Ops ed sekitar 600 kata dan biasanya mengambil posisi pada masalah oleh seseorang dari catatan di lapangan.
6. Pakar adalah orang yang ahli dalam bidang khusus atau tertentu dan yang biasa diakui sebagai pakar adalah seseorang yang bergelar Doktor pada bidang tertentu.
7. *Printed Newspaper* adalah Koran dalam bentuk cetakan. Saat ini berbagai surat kabar tidak hanya terbit dalam bentuk *printed* tetapi juga dalam bentuk *online* atau daring, melalui internet yang dapat diakses oleh publik.
8. Staf Jurnalis adalah wartawan atau penulis tetap yang bekerja dan memiliki gaji atau penghasilan tetap pada suatu institusi atau lembaga persurat-kabaran. Tugas staf jurnalis adalah berburu berita aktual terkini yang harus segera dipublikasikan pada surat kabar yang diampunya. Sumber berita biasanya diperoleh dari berbagai sumber secara langsung.
9. Redaktur adalah beberapa jurnalis yang bertanggung jawab atas rubrik tertentu, seperti Rubrik Opini, Berita, Olah Raga, Analisis, Pikiran Pembaca, Iklan dan sebagainya.
10. Editor adalah penanggung-jawab isi surat kabar yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Muhammad. (2015, 14 November). Menulis Karya Populer. Riau: Riaupos.co Diperoleh 15 Juli 2018, dari http://riaupos.co/2731-spesial-menulis-karya-populer

Anonim. (2017, 10 April). Perkuliahan Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. dKampus. Diperoleh 15 Juli 2018, dari https://www.dkampus.com/2017/04/ciri-dan-jenis-karya-tulis-ilmiah/

Anonim. (2017, Agustus). Course Description MMC 2100. Diperoleh 15 Juli 2018, dari https://www.jou.ufl.edu/assets/syllabi/201708/

Anonim. (2017, April). Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis-Jenis dan Cara Menulis ArtikelIlmiah. Diperoleh 15 Juli 2017, dari https://www.ilmudasar.com/2017/04/

Chan, Miku. (2012, 12 Agustus). Karya Tulis Ilmiah Populer. Diperoleh 15 Juli 2018, dari https://othersidemiku.wordpress.com/

Coleman, Steven. (2018, January 24). *What Is Mass Media? - Definition, Types, Influence & Examples*. Downloaded July 15, 2018, from https://study.com/academy/lesson/what-is-mass-media-definition-types-influence-examples.html

Dalman. (2012). Menulis Karya Ilmiah. Bandar Lampung: UM Lampung Press.

…….. (2012). Keterampilan Menulis. Jakarta: Rajawali Press.

Hermayawati. (2018). Kumpulan Artikel Koran: Monograf. Yogyakarta: Repository PerpuskaanUMB Yogyakarta.

Klingensmith, Michael. (2017, 3 Januari). Writing a Review. Diperoleh 15 Juli 2018 dari http://www.saidsimple.com/content/100887/

Lentera Kecil. (2012, 17 Juni). Keterampilan Menulis Paragraf . Diperoleh 19 Juni 2012, dari https://lenterakecil.com/keterampilan-menulis-paragraf/

Noor, Ronny Rahman. 2017. Membuat Tulisan Ilmiah Populer Itu Tidak Mudah. Kompasiana. (Available from https://www.kompasiana.com/).

Stovall, James Glen. (2015). *Writing for the Mass Media (9th Edition)*. Tenessee: Pearson. Available from https://www.amazon.com/

Susantio, Djulianto. (2017, 5 Juni). Ketika Komunitas Membuat "Workshop" Penulisan Karya Ilmiah Populer. Diperoleh 15 Juli 2018 dari https://www.kompasiana.com/djuliantosusantio/

Tapia, Allena. (2018, May 11). Learn about the Different Types of Newspaper Articles: A Look at the Various Freelance Writing Opportunities. Downloaded May 11, 2018, from https://www.thebalancesmb.com/types-of-newspaper-articles-1360717